ISSN: 1411-0229

KULTURA

VOLUME : 19 No. 1 Juni 2018

Isi Menjadi Tanggung Jawab Penulis

Daftar Isi

Alistraja Dison Silalahi, SE.,M.Si	Memahami Analisis Cost Volume Profit Dalam Pengambilan Keputusan Perencanaan Manajerial
M. Faisal Husna dan Mariana	Penerapan Model Pembelajaran *Role Playing* Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran PPKN Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ex. PGA T.P. 2017/2018
Muhammad Ridwan Lubis, SH. M. Hum	Penanggulangan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Medan
Drs. Sulaiman, M.Pd	Pengaruh Keterampilan Teknikal Dan Keterampilan Pemimpin Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Di Universitas Jabal Ghafur Sigli
Budi Al Hadi, S,TP., MP	Pengaruh Pemberian Pupuk Daun Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Semangka (*Citrullus Vulgaris* Scard)
Asadi Luaha, S.Pd	Bentuk Dan Solusi Mengatasi Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pengawas Sekolah Di Kecamatan Onolalu
Otorus Harefa, S.Pd., SD	Hubungan Pengawasan Dan Supervisi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Drs. Saroziduhu Daeli	Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Matematika Pada Siswa SMP Negeri Lotu
Halimatul Maryani, SH., MH	Aspek Hukum Perdagangan Regional Dalam Ketentuan *World Trade Organization* (WTO) (Studi Terhadap Kesepaktan Afta-China)
Fatiziduhu Zega, S.Pd	Peningkatan Peran Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Bahasa Indonesia
Orani Zebua, SE, MSc	Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Petani Di Kecamatan Hili Serangkai
Serniati Zebua, SE, M.Si	Peranan Auditor Internal Dalam Organisasi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara
Amila Waruwu, S.Pd	Pelaksanaan Supervisi Oleh Kepala Sekolah Dan Pengawas Di Sekolah Dasar Negeri 078549 Botohili
Kasihani Giawa, S.Pd	Penggunaan Metode Pengajaran Bidang Studi Bahasa Indonesia Di SMP Negeri 1 Ulunoyo, Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan
Soda'aro Laia, S.Pd	Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Promosi Jabatan Guru Di SMP Negeri 4 Huruna, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan
Suarti Laia, S.Pd	Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Penanaman Nilai-Nilai Dalam Proses Pembelajaran
Yulimurniwati Bu'ulolo, S.Pd	Penggunaan Pendekatan Keterampilan Proses Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa SMP Negeri 1 Hilisalawa'ahe, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

ISSN: 1411-0229

KULTURA

VOLUME : 19 No. 1 Juni 2018

Isi Menjadi Tanggung Jawab Penulis

Daftar Isi

Alistraja Dison Silalahi, SE.,M.Si	Memahami Analisis Cost Volume Profit Dalam Pengambilan Keputusan Perencanaan Manajerial
M. Faisal Husna dan Mariana	Penerapan Model Pembelajaran *Role Playing* Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mat Pelajaran PPKN Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ex. PGA T.P. 2017/2018
Muhammad Ridwan Lubis, SH. M. Hum	Penanggulangan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Medan
Drs. Sulaiman, M.Pd	Pengaruh Keterampilan Teknikal Dan Keterampilan Pemimpin Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Di Universitas Jabal Ghafur Sigli
Budi Al Hadi, S,TP., MP	Pengaruh Pemberian Pupuk Daun Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Semangka (*Citrullus Vulgaris* Scard)
Asadi Luaha, S.Pd	Bentuk Dan Solusi Mengatasi Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pengawas Sekolah Di Kecamatan Onolalu
Otorus Harefa, S.Pd., SD	Hubungan Pengawasan Dan Supervisi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Drs. Saroziduhu Daeli	Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Matematika Pada Siswa SMP Negeri Lotu
Halimatul Maryani, SH., MH	Aspek Hukum Perdagangan Regional Dalam Ketentuan *World Trade Organization* (WTO) (Studi Terhadap Kesepaktan Afta-China)
Fatiziduhu Zega, S.Pd	Peningkatan Peran Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Bahasa Indonesia
Orani Zebua, SE, MSc	Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Petani Di Kecamatan Hili Serangkai
Serniati Zebua, SE, M.Si	Peranan Auditor Internal Dalam Organisasi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara
Amila Waruwu, S.Pd	Pelaksanaan Supervisi Oleh Kepala Sekolah Dan Pengawas Di Sekolah Dasar Negeri 078549 Botohili
Kasihani Giawa, S.Pd	Penggunaan Metode Pengajaran Bidang Studi Bahasa Indonesia Di SMP Negeri 1 Ulunoyo, Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan
Soda'aro Laia, S.Pd	Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Promosi Jabatan Guru Di SMP Negeri 4 Huruna, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan
Suarti Laia, S.Pd	Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Penanaman Nilai-Nilai Dalam Proses Pembelajaran
Yulimurniwati Bu'ulolo, S.Pd	Penggunaan Pendekatan Keterampilan Proses Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa SMP Negeri 1 Hilisalawa'ahe, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

ISSN: 1411 – 0229

JURNAL ILMIAH KULTURA

VOL. 19 NO. 1 JUNI 2018

1.	**Pelindung**	: H. Hardi Mulyono, SE., MAP
2.	**Pembina**	: 1. Dr. H. Firmansyah, M.Si
		: 2. Sri Wardany, SE., M.Si
		: 3. Drs. Milhan, MA
		: 4. Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH., M.Si., Ph.D
3.	**Ketua Pengarah**	: Prof. Dr. Ahmad Laut Hasibuan, M.Pd
4.	**Penyunting**	
	Ketua	: Drs. Saiful Anwar Matondang, MA
	Sekretaris	: Febry Ichwan Butsi, S.Sos., MA
	Anggota	: 1. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA
		: 2. Dr. H. Yusnar Yusuf, MS
		: 3. Dra. Nurhayati Harahap, M.Hum
		: 4. Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Hum
		: 5. Drs. Ulian Barus, M.Pd
		: 6. Nelvitia Purba, SH, M.Hum., Ph.D
		: 7. Ir. Zulkarnain Lubis, M.Si
		: 8. Dr. H. Ridwanto, M.Si
5.	**Editor Internasional**	: 1. Miguel Barrios Llora (Universidad de Cuence Ecuador)
		: 2. Robert Mamada (Arizona State University USA)
		: 3. Ponipate Rokolekutu (University of Hawaii USA)
6.	**Disainer / Ilustrator**	: 1. Agus Al Rozy, SP
		: 2. Daim Azhari Parinduri, S.Kom
7.	**Bendahara/Sirkulasi**	: 1. Drs. A. Marif, M.Si
		: 2. Nasruddin Nasrun, Amd

Pengantar Penyunting

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah kami ucapkan kepada Allah SWT atas berkat-Nya penyunting dapat menghadirkan kembali Volume 19.

Volume 19 No. 1 Juni 2018 Jurnal Ilmiah Kultura memuat tulisan yang berkenaan dengan Memahami Analisis Cost Volume Profit, Penerapan Model Pembelajaran, Penanggulangan dan Pemberatasan Tindak Pidana Narkotika, Pengaruh Keterampilan Teknikal, Pengaruh Pemberian Pupuk Daun, Bentuk dan Solusi Mengatasi Permasalahan, Hubungan Pengawasan dan Supervisi, Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Prestasi Belajar, Aspek Hukum Perdagangan Regional, Peningkatan Peran Guru dalam Kegiatan Pembelajaran Bahasa Indonesia, Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi, Peranan Auditor Internal, Pelaksanaan Supervisi Oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Di Sekolah, Penggunaan Metode Pengajaran Bidang Studi Bahasa Indonesia, Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja, Peningkatan Hasil Belajar IPS, Penggunaan Pendekatan Keterampilan Proses Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS.

Pada terbitan kali ini, tulisan berasal dari beberapa orang dosen Yayasan dan dosen tidak tetap Univ. Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Univ. Jabal Ghafur, Pengawas Sekolah di SDN No 078440, Hilionaha, Kecamatan Onolalu, Pengawas Sekolah Binaan TK Pembina TK/SD Lotu, Pengawas Sekolah SMPN 3 Lotu, Pengawas Sekolah Binaan SMPN 1.2.3, Dosen Tetap Yayasan IKIP Gunung Sitoli, Pengawas SDN 078549 Botohili, Kecamatan Lolowau, Pengawas SMP 1 Ulunoyo, Kecamatan Ulunoyo, Kepala Sekolah SPMN 4 Huruna, Kabupaten Nias Selatan, Pengawas SMPN 1 Huruna, Kecamatan Hunura, Kabupaten Nias Selatan, Pengawas SMPN 1 Hilisalawa'ahe, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kab. Nias Selatan

Medan, Juni 2018
Penyunting,

Penerbit:

Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah

Alamat Penerbit / Redaksi:

Jl. Sisingamangaraja/Garu II No. 93 Medan 20147
Telp. (061) 7867044 – 7868487 Fax. 7862747
Home Page: http://www.umnaw.ac.id/?page_id-2567
E-mail: info@umnaw.ac.id
Terbit Pertama Kali : Juni 1999
JURNAL TRIWULAN

ISSN: 1411 – 0229

Vol. 19 No. 1 Juni 2018

DAFTAR ISI

Memahami Analisis Cost Volume Profit Dalam Pengambilan Keputusan Perencanaan Manajerial
(***Alistraja Dison Silalahi, SE., M.Si***)..... 170

Penerapan Model Pembelajaran *Role Playing* Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran PPKN Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ex. PGA T.P. 2017/2018
(***M. Faisal Husna dan Mariana***)..... 177

Penanggulangan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Medan
(***Muhammad Ridwan Lubis, SH. M. Hum Hum***) 186

Pengaruh Keterampilan Teknikal Dan Keterampilan Pemimpin Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Di Universitas Jabal Ghafur Sigli
(***Drs. Sulaiman, M.Pd***) 195

Pengaruh Pemberian Pupuk Daun Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Semangka (*Citrullus Vulgaris* Scard)
(***Budi Al Hadi, S,TP., M***P) 204

Bentuk Dan Solusi Mengatasi Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pengawas Sekolah Di Kecamatan Onolalu
(***Asadi Luaha, S.Pd***) 212

Hubungan Pengawasan Dan Supervisi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
(***Otorus Harefa, S.Pd., SD***) 220

Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Matematika Pada Siswa SMP Negeri Lotu
(***Drs. Saroziduhu Daeli***) 229

Aspek Hukum Perdagangan Regional Dalam Ketentuan *World Trade Organization* (WTO) (Studi Terhadap Kesepaktan Afta-China)
(***Halimatul Maryani, SH., MH***) 241

Peningkatan Peran Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Bahasa Indonesia
(***Fatiziduhu Zega, S.Pd***) 250

Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Petani Di Kecamatan Hili Serangkai
(***Orani Zebua, SE, MSc***) 257

Peranan Auditor Internal Dalam Organisasi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara
(***Serniati Zebua, SE, M.Si***) 267

Pelaksanaan Supervisi Oleh Kepala Sekolah Dan Pengawas Di Sekolah Dasar Negeri 078549 Botohili
(***Amila Waruwu, S.Pd***) 275

Penggunaan Metode Pengajaran Bidang Studi Bahasa Indonesia Di SMP Negeri 1 Ulunoyo, Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan
(***Kasihani Giawa, S.Pd***) 282

Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Promosi Jabatan Guru Di SMP Negeri 4 Huruna, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan
(***Soda'aro Laia, S.Pd***) 290

Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Penanaman Nilai-Nilai Dalam Proses Pembelajaran
(***Suarti Laia, S.Pd***) 297

Penggunaan Pendekatan Keterampilan Proses Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa SMP Negeri 1 Hilisalawa'ahe, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan
(***Yulimurniwati Bu'ulolo, S.Pd***) 305

MEMAHAMI ANALISIS COST VOLUME PROFIT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERENCANAAN MANAJERIAL

Alistraja Dison Silalahi, SE.,M.Si[1]

ABSTRAK

Analisis Cost-Volume-Profit membantu manajemen dalam menemukan hubungan antara biaya dan pendapatan, tujuan hubungan ini adalah menghasilkan laba. Implementasi analisis Cost-Volume-Profit ini memiliki tujuan meliputi dalam rangka meramal laba secara akurat, menyususn flexible budget yang mengindikasikan biaya pada banyak level aktivitas, evaluasi kinerja, penetapan kebijakan harga, terdapat hubungan yang erat antara biaya, volume dan laba, jika volume meningkat biaya per unit akan menurun dan laba per unit akan meningkat, dengan demikian ada hubungan langsung antara volume dan keuntungan tetapi hubungan terbalik antara volume dan biaya sehingga analisis ini dapat diterapkan untuk perencanaan keuntungan, pengendalian biaya, evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan.
Kata kunci : Cost-Volume-Profit, Break Even Point, Penggunaan Cost-Volume-Profit

Pendahuluan

Secara umum tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan (laba), laba merupakan upaya dalam peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut atau dapat juga dikatakan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Laba menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja perusahaan, yang digunakan untuk pengambilan keputusan investor (Salehi.H. dkk, 2014), semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi kelangsungan hidupnya (going concern) bahkan perusahaan akan mampu untuk menjadi lebih besar sesuai dengan tujuannya (Hany dkk, 2003, Purnamasari. E, 2013). Laba terutama dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu volume produk yang dijual, harga jual produk dan biaya (Mulyadi, 2001). Biaya menentukan harga jual untuk mencapai tingkat laba, harga jual mempengaruhi volume penjualan, volume penjualan mempengaruhi volume produksi dan volume produksi mempengaruhi biaya.

Untuk memperoleh laba yang maksimal, perusahaan perlu membuat suatu perencanaan yang tepat dan cermat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perencanaan laba baik dilakukan dalam jangka panjang maupun jangka pendek, hubungan antara biaya, volume dan laba memegang peranan penting. Untuk menghitung dampak perubahan ketiga faktor diatas dibutuhkan suatu alat analisis yang disebut Analisis *Cost Volume Profit (CVP).*

Analisis Cost Volume Profit merupakan bagian terpenting dalam perencanaan laba (Verawati.E, 2014), hubungan analisis *Cost-Volume-Profit* dalam perencanaan laba dapat digunakan untuk menghitung titikimpas, target laba, margin keamanan(*margin of safety*), komposisi biaya untuk memaksimumkan margin kontribusi, struktur biaya atau *leverage* operasi (L.M. Samryn, 2001), titik impas adalah volume penjualan dimana pendapatan dan jumlah bebannya sama, tidak terdapat laba maupun rugi bersih (Foster dkk, 2008), total pendapatan sama dengan total biaya, dimana laba sama dengan nol (Hansen dan Mowen, 2009).

Untuk dapat menghitung CVP ada batasan yang harus dipenuhi yaitu : konsep tentang variabilitas biaya dapat diterima karena itu biaya harus realitas diklasifikasikan sebagai biaya variabel dan baiaya tetap, batasan

[1] *Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan*

yang relevan pada semua tahap analisis harus ditentukan, harga jual perunit tidak berubah jika terjadi perubahan volume, single product, jika analisis digunakan untuk berbagai produk atau kombinasi penjualan kombinasinya harus tetap, kebijakan manajemen terhadap operasi perusahaan tidak berubah secara material dalam jangka pendek. (Hansen dan Mowen, 2009).

Penelitian tentang penggunaan analisis *Cost-Volume-Profit* dalam perencanaan laba, penggunaan analisis pada satu jenis produk dan ada juga yang menggunakan untuk beberapa jenis produk Kim.H.S (2014), Muslikha dan Korawijayanti.L (2013) Gani. E (2012) . Dalam penelitian Kim.H.S (2014) bahwa penggunaaan analisis *Cost-Volume-Profit* pada perusahaan satu jenis produk sangat mudah untuk mengambarkannya tetapi dalam analisis *Cost-Volume-Profit* pada perusahaan berbagai macam jenis produk perlu mengambil langkah-langkah tambahan untuk menggambarkannya karena dalam kasus ini perusahaan mempunyai rasio penjualan campuran dalam produknya, sehingga dibutuhkan studi pengembangan suatu pendekatan mikro kepada penanganan sistem desimal jika muncul bila mana perusahaan mendapatkan titik impas dan titik target laba.

Melihat tinjauan penelitian dan asumsi dasar analisis *Cost-Volume-Profit* dalam pemilihan alternatif tindakan dan kebijakan manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai kemungkinan yang berpengaruh pada laba serta memahami analisis *Cost-Volume-Profit* dipandang perlu untuk memahami kembali dalam bentuk diskusi dan review paper maupun jurnal tentang analisis CVP sebagai alat perencanaan manajerial dimulai dengan melihat konsep dasar, tujuan, perhitungan analisis CVP, analisis target laba, margin pengaman, dan kelemahan analisis ini sehingga diperoleh artikel baru yang akhirnya memberikan kesimpulan dan rekomendasi.

Tinjauan Literatur

Konsep Dasar, Tujuan dan Perhitungan Analisis Cost-Volume-Profit

Dalam prinsip penandingan semua pendapatan dan biaya harus dihitung sehinga selisish antara pendapatan dan biaya tersebut merupakan laba/rugi. Biaya diklasifikasikan menjadi biaya tetap dan variable. Biaya variable merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan volume kegiatan atau produksi dan jumlah biaya per unitnya tidak mengalami perubahan. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume kegiatan atau produksi dan jumlah biaya per unitnya berubah.(Salman, 2013).

Kedua konsep biaya ini sangat penting dalam memahami analisis CVP dikarenakan hubungan keduanya sangat erat dengan penjualan dan laba. Hubungan biaya, penjualan, dan laba inilah yang selanjutnya dikembangkan ke analisis CVP. Analisis CVP memperluas penggunaan informasi yang diberikan oleh analisis titik impas (*break-even analysis*). CVP sama dengan BEP, dapat diabagi dalam dua perhitungan yaitu :

a. CVP (unit) dihitung S/Q – VC/Q
b. CVP (Rp) dihitung 1 – VC/S yang disebut dengan Contribution Margin (CMR) atau Marginal Income Ratio (MIR) atau Profit Volume Ratio

   Jika FC = CMR, menghasilkan BEP (0), FC >CMR = Profit dan jika FC<CNR = Loss

Hansen & Mowen (2009) menjelaskan bahwa CVP sama dengan Break Even Point yang dapat digunakan dalam menghitung peramalan yaitu :

Operating – Income Approach = Operating Income = SR – VE – FE

Contribution – Margin Approach = Number of Unit = FC/Unit Contribution Margin

Profit Target, merencanakan laba tanpa pajak : S = FC + Laba/(1 – VC/S)

Merencanakan laba setelah pajak : S + FC + $\frac{\text{Laba/1 - Tax}}{\text{CMR}}$

Titik impas (Break Even Point) adalah titik keseimbangan yang tidak menghasilkan keuntungan dan kerugian. Istilah titik impas berasal dari bidang keuangan, namun konsep tersebut telah diterapkan secara luas. Dalam bidang akuntansi biaya titik impas adalah titik dimana biaya atau beban dan pendapatan adalah sama, pada titik ini tidak ada kerugian atau keuntungan bersih yang dihasilkan. Dalam kasus linear, titik impas adalah sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Titik impas dapat dicapai apabila keuntungan yang dihasilkan sesuai dengan biaya total yang diakumulasikan sampai dengan tanggal perolehan keuntungan (Wikipedia).

Salman (2013), Perlu dipahami bahwa analisis CVP atau analisis titik impas mempunyai beberapa asumsi dasar sebagai berikut :

- Perilaku biaya dan pendapatan adalah linear sepanjang rentang aktivitas yang relevan
- Biaya dapat diklasifikasikan secara akurat menjadi biaya tetap dan biaya variabel, apabila ada biaya campuran maka biaya tersebut harus dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya varaiabel.
- Perubahan aktivitas adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya
- Semua unit yang diproduksi adalah terjual (tidak ada persediaan barang jadi akhir)
- Analisis terbatas pada satu jenis produk. Apabila perusahaan menjual dari satu jenis produk, bauran produk (rasio setiap produk terhadap total penjualan) akan tetap konstan.

Analisis CVP membantu manajemen dalam menemukan hubungan antara biaya dan pendapatan, tujuan hubungan ini adalah menghasilkan laba. Implementasi analisis CVP ini memiliki tujuan meliputi: dalam rangka meramal laba secara akurat, menyususn *flexible budget* yang mengindikasikan biaya pada banyak level aktivitas, evaluasi kinerja, penetapan kebijakan harga. (Salman, 2013).

Analisis Break Even Point

$$\text{BEP (unit)} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Harga per unit – Biaya Variabel per unit}}$$

$$\text{Rumus lain} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Marjin kontribusi per unit}}$$

$$\text{Rumus lain} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{1- Biaya Variabel/Penjualan}} \qquad \text{Rumus lain} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Rasio margin kontribusi}}$$

Analisis Target Laba

$$\text{Jumlah penjualan(unit)} = \frac{\text{Biaya Tetap + Target Laba}}{\text{Harga per unit – Biaya variabel per Unit}}$$

$$\text{rumus lain} = \frac{\text{Biaya Tetap + Target Laba}}{\text{Marjin Kontribusi per Unit}}$$

$$\text{Jumlah penjualan (rp)} = \frac{\text{Biaya Tetap + Target Laba}}{\text{1 – Biaya Variabel/Penjualan}}$$

$$\text{rumus lain} = \frac{\text{Biaya Tetap + Target Laba}}{\text{Rasio Marjin kontribusi}}$$

Margin Pengaman (*margin of safety*)

Niswonger dkk (2001) menyatakan perbedaan antara pendapatan penjualan periode berjalan dengan penjualan pada titik impas disebut marjin pengaman (*margin of safety*). Dalam mengevaluasi resiko pengoperasian suatu usaha manajer dapat memakai beberapa indikator, salah satu indikator yang paling penting adalah margin pengaman. Marjin pengaman adalah kelebihan penjualan yang dianggarkan atas volume penjualan impas, dengan marjin ini perusahaan dapat menentukan seberapa banyak penjualan boleh diturunkan agar perusahaan tidak menderita kerugian. (Salman, 2013)

$$\text{Marjin Pengaman} = \text{Total Penjualan – Penjualan pada titik impas}$$

$$\text{rumus lain} = \frac{\text{Laba}}{\text{Rasio Marjin Kontribusi}}$$

$$\text{Marjin pengaman dinyatakan dalam \% dari penjualan} = \frac{\text{Marjin pengaman} \times 100\%}{\text{Penjualan}}$$

Kelemahan Analisis *Cost-Volume-Profit*

Sebaik apapun konsep atau pendekatan pasti terdapat kelemahan atau keterbatasan, keterbatasan analisis CVP meliputi : biaya tetap ternyata tidak selalu tetap konstan, biaya variabel tidak selalu bervariasi secara proporsional, penjualan tidak selalu berubah secara proporsional, diragukan validitasnya ketika perusahaan menjual banyak produk dengan marjin laba yang berbeda, analisis titik impas didasarkan atas asumsi bahwa laba dipengaruhi oleh pengaruh penjualan, kondisi pertumbuhan perusahaan tidak diasumsikan dalam analisis titik impas, informasi yang disajikan terbatas.

Penggunaan Analisis *Cost-Volume-Profit*

Banyak penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan antara biaya variabel, tetap, harga jual per unit, tingkat laba dan penjualan menggunakan analisis CVP. (Navaneetha dkk, 2017. Salehi dkk, 2014, Machuga. S ,2012, Choo.F dan Tan. K.B, 2011).

Sadiq dkk (2017) menyimpulkan terdapat hubungan yang erat antara biaya, volume dan laba. Jika volume meningkat biaya per unit akan menurun dan laba per unit akan meningkat, dengan demikian ada

hubungan langsung antara volume dan keuntungan tetapi hubungan terbalik antara volume dan biaya sehingga analisis ini dapat diterapkan untuk perencanaan keuntungan, pengendalian biaya, evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan

Meskipun analisis Cost-Volume-Profit secara luas digunakan, analisis ini menuai kritik karena asumsi penyederhanaan atas keterbatasannya, fokus pada satu produk, analisis satu periode, dan kurangnya pertimbangan biaya modal (Atkinson K , Matsumara Y, 2012).

Dalam penelitian Kim.H.S (2014) bahwa penggunaaan analisis *Cost-Volume-Profit* pada perusahaan satu jenis produk sangat mudah untuk mengambarkannya tetapi dalam analisis *Cost-Volume-Profit* pada perusahaan berbagai macam jenis produk perlu mengambil langkah-langkah tambahan untuk menggambarkannya karena dalam kasus ini perusahaan mempunyai rasio penjualan campuran dalam produknya, sehingga dibutuhkan studi pengembangan suatu pendekatan mikro kepada penanganan sistem desimal jika muncul bila mana perusahaan mendapatkan titik impas dan titik target laba.

Metode Riset

Dalam penulisan ini menggunakan metode studi literature atau kepustakaan, dengan mencari referensi teori dari penelitian penelitian terdahulu, jurnal, artikel yang berhubungan dengan penggunaan atau implementasi analisis *Cost-Volume-Profit* pada perusahaan termasuk mencari keunggulan dan kelemahannya

Pembahasan

Merujuk beberapa penelitian tentang penggunaan analisis *Cost-Volume-Profit* pada perusahaan, untuk perencanaan laba dengan mempertimbangkan antara biaya dan keuntungan disatu sisi dan volume produksi di sisi lain, dapat diterapkan untuk perencanaan keuntungan, pengendalian biaya, evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. (Rosario. R, 2012, Maslikha dan Korawijayati. L, 2013, Gani.E, 2013, Assa. R. L, 2013, Verawati. E, 2014, Satriani. S, dkk, 2015, Ahvalina.I, 2016). Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa analisis *Cost-Volume-Profit* dapat digunakan untuk mengetahui atau membuat peramalan laba produksi. Penganalisisan *Cost-Volume-Profit* tersebut dilakukan dengan menggunakan metode analisis *contribution margin*, analisis *break even point*, analisis target laba, analisis *margin of safety*, dan analisis *operating leverage*. Dengan penggunaan alat tersebut memberikan hasil bahwa produksi produk air minum dalam kemasan galon CV. Mentari Dempo Indah terbukti sangat produktif dan memberikan kontribusi laba yang cukup besar. (Satriani. S. dkk, 2015).

Navaneetha dkk, (2017) dalam permasalahan penelitiannya, laba diperlukan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan setiap perusahaan bisnis. Jika bisnis tidak membuat keuntungan tidak akan bertahan hidup di dunia yang kompetitif. Jadi dalam hal setiap realisasi keuntungan, biaya setiap produk dan keuntungan harus diperbaiki, untuk alasan itu mereka harus menghitung titik impas dan focus semua sumber daya dari bisnis untuk bekerja menuju persimpangan (sebuah analisis volume profit biaya perusahaan Nestle). Penelitian ini bertujuan untuk analisis biaya volume profit di Perusahaan Nestle untuk periode 2012-2016, dari temuan diatas

telah menyimpulkan bahwa volume profit biaya keseluruhan perusahaan Nestle, sangat membantu, sevara keseluruhan penjualan Nestle berkinerja baik dan mereka harus tetap menjaganya.

Sadiq dkk (2017) dalam pernyataan permasalahan penelitian, salah satu keputusan penting yang perlu dibuat sebelum bisnis dimulai "berapa banyak yang perlu dijual untuk impas" menyimpulkan terdapat hubungan yang erat antara biaya, volume dan laba. Jika volume meningkat biaya per unit akan menurun dan laba per unit akan meningkat, dengan demikian ada hubungan langsung antara volume dan keuntungan tetapi hubungan terbalik antara volume dan biaya sehingga analisis ini dapat diterapkan untuk perencanaan keuntungan, pengendalian biaya, evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan.

Kim.H.S (2014) bahwa penggunaaan analisis *Cost-Volume-Profit* pada perusahaan satu jenis produk sangat mudah untuk mengambarkannya tetapi dalam analisis *Cost-Volume-Profit* pada perusahaan berbagai macam jenis produk perlu mengambil langkah-langkah tambahan untuk menggambarkannya karena dalam kasus ini perusahaan mempunyai rasio penjualan campuran dalam produknya, sehingga dibutuhkan studi pengembangan suatu pendekatan mikro kepada penanganan sistem desimal jika muncul bila mana perusahaan mendapatkan titik impas dan titik target laba.

Salehi.H.dkk , 2014 dalam tujuan artikel nya adalah untuk menjelaskan keuntungan ekonomi dan mengkaji bagaimana biaya modal dan karena itu keuntungan ekonomi masuk ke analisis CVP. Hubungan matematis antara laba operasi diskonto setelah pajak setelah dikurangi biaya modal, harga, biaya, dana investasi dan jumlah penjualan dihasilkan dan dinilai. Dari hubungan ini jumlah penjualan yang dibutuhkan untuk mendapatkan tingkat pengembalian sama dengan biaya modal perusahaan dapat diperkirakan, Mengembangkan Kontribusi biaya modal terhadap analisis CVP memungkinkan manajer menentukan nilai tambah atau kerugian untuk tingkat penjualan dan pertukaran tertentu. Kesimpulan dalan artikelnya menyebutkan masuknya biaya modal ke dalam analisis CVP yang merupakan biaya implisit menyebabkan keuntungan ekonomi daripada keuntungan akuntansi masuk ke dalam analisis CVP. Kecacatan analisis CVP untuk melibatkan biaya modal dalam fungsi biaya suatu produk menyebabkan estimasi biaya produk yang lebih kecil dan perkiraan yang lebih tinggi terhadap profitabilitas produk. Untuk produk yang memerlukan investasi besar, terlepas dari biaya kesempatan untuk menginvestasikan dana, hal itu dapat menyebabkan penerimaan metode yang tingkat hasilnya lebih rendah daripada biaya modal perusahaan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tinjauan beberapa artikel maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pada penggunaan analisis *Cost-Volume-Profit*, tetapi semua pada intinya sebaik apapun konsep atau pendekatan pasti terdapat keunggulan dan keterbatasan. Analisis CVP membantu manajemen dalam menemukan hubungan antara biaya dan pendapatan, tujuan hubungan ini adalah menghasilkan laba. Implementasi analisis CVP ini memiliki tujuan meliputi dalam rangka meramal laba secara akurat, menyususn *flexible budget* yang mengindikasikan biaya pada banyak level aktivitas, evaluasi kinerja, penetapan kebijakan harga, terdapat hubungan yang erat antara biaya, volume dan laba, jika volume meningkat biaya per unit akan menurun dan laba per unit akan meningkat, dengan demikian ada hubungan langsung antara volume dan keuntungan tetapi

hubungan terbalik antara volume dan biaya sehingga analisis ini dapat diterapkan untuk perencanaan keuntungan, pengendalian biaya, evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

Atkinson K, Matsumara Y, 2012. Manajement Accounting. 6rd.NY: Springer Pubication.

Ahvalina. I, (2016), eJournal Administrasi Bisnis, 2016, 4 (2): 452-466 ISSN 2355-5408, ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id

Choo, F.& Tan K.B (2011). An Income Satatement Approach for Cost-Volume-Profit (CVP) Analysis by Using a Company's CVP Model. Journal of Accounting and Finance, 11(4), 23-36.

Hansen, Don R, &Mowen, Maryanne M. Mowen, 2009. Akuntansi Manajemen, 7th ed. Jakarta, Salemba Empat.

Hamid Salehi, dkk (2014) Internasional Journal of Basic Science & Applied Reserach, Volume 3 (SP), 202-206, ISSN 2147-3749.

Karowijayanti. L dan Muslikha (2013), Jurnal akuntansi, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2013. ISSN 23032146.

Kim.H.S. (2014), International Journal of Accounting ann Financial Reporting. ISSN, 2162-3082, Volume 5, Nomor 1.

Kautsar Riza Salman, Akuntansi Manajemen: Alat Pengukuran dan Pengambilan Keputusan Manajerial. Jakarta: Indeks, 2016.

Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen.*Salemba Empat. Jakarta.

Navaneetha dkk, (2017) Manajement and Administrative Sciences Review, Volume 6, Issue 2, Page 99-103, Maret 2017

Niswonger., Warren., Reeve. 2001. *Prinsip-prinsip Akuntansi.* Erlangga. Jakarta.

Purnamasari, Erina, *"Cost-Volume-Profit Analysis Untuk Evaluasi Pencapaian Laba"*, Universitas Dian Nurwantoro,Semarang, 2013.

Samryn, L.M. (2001). Akuntansi Manajerial, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Striani. S dkk, (2015) Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis dan Keuangan (JIABK), Volume 3, Issue 2, November 2015, ISSN 2355-9047.

Sadiq Rabiu Abdullahi, dkk (2017) IOSR Journal of Business and Manajemen, Februari 2017, Volume 19, Issue 2, e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN:2319-7668, PP 40-45.

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *ROLE PLAYING* UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN PPKN SISWA KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH EX. PGA T.P. 2017/2018

M. Faisal Husna[1] dan Mariana[2]

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn. Tujuan dalam penelitin ini adalah untuk mengetahui apakah dengan penerapan Model Pembelajaran Role Playing dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PPKn siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ex PGA T.P. 2017/2018. Hipotesisnya adalah Penerapan Model Pembelajaran Role Playing dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PPKn siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ex PGA T.P. 2017/2018".

Adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ex PGA T.P. 2017/2018 dengan jumlah 30 siswa, sedangkan objek penelitian ini adalah Penerapan Model Pembelajaran Role Playing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran PPKn Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ex PGA T.P. 2017/2018.

Hasil penelitian, Penerapan Model Pembelajaran Role Playing memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (46.7%), siklus II (83.3%) sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Model Pembelajaran Role Playing, sangat efektif digunakan di kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ex PGA, dengan kata lain hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat diterima kebenarannya.

Kata Kunci : *a. Model Pembelajaran Role Playing, b. Hasil Belajar Siswa, c.PPKn,*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatiham, proses, cara, dan perbuatan mendidik. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2002).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) No.65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada tingkat SMP/MTs untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, sikap dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk dapat menyajikan materi pelajaran dengan baik dan menyenangkan melalui metode pembelajaran yang sesuai guna menarik perhatian siswa dan tercipta suasana belajar yang kondusif. Observasi yang dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Ex. PGA kelas VII untuk mata

[1] *Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan*
[2] *Mahasiswa/Alumni UMN Al Washliyah*

pelajaran PPKn diperoleh hasil belajar siswa rendah ditandai dengan kurang optimalnya partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di Madrasah Tsanawiyah Ex. PGA kelas VII dengan memperbarui metode pembelajaran yang dapat merangsang partisipasi, prakarsa, kreativitas serta minat dan bakat sesuai tuntutan Permendikbud RI No. 65 Tahun 2013 di atas, yaitu melalui Model Pembelajaran *Role Playing*. Model pembelajaran ini siswa dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, yakni siswa memainkan peran orang lain seolah-olah berada di luar kelas meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk aktivitas siswa dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PPKn. Model pembelajaran ini melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari siswa lain setelah temannya bermain peran. Metode ini memilki kelebihan diantaranya ada unsur permainan yang menyebabkan model ini lebih menarik perhatian siswa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tindakan kelas ini diberi judul: "Penerapan Model Pembelajaran *Role Playing* Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran PPKn Siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ex. PGA T.P. 2017/2018".

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan penerapan Model Pembelajaran *Role Playing* dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PPKn siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ex. PGA T.P 2017/2018”

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Ex. PGA T.P. 2017/2018. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ex. PGA T.P 2017/2018, yang berjumlah 30 siswa. Objek penelitian adalah penerapan model pembelajaran *Role Playing* untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PPKn. Instrumen yang digunakan dalam menjaring data adalah melalui observasi dan tes. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dekriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa, juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran.

Data penelitian diperoleh dari data observasi berupa pengamatan pengelolaan penerapan model pembelajaran *Role Playing* sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn, dan data tes formatif untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran *Role Playing*.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Model Pembelajaran *Role Playing*

Trianto (2007:1) mengartikan model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Sementara Arends dalam Agus (2009:46) menyatakan bahwa model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya :

a) Tujuan-tujuan pembelajaran; b) Tahap tahap dalam kegiatan pembelajaran; c) Lingkungan pembelajaran; d) Pengelolaan kelas.

Arends dan pakar pembelajaran yang lain berpendapat, bahwa tidak ada model pembelajaran yang baik diantara yang lainnya, karena masing-masing model pembelajaran dapat dirasakan baik, apabila telah diuji coba untuk mengajarkan materi pelajaran tertentu.

Menurut Miftahul A'la (2011:49) model pembelajaran *Role Playing* adalah suatu model penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dimiliki oleh setiap siswa. Kelebihan model ini adalah seluruh siswa dapat berpartisipasi dan mempunyai kesempatan untuk menguji kemampuannya dalam bekerja sama. Dalam hal pengajaran *Role Playing* siswa diharapkan agar dapat memahami konsep peran, dengan itu proses belajar mengajar di dalam kelas bisa lebih aktif. Konsep peran yang dibuat di dalam kelas tersebut menjadikan siswa lebih optimis, menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi sehingga peroses belajar mengajar menjadi lebih mengasikkan.

Uno Hamzah (2009:26) menyatakan bermain peran sebagai suatu model pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa menemukan jati diri di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Artinya, melalui bermain peran siswa belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran yang berbeda dan memikirkan perilaku dirinya dan perilaku orang lain.

Lebih lanjut Uno Hamzah membagi prosedur bermain peran terdiri atas 7 (tujuh) langkah, yaitu:

1. Pemanasan (*Warming up*)
2. Memilih pemain
3. Menyiapkan pengamat(*observer*)
4. Menata panggung
5. Memainkan peran
6. Diskusi dan evaluasi
7. Kesimpulan

Langkah pertama, pemanasan. Guru berupaya memperkenalkan siswa pada permasalahan yang mereka sadari sebagai suatu hal yang bagi semua orang perlu mempelajari dan menguasainya. Bagian berikutnya dari proses pemanasan adalah menggambarkan permasalahan dengan jelas disertai contoh. Hal ini bisa muncul dari imajinasi siswa atau sengaja disiapkan oleh guru.

Langkah kedua,memilih pemain. Siswa dan guru membahas karakter dari setiap pemain dan menentukan siapa yang akan memainkannya. Dalam pemilihan ini, guru dapat memilih siswa yang sesuai untuk memainkannya atau siswa sendiri yang mengusulkan akan memainkan siapa dan mendeskripsikan peran-perannya.

Langkah ketiga, guru menunjuk beberapa siswa sebagai pengamat. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pengamat di sini juga harus terlibat aktif dalam memainkan peran. Untuk itu, walaupun mereka ditugaskan sebagai pengamat, guru sebaiknya memberikan tugas peran terhadap mereka agar dapat terlibat aktif dalam permainan peran.

Langkah keempat,menata panggung. Dalam hal ini guru mendiskusikan dengan siswa di mana dan bagaimana peran itu akan dimainkan. Apa saja kebutuhan yang diperlukan. Penataan panggung ini dapat sederhana atau kompleks, yang paling sederhana adalah hanya membahas skenario yang lengkap yang menggambarkan urutan permainan peran. Misalnya siapa dulu yang muncul, kemudian diikuti oleh siapa, dan seterusnya.

Langkah kelima, permainan peran ini dimulai. Permainan peran dilaksanakan secara spontan. Pada awalnya banyak siswa yang masih bingung memainkan perannya atau bahkan tidak dengan peran yang seharusnya ia lakukan. Bahkan, mungkin ada yang memainkan perannya atau bahkan tidak sesuai dengan peran yang bukan perannya, jika permainan peran sudah terlalu jauh keluar jalur, guru dapat menghentikannya untuk segera masuk ke langkah berikutnya.

Langkah keenam, guru bersama siswa mendiskusikan permainan tadi dan melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan, dan langkah ketujuh guru dan siswa membuat kesimpulan dari permainan peran yang dilaksanakan.

Kelebihan Model Pembelajaran *Role Playing* adalah: 1). Siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh; 2). Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu berbeda; 3). Guru dapat mengevaluasi pemahaman setiap siswa melalui pengamatan pada saat melakukan permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa; 4). Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa; 5). Sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias; 6). Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi; 7). Dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah, dan dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan penghayatan siswa sendiri. Adapun kelemahan model ini adalah: 1). Model bermain peran memerlukan waktu yang relatif lama; 2). Memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid; 3). Kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk melakukan suatu adegan tertentu; 4). Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui model ini.

2.2 Pengertian Belajar dan Hasil Belajar

Slameto dalam Djamarah (2011:13) merumuskan pengertian tentang belajar. Menurutnya belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sementara dalam kehidupan terjadi suatu proses belajar mengajar, baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga dari proses belajar-mengajar ini akan diperoleh suatu hasil pelajaran atau yang disebut dengan hasil belajar.

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di sekolah. Menurut Sudjana (2010:22) “Hasil belajar adalah kemampuan siswa setelah menerima pengalaman belajar”. Selanjutnya menurut Hamalik (2006:155), memberikan gambaran bahwa hasil belajar yang diperoleh dapat diukur melalui kemajuan yang diperoleh siswa setelah belajar dengan sungguh-sungguh. Hasil belajar dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran yang dimaksud adalah profesional yang dimiliki oleh guru. Hasil belajar tampak adanya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur

melalui perubahan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Kriteria yang digunakan dalam menilai proses belajar-mengajar antara lain ialah konsistensi kegiatan belajar-mengajar dengan kurikulum, keterlaksanaannya oleh guru dan siswa, serta motivasi belajar siswa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Siklus I

A. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dipersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKS, soal tes formatif, dan alat-alat pengajaran yang mendukung.

B. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada bulan November 2017 di kelas VII dengan jumlah 30 siswa. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pembelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I sebagai instrumen dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan.

Berdasarkan data pengelolaan pembelajaran pada siklus I bahwa aspek yang mendapatkan kriteria kurang baik adalah memotivasi siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengatur siswa dalam kelompok-kelompok belajar, melatih keterampilan kooperatif, pengelolaan waktu, dan antusias siswa. Keenam aspek yang mendapat nilai kurang baik tersebut merupakan suatu kelemahan yang terjadi pada siklus I dan akan dijadikan bahan kajian untuk refleksi dan revisi yang akan dilakukan pada siklus II.

Selanjutnya sesuai data diperoleh hasil observasi siklus I terhadap aktivitas guru dan siswa adalah bahwa yang paling dominan yaitu membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan konsep sebesar 20,00%. Aktivitas lain yang persentasinya cukup besar adalah menjelaskan materi yang sulit sebesar 18,33%, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab sebesar 15,00%. Sedangkan aktivitas siswa yang paling dominan adalah mengerjakan/memperhatikan penjelasan guru yaitu 22,50%. Aktivitas lain yang persentasinya cukup besar adalah bekerja dengan sesama anggota kelompok, diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru, dan membaca buku yaitu masing-masing 18,75%, 14,38% dan 11,46 %.

Pada siklus I, secara garis besar kegiatan belajar mengajar dengan penerapan model pembelajaran *Role Playing* sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun peran guru masih cukup dominan untuk memberikan penjelasan dan arahan, karena model tersebut masih dirasakan baru oleh siswa.

Berikut rekapitulasi hasil tes formatif nilai siswa pada siklus I adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siklus I

No	Uraian	Hasil Siklus I
1	Nilai rata-rata tes formatif	6.21
2	Jumlah siswa yang tuntas belajar	16
3	Persentase ketuntasan belajar	46.7

Hasil tes siklus pertama secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 hanya sebesar 46.7% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan Model Pembelajaran *Role Playing*.

3.2. Siklus II

A. Tahap Perencanaan

Tahap ini dipersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pembelajaran 2, LKS 2, soal tes formatif II, dan alat-alat pengajaran yang mendukung.

B. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus II merupakan lanjutan dari siklus I. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa selama proses belajar mengajar yang telah dilakukan.

Berdasarkan data pengelolaan pembelajaran pada siklus II yang dilaksanakan oleh guru dengan menerapkan model pembelajaran *Role Playing* yang mendapatkan penilaian cukup baik dari pengamat adalah memotivasi siswa, menghubungkan dengan pelajaran sebelumnya, mempresentasikan langkah-langkah metode pembelajaran, membimbing siswa melakukan kegiatan, memberikan bantuan kepada kelompok yang mengalami kesulitan, membimbing siswa membuat rangkuman, memberikan evaluasi dan pengelolaan waktu. Penyempurnaan aspek-aspek diatas dalam penerapan model pembelajaran *Role Playing* diharapkan dapat berhasil semaksimal mungkin.

Lebih lanjut dalam hasil observasi tampak bahwa aktivitas guru yang paling dominan pada siklus II adalah membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan konsep yaitu 25,00%, sedangkan aktivitas memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab sebesar 16,67% dan menjelaskan materi yang sulit menurun sebesar 11,67%. Aktivitas lain yang mengalami peningkatan adalah menyampaikan materi/strategi/langkah-langkah 11,67%, dengan pelajaran sebelumnya 5,00 %, mengkaitkan dengan pelajaran sebelumnya menurun 6,67% yang sebelumnya sebesar 8,33 %, meminta siswa menyajikan dan mendiskusikan hasil kegiatan menurun menjadi 8,33%, dan memotivasi siswa 6,67%. Adapun aktivitas yang tidak menglami perubahan adalah membimbing siswa merangkum pelajaran sebesar 6,67% dan menyampaikan tujuan 6,67%.

Sedangkan untuk aktivitas siswa yang paling dominan pada siklus II adalah bekerja dengan sesama anggota kelompok yaitu 21,04% dan mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru 17,92%, aktivitas yang mengalami peningkatan adalah membaca buku siswa 12,08% dan mengerjakan tes evaluasi sebesar 10,83%. Sedangkan aktivitas yang lainnya mengalami penurunan adalah diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru sebesar 13,75% yang sebelumnya 14,38%.

Adapun tabel rekapitulasi hasil test nilai siswa pada siklus II adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Rekapitulasi Hasil Tes Siklus II

No	Uraian	Hasil Siklus II
1	Nilai rata-rata tes formatif	7.22
2	Jumlah siswa yang tuntas belajar	24
3	Persentase ketuntasan belajar	83.3

Hasil tes pada siklus II menunjukkan ketuntasan belajar secara klasikal telah mengalami peningkatan lebih baik dari siklus I. Adanya peningkatan hasil belajar siswa ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran *Role Playing* sehingga siswa menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang telah diberikan. Pada siklus II ini ketuntasan secara klasikal telah tercapai, sehingga penelitian ini hanya sampai pada siklus II.

C. Tahap Refleksi

Pada tahap ini dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan Model Pembelajaran *Role Playing*. Dari data-data yang telah diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar.
2) Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses belajar berlangsung.
3) Kekurangan pada siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik.
4) Hasil belajar padaa siklus II mencapai ketuntasan.

D. Tahap Revisi Pelaksanaan

Pada siklus II guru telah menerapkan model pembelajaran *Role Playing* dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta hasil belajar siswa dan pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, akan tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya penerapan model pembelajaran *Role Playing* dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Pembahasan

1. Ketuntasan Hasil belajar Siswa

Hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa penerapan model *Role Playing* memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari sklus I ke siklus II) yaitu masing-masing 46.7%, dan 83.3 %. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai.

2. Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran *Role Playing* dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan.

Dengan demikian, "Penerapan Model Pembelajaran *Role Playing* dapat Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran PPKn Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ex. PGA T.P 2017/2018, dapat diterima kebenarannya.

3. Aktivitas Guru dan Siswa Dalam Pembelajaran

Berdasakan analisis data, diperoleh aktifitas siswa dalam proses pembelajaran PPKn dengan penerapan model pembelajaran *Role Playing* yang paling dominan adalah bekerjasama dengan anggota kelompok, mendengarkan/ memperhatikan penjelasan guru dan diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktifitas siswa dikategorikan aktif.

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan langkah-langkah kegiatan belajar mengajar dan menerapkan model pengajaran *role playing* dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru diantaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan konsep, menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab dimana persentase untuk aktivitas di atas cukup besar.

4. Kesimpulan

1. Penerapan Model Pembelajaran *Role Playing* memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (46.7%), siklus II (83.3%).
2. Penerapan Model Pembelajaran *Role Playing* mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang ditunjukan dengan hasil wawancara dengan sebagian siswa, rata-rata jawaban siswa menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat dengan Model Pembelajaran *Role Playing* sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar.

Daftar Pustaka

Abdul Haris dan Jihad. 2010. *Evaluasi Pembelajaran.* Yogyakarta: Multi Pressindo

Agus, Suprijono. 2009. *Evaluasi Hasil Belajar*. Jakarta : Jaya Cipta

A'la, Miftahul. 2011. *Quantum Teaching.* Yogyakarta: Diva Press

Arends. Dalam Trianto. 2009. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif Konsep, Landasan Dan Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

_____, 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Djamarah, Syaiful Bahri.2012.*Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Putra

_____, 2011. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Hamalik, Oemar. 2006. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Hamzah, Uno. 2009. *Model Pembelajaran*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Margono. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Soekidjo Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Sudjana, Nana. 2010. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.

Trianto.2007.*Model-Model Pembelajaran Inovatife Berorientasi Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustaka

PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA MEDAN

Muhammad Ridwan Lubis, SH. M. Hum[1]

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.

Faktor penyebab seseorang menggunakan narkotika disebabkan oleh faktor internal seperti perasaan egois, kehendak bebas, kegoncangan jiwa, dan rasa keingintahuan. Faktor eksternal antara lain meliputi: keadaan ekonomi, pergaulan/lingkungan, kemudahan (semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap), kurangnya pengawasan (pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan dan peredarannya), serta ketidaksenangan dengan keadaan sosial (untuk melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial). Berdasarkan analisis, maka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum di Kota Medan dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan prevemtif yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkotika, penyebaran pamflet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama serta pembinaan terhadap masyarakat

Kata Kunci : Penanggulangan dan Pemberantasan, Tindak Pidana, Narkotika,

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri**.** Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

[1] *Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan*

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan niali-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Bahkan pesantrenpun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.

Beritik tolak dari uraian di atas, maka penulis memilih judul tentang : **"Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kota Medan.**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah :

"Bagaimana penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum di Kota Medan"

Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Komariah E. Sapardjaja "Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa sutau tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Dari hal tersebut terlihat bahwa kesalahan adalah faktor penentu pertanggung jawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi tindak pidana. Hal ini Nampak sebagaimana di katakana Moeljatno, apakah Inkonkreto yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh di jatuhi pidana atau tidak. Itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sudah diluar konteks pengertian tindak pidana.

Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.

Usaha untuk memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawabn pidana harus terus menerus dikembangkan sehingga manfaat dapat menyeluruh. Menurut Andi Hamzah, "Pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh penuntut umum dal;am penyusunan surat dakwaan, karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti *(bestandeel)* delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi actus reus saja. Bertolak dari pendapat di atas, maka dengan sendirinya juga sangat penting bagi penasehat hukum untuk menyusun pembelaan. Pada gilirannya hakim juga perlu untuk memahami konsep ini dalam menyusun putusan.

Mengingat Pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat dikatakan *Nullum Crimen Sine Lege* dan *Nulla Poena Sine Lega* merupakan prinsip utama dari asas legalitas, sehingga penyimpangannya sejauh mungkin dihindari. Karena itu sutau perbuatan bagaimanapun bentuknya baru merupakan perbuatan pidana bilaman perbuatan itu dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan orangnya diancam dengan pidana.

Rumusan tindak pidana juga berisi ancaman pidana atau sanski yang diletakkan pada tindak pidana tersebut. Ancaman pidana ini ditunjukkan bagi „orang. yang melakukan tindak pidana. Andi Hamzah, menyatakan yang dapat dipidana ialah pembuat. Ancaman pidana karenanya ditunjukkan kepada orang yang melakukan kelakuan yang di larang, mengabaikan printah yang seharusnya di lakukan, dank arena perbuatannya menimbulkan akibat terlarang. Ancaman pidana tidak ditunjukkan terhadap perbuatan terlarang tersebut. Melainkan ditunjukkan terhadap orang yang melakukannya. Hal ini berdasarkan pada pandangan bahwa hanya oranglah yang dapat memiliki kesalahan. Kealahan itu difat orang, dan bukan sifat dari suatu perbuatan. "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" berarti tiada pemindaaan tanpa kesalahan. Pemindanaan di timpakan terhadap orang, dan bukan terhadap suatu perbuatan.

Perumusan tindak pidana dalam KUHP tidak sepenuhnya demikian. Adakalnya ancaman pidana ditunjukkan terhadap.orang., tetapi dalam rumusan tindak-tindak pidana yang lain, ancaman pidana justru ditujukan terhadap perbuatannya.. Andi Hamzah mengatakan, "ancaman pidana di tujukan terhadap orang ternyata dan rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata "barang siapa". Kata ini menunjukkan kepada siapa saja „orang. yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut diancam dengan pidana.

Apabila memperhatikan beberapa tindak pidana di luar KUHP, bahkan dirumuskan dengan kata-kata yang lebih tegas menuju kepada orang. Yaitu : "setiap orang" yang menggantikan "barang siapa". Demikian pula halnya dengan Rancangan KUHP. Sekalipun kata-kata "setiap orang" disini bukan hanya ditujukan terhadap orang perorangan, tetapi juga korporasi. namun demikian tetap saja ancaman pidana ditunjukkan terhadap pembuatanya (baik orang perseorangan dan/atau korporasi), dan tidak lagi ditinjaukan terhadap perbuatannya.

Tindak pidana narkotika begitu membahayakan kelangsungan generasi muda, oleh sebab itu tindak pidana ini perlu ditanggulangi dan diberantas. Marjono Reksodiputro merumuskan penanggulangan sebagai untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya Arief Amrullah menyatakan bahwa:

Kebijakan penanggulangan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberantasan tindak pidana narkotika dihubung dengan fakta-fakta sosial.

B. Narkotika

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu " Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal

dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih haruis di gertak) serta adiksi.

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, "Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah *dihydo morfhine*. Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam undang-undang.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Pembahasan

C. Penanggulangan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Medan.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Disadari pula bahwa masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.

Sampai saat ini penyalahgunaan narkotika di belahan dunia manapun tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di Amerika Serikat yang dikatakan memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, ternyata angka penyalahgunaan narkotika makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu.

Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan narkotika telah mencapai titik yang mengkawatirkan, karena pada saat ser awal tahun 1990-an masalah narkotika masih belum popular dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai negara transit saja, belakangan ini telah dijadikan sebagai negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai negara produsen/pengeksport narkotika terbesar di dunia.

Keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, mendorong munculnya pabrik-pabrik gelap baru dan penyalahgunaan narkotika lain akan semakin marak di masa mendatang. Kondisi ini tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan Narkoba ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menyadari bahwa penyalahgunaan narkotika ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistik hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkotika serta bagaimana melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkoba ini.

Dalam melakukan aksinya, penyalahguna narkotika dapat melalui beberapa cara atau modus operandi sebagai berikut :

1. Kelompok pengedar :
   a. Guna melancarkan aksinya, mereka sering melakukan penyuapan kepada petugas, seperti Polisi, Petugas Bea dan Cukai, Jaksa maupun Hakim. Ada kalanya mereka juga mempengaruhi petugas-petugas tersebut atau keluarganya sebagai target operasi untuk menyalahgunakan Narkoba.
   b. Sindikat pelaku terdiri dari jaringan yang juga terkait dengan jaringan yang sangat luas yang ada kota-kota besar di Indonesia dengan menggunakan sistem sel atau ”cut”, yaitu terdapat beberapa tingkatan pengedar, dimana masing-masing tingkat tidak saling kenal sehingga jika salah satu tingkatan pengedar tertangkap, dia tidak bisa menunjuk jaringan di atasnya.
   c. Modus operandi peredaran Narkoba dari pengedar tingkat paling bawah yang berhubungan langsung dengan pengguna, biasanya dengan cara mempengaruhi kelompok ”rentan” yaitu kelompok masyarakat bermasalah secara ekonomis, psikologis, sosial dan lain-lain, melalui dua cara, yaitu :
      1) Terhadap kelompok bermasalah secara ekonomis, seperti orang tua yang kurang mampu termasuk ibu-ibu rumah tangga, mereka mempengaruhi dengan menjanjikan keun-tungan ekonomi yang tinggi dengan mengatakan bahwa saat ini hanya dengan berdagang Narkoba saja yang bisa memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif cepat sehingga dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi.
      2) Terhadap kelompok bermasalah lain seperti mahasiswa, pelajar dan generasi muda lainnya, setelah kenal biasanya dipengaruhi dengan memberikan Narkoba secara gratis untuk mengatasi permasalahan hidup atau untuk mendapat-kan kenikmatan dunia. Kemudian setelah korban dapat merasakan kenikmatan (halusinasi dan eforia) dan yakin korban akan menginginkannya kembali maka ia diminta untuk membeli. Setelah korban mengalami ketergantungan dan tidak memiliki uang untuk membeli maka dia diminta untuk membantu mengedarkan atau menjual atau mempe-ngaruhi teman-temannya yang lain untuk menggunakan Narkoba juga. Demikian seterusnya sampai mendapatkan banyak korban-korban baru.
2. Pengguna :
   a) Biasanya mereka memesan Narkoba kepada pengedar melalui telepon/HP untuk diantarkan oleh kurir pada suatu tempat yang sudah ditentukan.
   b) Dapat juga bagi para pengguna yang sudah menjadi pelanggan tetap melakukan transaksi langsung di TKP seperti di diskotik, pub, karaoke dan lain-lain.

c) Setelah mendapatkan barang/Narkoba, kemudian para pengguna mengkonsumsinya terlebih dahulu di rumah, kemudian pergi bersenang-senang di diskotik, pub, karaoke dan tempat-tempat pesta lainnya. Hal ini untuk menghindari jika ada operasi dari polisi, maka tidak kedapatan atau tidak ditemukan adanya barang bukti dalam badan/penguasaannya.

d) Selain itu penggunaan Narkoba sering dilakukan secara bersama-sama di suatu tempat seperti hotel, tempat kost, rumah pribadi dan lain sebagainya.

Tindak pidana peredaran narkotika yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat akan mewujudkan moral rendah, diakibatkan tekanan ekonomi sehingga menimbulkan reaksi-reaksi., atau juga dari kebiasaan jiwa seseorang yang mengalami kelainan jiwa. Sering sekali suatu kejahatan khususnya kasus kejahatan peredaran narkotika, dimungkinkan karena ada kesempatan dan niat yang telah direncanakan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

Faktor internal antara lain meliputi perasaan egois, kehendak bebas, kegoncangan jiwa, dan rasa keingintahuan. Dan faktor eksternal antara lain meliputi: keadaan ekonomi, pergaulan/lingkungan, kemudahan (semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap), kurangnya pengawasan (pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan dan peredarannya), serta ketidaksenangan dengan keadaan sosial (untuk melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial).

Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika sangat beragam, yang meliputi faktor psikologis, faktor biologis, faktor ekonomis, faktor sosiologis, serta faktor yuridis, yang kesemuanya saling berhubungan satu sama lain.

Faktor internal penyalahgunaan narkotika adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang di antaranya adalah:

1. Ketidaktahuan

   Dasar dari seluruh penyebab penyalahgunaan narkotika adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan tentang narkotika adalah awal pemakaian dan segala bencana. Ketidaktahuan tersebut menyangkut berbagai hal, seperti: tidak mengenali apa itu narkotika, tidak tahu bentuknya, tidak tahu akibat buruknya terhadap fisik, mental, moral, serta masa depannya. Banyak penyalahguna narkotika tidak tahu bahwa yang dikonsumsinya adalah narkotika. Pedagang, pengedar dan Bandar narkotika adalah orang-orang jahat yang cerdik dan memiliki strategi marketing yang sangat jitu, sehingga tanpa sadar orang dijerat masuk perangkap. Narkotika ditawarkannya sebagai pil sehat, pil pintar, dan *food suplement*, sehingga tanpa sadar orang mengonsumsi narkotika dan akhirnya menjadi ketagihan.

2. Ingin kenikmatan sesaat.

   Awalnya orang memakai narkotika karena mengharapkan kenikmatan, yang berupa: bebas dari rasa kesal, kecewa, stres, takut, frustrasi, serta ingin merasakan tenang, tenteram, dan damai, yang kesemuanya tersebut diumbar oleh para pengedar yang piawai.

3. Alasan yang berkaitan dengan perangai/sifat

a. Ingin tahu, yang bagi para remaja hampir semuanya memiliki rasa ingin tahu tinggi didorong oleh keberaniannya serta didesak oleh gejolak dalam jiwanya yang ingin berinovasi, menjadi pemberani dan pahlawan di antara teman-teman sebayanya.
b. Ingin dianggap hebat, yang biasanya didorong oleh sifat dasar yang dimiliki oleh generasi muda berupa sifat ingin berkompetisi.
c. Rasa setia kawan, yang pada remaja perasaan setia kawan di dalam suatu kelompok ini sangat kuat, sehingga jika ada salah satu yang memakai narkotika maka yang lainnya juga memakai demi suatu kekompakan.
d. Rasa kecewa, frustrasi, kesal, yang biasanya terjadi karena kegagalan dalam belajarnya maupun dalam pergaulan. Tidak naik kelas, tidak lulus ujian, atau dikhianati oleh sahabat karib, sering menimbulkan kekecewaan, frustrasi dan kekesalan dapat mengantarkan menuju narkotika.

Faktor eksternal adalah yang berasal dari luar, antara lain adalah:

1. Alasan keluarga, keluarga yang *broken home* (struktur keluarga sudah tidak lengkap lagi karena salah satu atau kedua orang tuanya meninggal, perceraian orang tua, salah satu atau kedua orang tuanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama) atau *quasi broken home* (kedua orang tuanya masih utuh tetapi karena masing-masing mempunyai kesibukan sendiri-sendiri sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya), jumlah anak yang kurang menguntungkan, serta faktor eksternal yang berasal dari pengaruh teman pergaulan yang juga sebagai penyalahguna narkotika. Kegagalan berkomunikasi antara orang tua dengan anaknya misalnya menyangkut cita-cita/pilihan sekolah, pacar, atau permintaan anak yang tidak dikabulkan, sering menimbulkan kesalahfahaman, pertengkaran, bahkan permusuhan serta konflik yang tidak berkesudahan apabila berlarut-larut dapat berujung pada suasana seperti di neraka, tidak tenteram dan damai yang kesemuanya tersebut dapat mengantarkan remaja lari menuju narkotika. Keadaan keluarga yang kacau balau, anak kurang mendapatkan kasih sayang, merasa kurang dihargai, kurang mendapatkan kepercayaan, sering dipersalahkan juga menjadi faktor pemicu menggunakan narkotika.
2. Alasan orang lain, yaitu berupa pengaruh dari orang lain, seperti: tipu daya, bujuk rayu, dan paksaan. Banyak anak ditipu oleh teman, sahabat, atau orang di ser yang menawarkan narkotika sebagai vitamin atau foot suplement dengan disertai bujuk rayu sampai kepada pemaksaan.
3. Jaringan peredaran luas, sehingga narkotika mudah didapat, akan membuat pengguna semakin meningkat apalagi didorong oleh rendahnya kualitas moral serta buruknya kondisi sosial ekonomi yang dapat mendorong orang untuk melakukan apa saja asal dapat uang, termasuk menjadi pengedar narkotika yang baiasanya sekaligus memakainya.

Strategi pemasaran yang jitu, membuat narkotika meluas ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan sindikat narkotika dapat mengatur atau membantu membiayai program penganggulangan penyalahgunaan narkotika yang ikut aktif menyusup dalam organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang berjuang menanggulangi penyalahgunaan narkotika untuk menyesatkan program, memandulkan organisasi, atau mengetahui strategi dan

mengenal tokoh pejabat yang dapat didekati demi keuntungan sindikatnya dan keleluasaan perdagangan narkotika.

Kesimpulan

Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsekta Medan Baru dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan preemtif yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkotika, penyebaran pamflet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama serta pembinaan terhadap masyarakat. Pendekatan ini dilakukan oleh Polsekta Medan Baru bekerjasama dengan BNN dan para ahli melalui perspektif antropologi budaya, sosiologi, komunikasi, psikologi, pendidikan hidup sehat (ilmu kesehatan masyarakat), sedangkan upaya represif yakni dengan menerapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Daftar Bacaan

Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika* UMM Press, Malang, 2009

Asya, F, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta 2009.

A.W, Wijaya, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 2005.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2004

Dirdjosisworo, Soedjono. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2007.

----------; *Kriminologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Fajri, Em Zul, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher.Jakarta, 2007.

Hatta, Moh. *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2010

Hamzah, Andi dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.

Nadack, Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia* Publishing House, Bandung, 2003

Poernomo. Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, 2003.

Suparni. Niniek, *Eksisten Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

S, Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika: UU Nomor 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

PENGARUH KETERAMPILAN TEKNIKAL DAN KETERAMPILAN PEMIMPIN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA KARYAWAN DI UNIVERSITAS JABAL GHAFUR SIGLI

Drs. Sulaiman, M.Pd[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterampilan teknikal dan keterampilan pemimpin terhadap efektivitas karyawan di Universitas Jabal Ghafur Sigli. Penelitian ini dilakukan di Universitas Jabal Ghafur Sigli. Adapun yang menjadi sampel diambil sebanyak 36 orang karyawan dan semua digunakan sebagai sampel. Analisis data yang digunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan keterampilan teknikal dan keterampilan pemimpin berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan. Secara parsial menunjukkan bahwa keterampilan teknikal tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan, tetapi keterampilan pemimpin memiliki pengaruh secara signifikan terhadap efektivitas karyawan.

Kata kunci : *keterampilan teknikal, keterampilan pemimpin* dan *efektivitas kerja*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Manusia (SDM) dalam Membangun karir merupakan salah satu tugas perkembangan yang akan dilalui dalam kehidupan individu yang harus terus meningkatkan kemampuannya agar dapat membangun karir ataupun jabatan yang dimilikinya. Hal ini diarahkan untuk mengoptimalkan segala kemampuan dan kekuatan yang ada dalam setiap individu atau pribadi. Selain itu, dalam organisasi atau instansi setiap karyawan mengharapkan tidak hanya sekedar uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi juga memiliki keinginan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya. Salah satu sarana penting yang menjadi media untuk aktualisasi diri tersebut adalah pengembangan karir. Dengan adanya program pengembangan karir seorang pegawai dapat menduduki posisi-posisi tertentu yang diinginkan. Karyawan dalam suatu organisasi memiliki kemampuan yang beragam, dilihat dari sektor-sektor ataupun divisi yang di tempatinya. Perkembangan di bidang keterampilan dan pengalaman kerja membuat organisasi harus semakin peka dalam peningkatan kualitas sumber daya yang dimilikinya. Terdapat juga sumber daya manusia atau karyawan yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi mempunyai kemampuan yang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Oleh karena itu untuk menyikapi fenomena tersebut perlu adanya tindak lanjut dari organisasi sebagai upaya agar kemampuan yang dimiliki pegawai tidak sama akan tetapi terus berkembang. Salah satunya yaitu dengan adanya pelatihan dan pengembangan karir pegawai. Program tersebut sebagai upaya organisasi untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan global yang terjadi, baik organisasi publik maupun bisnis.

Keterampilan hanya dapat ditunjukkan melalui kegiatan-kegiatan atau pelatihan dan pengembangan dilalukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan kerja yang dimiliki karyawan . Terutama menghadapi kondisi-kondisi baru. Hal ini berkaitan dengan karir dan diharapkan sebagai upaya dalam mengatasi adanya kadaluwarsa sumber daya manusia pada organisasi tersebut.

Bagi karyawan yang mempunyai keterampilan kerja yang baik, maka akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi, sebaliknya pegawai yang tidak terampil akan memperlambat tujuan organisasi. Untuk pegawai

[1] *Dosen Universitas Jabal Ghafur*

baru atau karyawan dengan tugas baru diperlukan tambahan keterampilan guna pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Keterampilan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Lebih lanjut tentang keterampilan Dunnett's dalam Lian (2013:17) *skill* adalah sebagai kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Ada beberapa keterampilan yang dimiliki karyawan. Dalam penelitian ini keterampilan yang akan diteliti adalah keterampilan teknikal dan keterampilan pemimpin, dimana dianggap kedua keterampilan ini sangat mempengaruhi efektivitas kerja karyawan.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh keterampilan teknikal dan keterampilan pemimpin terhadap efektivitas karyawan di Universias Jabal Ghafur Sigli.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh keterampilan teknikal dan keterampilan pemimpin terhadap efektivitas karyawan di Universias Jabal Ghafur Sigli.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap karyawan Universitas Jabal Ghafur Sigli. Data Peneltian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner sebanyak 36 responden. Variabel operasional dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel independen (X) yaitu keterampilan teknikal dan keterampilan pemimpin, serta 1 (satu) variabel dependen (Y) yaitu efektivitas karyawan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan program SPSS. Persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

Y = Variabel dependen (efektivitas kerja karyawan)

X_1 = Keterampilan teknikal

X_2 = Keterampilan pemimpin

a = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi

2. Uraian Teoritis

2.1. Keterampilan

Keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti cakap, mampu, dan cekatan. Iverson (2001 : 56) mengatakan keterampilan membutuhkan pelatihan dan kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang dapat lebih membantu menghasikan sesuatu yang lebih bernilai dengan lebih cepat.

Menurut Robbins (2000 : 54) mengatakan keterampilan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu :

1. *Basic Literacy Skill* : Keahlian dasar yang sudah pasti harus dimiliki oleh setiap orang seperti membaca, menulis, berhitung serta mendengarkan.

2. *Technical Skill* : Keahlian secara teknis yang didapat melalui pembelajaran dalam bidang teknik seperti mengoperasikan kompter dan alat digital lainnya.
3. *Interpersonal Skill* : Keahlian setiap orang dalam melakukan komunikasi satu sama lain seperti mendengarkan seseorang, memberi pendapat dan bekerja secara tim.
4. *Problem Solving* : Keahlian seseorang dalam memecahkan masalah dengan menggunakan logika atau perasaanya.

Ketrampilan-ketrampilan yang perlu dimiliki seorang pemimpin menurut Katz (1979:25) dalam Burhanuddin (1994; 91-92) dikelompokkan menjadi :

1. Ketrampilan membuat konsep (*conceptual skills*)

Ketrampilan ini menunjukkan kemampuan berpikir, seperti menganalisa suatu persoalan, memutuskan dan memecahkan masalah. Ketrampilan konseptual mencerminkan aspek-aspek sebagai berikut :

a. Kemampuan analisis.
b. Berfikir secara rasional.
c. Ahli atau cakap dalam berbagai macam konsepsi.
d. Kreatif dalam berbagai ide dalam pemecahan masalah.
e. Mampu untuk mengemukakan analisis berbagai kejadian serta memahami berbagai macam kecenderungan.
f. Mampu mengantisipasikan perintah.
g. Mampu mengenali berbagai macam kesempatan dan problem-problem potensial.

2. Ketrampilan Teknis (*Techincal skills*)

Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, metode dan tehnik-tehnik tertentu dalam menyelesaikan suatu tugas secara spesifik. Dalam kegiatan belajar mengajar didalam kelas seorang guru dituntut supaya bisa menggunakan metode dan tehnik sesuai dengan kondisi dan kemampuan belajar siswa yang didukung dengan sarana ataupun komponen-kompenen belajar yang lain.

Metode dan tehnik adalah suatu cara kerja yang sistematik dan umum. Ia berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Makin baik suatu metode dan tehnik makin efektif pula dalam pencapaiannya. Tetapi, tidak ada satu metode dan tehnik pun yang dikatakan paling baik/ dipergunakan bagi semua macam usaha pencapaiannya. Baik tidaknya, tepat tidaknya suatu metode dan tehnik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor utama yang menentukan metode adalah tujuan yang akan dicapai.

Penerapan suatu metode dan tehnik pengajaran harus memiliki : Tujuan pengajaran yang jelas dan tepat akan membantu dalam memilih metode dan tehnik belajar mengajar, bahan pelajaran menjadi acuan untuk menerapkan sesuatu jenis metode. Bahan itu mengandung unsure emosi, memerlukan pengamatan, memerlukan gerakan/ketrampilan tertentu, mengandung materi hafalan dan sebagainya, kemampuan guru, metode dan tehnik yang digunakan oleh guru untuk mengajar haruslah dikuasai betul olehnya.

3. Ketrampilan Manusiawi (*Human skills*)

Ketrampilan ini menunjukkan kemampuan seseorang dalam bekerja dengan dan melalui orang lain secara efektif, dan untuk membina kerja sama. Letak kunci keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi

bawahan, yakni sejauh mana ia mampu melaksanakan ketrampilan-ketrampilan yang menyangkut kemanusiaan. Jadi ketrampilan ini mencerminkan aspek-aspek :

a. Pengetahuan perilaku manusia dan proses kerjasama.
b. Kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan motif orang lain mengapa mereka berkata dan melakukan pekerjaan.
c. Kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif.
d. Kemampuan untuk menciptakan kerjasama yang efektif dan kooperatif, praktis dan diplomatis.

Dari pembahasan di atas tentang ketrampilan-ketrampilan dalam kepemimpinan maka penulis mengambil kesimpulan yang akan dijadikan indikator adalah: kemampuan menggunakan metode dan tehnik, kemampuan bekerja dan bekerjasama dengan orang lain dan kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah.

4. Keterampilan Menjalin Kerja Sama

Menurut Sanaky dalam keterampilan memimpin, mengemukakan bahwa keterampilan menjalin kerjasama (Sanaky, 2003 : 83). Suatu pekerjaan jika dikerjakan seseorang terasa sangat berat, namun jika dikerjakan secara bersama-sama, pekerjaan itu terasa mudah dan cepat selesai. Hal ini dimungkinkan karena ada enerji yang digabung dan akan menghasilkan hasil yang lebih baik (Rivai dan Basri, 2005 : 75). Rivai da Basri (2005 : 78) mengatakan sinergi merupakan interaksi antara dua individu dan dengan menggabungkan usaha akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan berdiri sendiri. Melalui hubungan yang bersinergi kebersamaan individu dalam bekerja sama menuju tujuan yang umum secara terus menerus menyediakan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bagi kedua partisipan sama dengan perusahaan mereka. Kutipan di atas mengatakan bahwa kerjasama itu sangat penting. Bekerjasama adalah suatu proses kelompok yang disokong oleh anggota-anggota kelompok, dan ada ketergantungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang disepakati. Kerjasama kelompok dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Kumpulan individu tersebut memiliki aturan dan mekanisme kerja yang jelas serta saling tergantung antara satu dengan yang lain

2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterampilan

Notoadmodjo (2007 : 56) mengatakan keterampilan merupakan aplikasi dari pengetahuan sehingga tingkat keterampilan seseorang berkaitan dengan tingkat pengetahuan, dan pengetahuan dipengaruhi oleh :

a. Tingkat Pendidikan

   Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik pengetahuan yang dimiliki. Sehingga, seseorang tersebut akan lebih mudah dalam menerima dan menyerap hal-hal baru. Selain itu, dapat membantu mereka dalam menyelesaikan hal-hal baru tersebut.

b. Umur

   Ketika umur seseorang bertambah maka akan terjadi perubahan pada fisik dan psikologi seseorang. Semakin cukup umur seseorang, akan semakin matang dan dewasa dalam berfikir dan bekerja.

c. Pengalaman

Pengalaman dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dan sebagai sumber pengetahuan untuk memperoleh suatu kebenaran. Pengalaman yang pernah didapat seseorang akan mempengaruhi kematangan seseorang dalam berpikir dalam melakukan suatu hal. Ranupantoyo dan Saud (2005) mengatakan semakin lama seseorang bekerja pada suatu pekerjaan yang ditekuni, maka akan semakin berpengalaman dan keterampilan kerja akan semakin baik.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan secara langsung menurut Widyatun (2005 : 34), yaitu:

a. Motivasi

Merupakan sesuatu yang membangkitkan keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan berbagai tindakan. Motivasi inilah yang mendorong seseorang bisa melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang sudah diajarkan.

b. Pengalaman

Merupakan suatu hal yang akan memperkuat kemampuan seseorang dalam melakukan sebuah tindakan (keterampilan). Pengalaman membangun seseorang untuk bisa melakukan tindakan-tindakan selanjutnya menjadi lebih baik yang dikarenakan sudah melakukan tindakan-tindakan di masa lampaunya.

c. Keahlian

Keahlian yang dimiliki seseorang akan membuat terampil dalam melakukan keterampilan tertentu. Keahlian akan membuat seseorang mampu melakukan sesuatu sesuai dengan yang sudah diajarkan.

2.3. Efektivitas Karyawan

Ada beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, diantaranya Menurut Emerson (dalam Hasibuan 2005: 242) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005:109).

Efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan serta kualitas kerja yang baik (Hasibuan, 2005 : 105). Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat (Sedarmayanti, 2011: 59).

Menurut Etzoni dalam Tangkilisan (2005:139), efektivitas kerja adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan system sosial dengan segala sumber daya dan saran tertentu yang tersedia dalam memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu antara anggota-anggotanya.

Menurut Kusdi dalam Tangkilasan (2009: 94), efektivitas kerja adalah sejauh mana organisasi mencapai berbagai sasaran (jangka pendek) dan tujuan (jangka panjang) yang telah ditetapkan, dimana penetapan sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan itu mencerminkan konstituen strategis, kepentingan subjektif penilai, dan tahap pertumbuhan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan beberapa pengertian tentang efektivitas di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas adalah suatu ukuran untuk memberikan gambaran sejauh apa pencapaian mengenai sasaran atau tujuan berdasarkan tugas dan fungsi yang sebelumnya telah ditentukan

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Pengujian regresi linear berganda menjelaskan besarnya keterampilan teknikal dan keterampilan pemimpin terhadap efektivitas kerja karyawan. Hasil analisis regresi dengan perhitungan yang menggunakan *software* SPSS selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut.

Berdasarkan hasil tersebut maka persamaan regresi linier berganda yang mempunyai formulasi :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Sehingga diperoleh persamaan:

$$Y = 6{,}209 + 0{,}297\ X_1 + 0{,}326\ X_2$$

Dengan estimasi simpangan baku peramalan sebesar 2,948.

Deskripsi dari persamaan regresi linear berganda di atas adalah sebagai berikut :

b_0 : 6,209

Bilangan konstanta (b_0) sebesar 6,209 menunjukkan besarnya efektivitas kerja karyawan apabila keterampilan teknikal dan keterampilan pemimpin sama dengan 0.

b_1 : 0,297

Koefisien regresi pertama (b_1) sebesar 0,297 menunjukkan besarnya pengaruh keterampilan teknikal terhadap efektivitas kerja karyawan dengan asumsi keterampilan pemimpin konstan. Artinya apabila faktor keterampilan teknikal meningkat 1 satuan nilai, maka diprediksi efektivitas kerja karyawan meningkat sebesar 0,297 satuan nilai dengan asumsi keterampilan pemimpin konstan.

b_2 : 0,326

Koefisien regresi kedua (b_2) sebesar 0,326 menunjukkan besarnya pengaruh keterampilan pemimpin terhadap efektivitas karyawan dengan asumsi keterampilan teknikal konstan. Artinya apabila faktor keterampilan pemimpin meningkat 1 satuan nilai, maka diprediksi efektivitas karyawan meningkat sebesar 0,326 satuan nilai dengan asumsi keterampilan teknikal konstan.

a. Uji Simultan (uji F)

Uji ini bertujuan untuk menguji signfikannya pengaruh pengetahuan dan keterampilan pemimpin secara simultan terhadap efektivitas kerja karyawan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Uji F

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	214.112	2	107.056	12.314	.000[a]
	Residual	286.888	33	8.694		
	Total	501.000	35			

a. Predictors: (Constant), Keterampilan_pemimpin, Keterampilan_teknikal

b. Dependent Variable: Efektivitas_keja

Prosedur dan kriteria penerimaan serta penolakan hipotesis ditetapkan sebagai berikut :

a. Hipotesis :

H_0 : Tidak ada pengaruh keterampilan teknikal dan keterampilan pemimpin yang signifikan terhadap efektivitas karyawan.

H_1 : Ada pengaruh keterampilan teknikal dan keterampilan pemimpin yang signifikan terhadap efektivitas karyawan.

b. Berdasarkan uji F diketahui F_{hitung} sebesar 12,314 dengan nilai signifkansi sebesar 0,000< 0,05, sehingga H_0 ditolak atau H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan teknikal dan keterampilan pemimpin secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas karyawan.

b. Uji Parsial (uji t)

Untuk mengetahui pengaruh parsial dari setiap variabel keterampilan teknikal dan keterampilan pemimpin terhadap efektivitas karyawan Kuliner dilakukan dengan uji t seperti pada Tabel 2.

Tabel 2.

Uji t Pengaruh Keterampilan Teknikal dan Keterampilan Pemimpin terhadap Efektivitas Kerja Karyawan

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.209	3.404		1.824	.077
	Keterampilan_teknikal	.297	.175	.276	1.694	.100
	Keterampilan_pemimpin	.325	.117	.453	2.782	.009

a. Dependent Variable: Efektivitas_keja

1). Uji hipotesis pengaruh keterampilan teknikal terhadap efektivitas karyawan (X_1).

Prosedur dan kriteria penerimaan serta penolakan hipotesis ditetapkan sebagai berikut :

a. Hipotesis

H_0: $b_1 = 0$ artinya, keterampilan teknikal tidak mempunyai pengaruh terhadap efektivitas karyawan.

H_1 : $b_1 \neq 0$ artinya, keterampilan teknikal mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas karyawan.

b. Uji Hipotesis

Bila Nilai Sig. < 0,05, maka H_0 ditolak artinya keterampilan teknikal mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap efektivitas karyawan dan apabila Nilai Sig > 0,05, maka H_0 diterima, artinya keterampilan teknikal tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap efektivitas karyawan.

c. Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS diketahui t_{hitung} sebesar 1,694.

d. Nilai signifikansi pengaruh keterampilan teknikal sebesar 0,100 > 0,05. Dari uraian, maka dapat disimpulkan H_1 ditolak, artinya keterampilan teknikal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan.

2). Uji hipotesis pengaruh keterampilan pemimpin terhadap efektivitas karyawan (X_2).

Prosedur dan kriteria penerimaan serta penolakan hipotesis ditetapkan sebagai berikut :

a. Hipotesis

H_0: $b_1 = 0$ artinya, keterampilan pemimpin tidak mempunyai pengaruh terhadap efektivitas karyawan.

H_1 : $b_1 \neq 0$ artinya, keterampilan pemimpin mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas karyawan.

b. Uji Hipotesis

Bila Nilai Sig. < 0,05,, maka H_0 ditolak artinya keterampilan pemimpin mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap efektivitas karyawan dan apabila Nilai Sig > 0,05, maka H_0 diterima, artinya keterampilan pemimpin tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap efektivitas karyawan.

c. Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS diketahui t_{hitung} sebesar 2,782.

d. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa nilai sig. Kerampilan pemimpin sebesar 0,009 < 0,05, maka dapat disimpulkan H_1 diterima, artinya keterampilan pemimpin berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa keterampilan teknikal tidak berpengaruh signfiikan terhadap efektivitas kerja karyawan, tetapi keterampilan pemimpin mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas karyawan.

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan teknikal tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan, tetapi berpengaruh positif terhadap efektivitas kerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan teknikal dapat meningkatkan efektivitas kerja karyawan, walaupun dalam pengaruh yang relatif kecil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan pemimpin berpengaruh signifikan terhadap efekttivitas kerja karyawan. Keterampilan pemimpin mempengaruhi pengikutnya untuk mencapai perubahan berupa hasil yang diinginkan bersama. Keterampilan pemimpin merupakan aktivitas orang-orang, yang terjadi di antara orang-orang, dan bukan sesuatu yang dilakukan untuk orang-orang sehingga dapat mempengaruhi bawahannya. Keterampulan pemimpin juga melibatkan keinginan dan niat, keterlibatan yang aktif antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dengan demikian, baik pemimpin atau pun pengikut mengambil tanggung jawab pribadi (*personal responsibility*) untuk mencapai tujuan bersama.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Secara simultan keterampilan teknikal dan keterampilan pemimpin berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan.
2. Secara parsial menunjukkan bahwa keterampilan teknikal tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan, tetapi keterampilan pemimpin memiliki pengaruh secara signifikan terhadap efektivitas karyawan.

4.2. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas karyawan, disarankan pihak instansi Universitas Jabal Ghafur meningkatkan keterampilan pemimpin.
2. Perlu peran yang lebih baik dari pihak universitas agar dapat meningkatkan keterampilan teknikal sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadpa efektifivitas kerja karyawan.

Daftar Pustaka

Anwar, Moch. Idochi. 1994. Kepemimpinan Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Angkasa.

Arcynthia, Lian. 2013. Analisis Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Bank Bukopin, Tbk. Cabang Makassar. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Burhanuddin. 1994. Analisis Administrasi Manajemen Dan Kepemimpinan. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasibuan, Malayu SP. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi. Aksara.

Iverson. 2001. Memahami Keterampilan Pribadi. Bandung : CV. Pustaka.

Kurniawan Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.

Ma'mur, Jamal. 2009. Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Professional. DIVA Press. Jogjakarta.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. Pendidikan dan Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta.

Ranupendoyo dan Saud. 2005. Manajemen Personalia. Yogyakarta: Pustaka Binawan.

Rivai, Vethzal. dan A.F.M Basri. 2005. Performance apraisal. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Robbins, P.S. 2002. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Jakarta: Erlangga.

Sanaky AH., Hujair, 2003. Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani. Indonesia. Yogyakarta: Safiria Insani Press.

Sedarmayanti. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Cetakan Kelima. Bandung : PT Refika Aditama.

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Widayatun. 2005. Ilmu Perilaku, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta.

PENGARUH PEMBERIAN PUPUK DAUN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI SEMANGKA (*Citrullus vulgaris* SCARD)

Budi Al Hadi, S,TP., MP[1]

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk daun terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman semangka. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok non faktorial, dengan satu faktor perlakuan yaitu konsentrasi pupuk cair (A), yang terdiri atas 6 taraf perlakuan, yaitu : A_0 = kontrol (tanpa ACI), A_1 = 0.5 Super ACI/l air, A_2 = 1.0 Super ACI/l air, A_3 = 1.5 Super ACI/l air, A_4 = 2.0 Super ACI/l air dan A_5 = 2.5 Super ACI/l air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk daun nyata meningkatkan panjang turus pada umur 46 dan 61 hst, nyata meningkatkan diameter buah, bobot buah per buah dan bobot buah per petak, tetapi tidak nyata mempercepat umur berbunga tanaman semangka. Peningkatan panjang turus, diameter buah, bobot per buah dan bobot buah per petak akibat pemberian konsentrasi pupuk daun adalah parabola terhadap parameter panjang daun, diameter buah, bobot buah per tanaman dan bobot buah per petak. Konsentrasi pupuk daun sebesar 2 cc/l air lebih baik memberikan produksi yakni diamter buah sebesar 15.19 cm, bobot buah sebesar 3.54 kg dan bobot buah per petak sebesar 31.85 kg.

Kata kunci : *pupuk daun* dan *tanaman semangka*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Semangka termasuk salah satu tanaman buah-buahan semusim yang mempunyai arti penting bagi perkembangan sosial ekonomi baik rumah tangga maupun negara. Pengembangan budidaya semangka ini mempunyai prospek cerah karena dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan petani, pengentasan kemiskinan, perbaikan gizi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pengurangan import dan peningkatan eksport nonmigas.

Daya tarik semangka bagi petani terletak pada nilai ekonominya yang tinggi. Beberapa kelebihan usahatani semangka diantaranya adalah berumur relatif singkat hanya sekitar 70 – 80 hari. Kelayakan aspek sosial pengembangan budidaya semangka mempunyai peran ganda dalam hal penyerapan dan perluasan tenaga kerja serta kecukupan gizi penduduk. Tiap hektar lahan usahatani semangka minimal menyerap 10 orang tenaga kerja per musim. Disamping itu buah semangka mempunyai karisma tersendiri dan digemari oleh masyarakat luas.

Pupuk telah senantiasa berada di lini depan dalam usaha untuk peningkatan produksi tanaman, lebih banyak dari jenis input yang lain, secara luas bertanggung jawab bagi keberhasilan yang akan dicapai. Hanya tanah-tanah subur yang merupakan tanah produktif. Apabila hara tanaman kahat, produktivitas tanah dan hasil tanaman rendah. Jadi dengan memasok hara tanaman yang esensial bagi produksi tanaman yang tinggi, pupuk telah menjadi vital untuk tanaman (Engelstad, 1997).

Pemupukan tanaman dapat dilakukan melalui tanah maupun daun. Pemupukan melalui daun terkadang dipandang lebih efektif dibandingkan pemupukan melalui tanah (Sutejo dan Kartasapoetra, 1992). Dewasa ini banyak diperdagangkan jenis pupuk daun, dengan kandungan hara makro dan mikronya berbeda-beda baik dalam bentuk cair maupun padat. Respon tanaman terhadap pemupukan sangat dipengaruhi unsur hara makro dan mikro

[1] *Dosen Universitas Jabal Ghafur, Sigli*

yang terkandung dalam pupuk tersebut. Selain itu juga konsentrasi pemberian memberi arti penting dalam penggunaan pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Salah satu diantaranya adalah pupuk daun.

Penggunaan pupuk daun akan mengurangi penggunaan pupuk makro 50% dan akan meningkatkan haasil panen 40% hingga 100%, dimana untuk tanaman pindah tanam penyemprotan pertama 15 hari setelah pindah tanam dan penyemprotan selanjutanya setiap 15 hari sebanyak 3 kali, untuk tanaman benih langsung penyemprotan pertama dilakukan 34 hari setelah tanaman tumbuh dan penyemprotan selanjutnya setiap 15 hari (Anonimus, 2006).

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk daun terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman semangka.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok non faktorial, dengan satu faktor perlakuan yaitu konsentrasi pupuk daun (A), yang terdiri atas 6 taraf perlakuan, yaitu : A_0 = kontrol (tanpa ACI), A_1 = 0.5 Super ACI/l air, A_2 = 1.0 Super ACI/l air, A_3 = 1.5 Super ACI/l air, A_4 = 2.0 Super ACI/l air dan A_5 = 2.5 Super ACI/l air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk daun nyata meningkatkan panjang turus pada umur 46 dan 61 hst, nyata meningkatkan diameter buah, bobot buah per buah dan bobot buah per petak, tetapi tidak nyata mempercepat umur berbunga tanaman semangka. Peningkatan panjang turus, diameter buah, bobot per buah dan bobot buah per petak akibat pemberian konsentrasi pupuk daun adalah parabola terhadap parameter panjang daun, diameter buah, bobot buah per tanaman dan bobot buah per petak. Konsentrasi pupuk daun sebesar 2 cc/l air lebih baik memberikan produksi yakni diamter buah sebesar 15.19 cm, bobot buah sebesar 3.54 kg dan bobot buah per petak sebesar 31.85 kg.

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.1. Panjang Turus

Pengaruh konsentrasi pupuk daun terhadap panjang turus tanaman semangka dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengaruh Konsentrasi Pupuk daun terhadap Panjang Turus Tanaman Semangka

Perlakuan	Panjang Turus (cm)		
	31 hst	46 hst	61 hst
	…….. cm ……..		
A_0	114.95	168.95 a	189.40 a
A_1	152.75	368.00 bc	383.95 b
A_2	128.15	445.45 c	460.10 b
A_3	135.65	378.35 bc	396.50 b
A_4	145.70	381.40 bc	401.75 b
A_5	149.85	355.85 b	383.85 b
$BNJ_{0.05}$	-	83.39	85.62

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom yang sama berarti berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Dari Tabel 2 terlihat, bahwa pada umur 31 hst, perlakuan pupuk daun berpengaruh tidak nyata terhadap

panjang turus, karena aplikasi pupuk ACI dilakukan pada umur 30 hst. Pada umur 46 hst, turus terpanjang terdapat pada perlakuan A_2 berbeda nyata dengan A_5 dan A_0, tetapi berbeda tidak nyata dengan A_1, A_3 dan A_4. Pada umur 61 hst, turus terpanjang terdapat pada perlakuan A_2 berbeda nyata dengan A_0, tetapi berbeda tidak nyata dengan A_1, A_3, A_4 dan A_5.

Hubungan antara konsentrasi pupuk daun dengan panjang turus tanaman semangka disajikan pada Gambar 1.

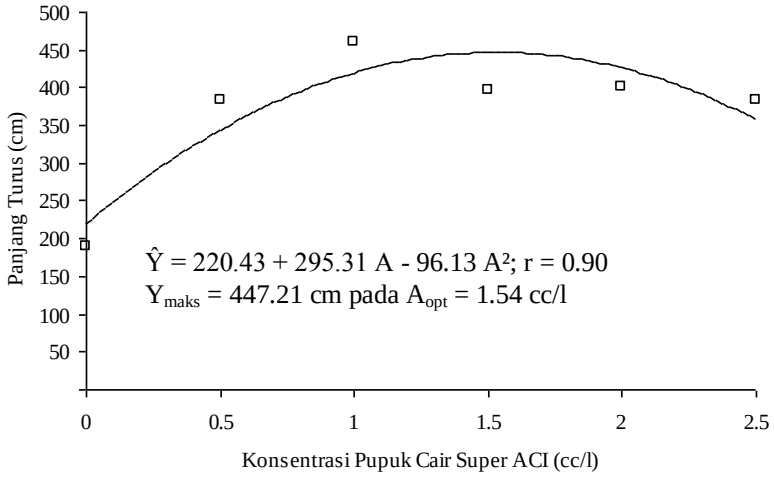

Gambar 1. Pengaruh Konsentrasi Pupuk daun terhadap Panjang Turus Tanaman Semangka Umur 58 Hari Setelah Tanam

Dari hasil uji regresi dapat diketahui bahwa dengan pemberian konsentrasi pupuk daun sebesar 1.54 cc/l air memberikan pertumbuhan panjang turus maksimum sebesar 447.21 cm. Pemberian pupuk cair dengan konsentrasi di atas 1.54 cc/l air tidak dapat lagi meningkatkan pertumbuhan tanaman, bahkan sebaliknya dapat menekan pertumbuhan tanaman semangka.

Pemberian pupuk daun secara terbatas dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Hal ini disebabkan oleh komposisi pupuk organik cair tersebut mengandung berbagai unsur hara makro dan mikro yang lengkap, sehingga dengan pemberian pupuk tersebut dapat menyuplai kebutuhan unsur hara selama pertumbuhan (Anonimus, 2006).

2.2. Umur Berbunga

Pengaruh konsentrasi pupuk daun terhadap umur berbunga tanaman semangka dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengaruh Konsentrasi Pupuk daun terhadap Umur Berbunga Tanaman Semangka

Perlakuan	Umur Berbunga
	…… hari……..
A_0	31.30
A_1	30.00
A_2	30.90
A_3	30.40
A_4	30.45
A_5	30.00

Dari Tabel 3 terlihat, bahwa pemberian pupuk daun berpengaruh tidak nyata terhadap umur berbunga tanaman semangka. Hal ini disebabkan umur berbunga suatu tanaman lebih besar dipengaruhi oleh faktor genetis tanaman, walaupun sebagian dipengaruhi oleh pupuk yang diberikan serta lingkungan.

2.3. Diameter Buah

Pengaruh konsentrasi pupuk daun terhadap diameter buah tanaman semangka dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengaruh Konsentrasi Pupuk daun terhadap Diameter Buah Tanaman Semangka

Perlakuan	Diameter Buah Tanaman
	…… cm ……..
A_0	13.50 a
A_1	14.63 ab
A_2	15.13 b
A_3	15.19 b
A_4	14.49 ab
A_5	14.57 ab
$BNJ_{0.05}$	1.13

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom yang sama berarti berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Dari Tabel 3 terlihat, bahwa diameter buah terbesar terdapat pada perlakuan A_3 berbeda nyata dengan A_0, tetapi berbeda tidak nyata dengan A_1, A_2, A_4 dan A_5. Diameter buah antar perlakuan A_0 dengan A_1, A_4 dan A_5, antara A_1 dengan A_4, A_5 dan antara A_4 dengan A_5 berbeda tidak nyata.

Hubungan antara konsentrasi pupuk daun dengan diameter buah tanaman semangka disajikan pada Gambar 2.

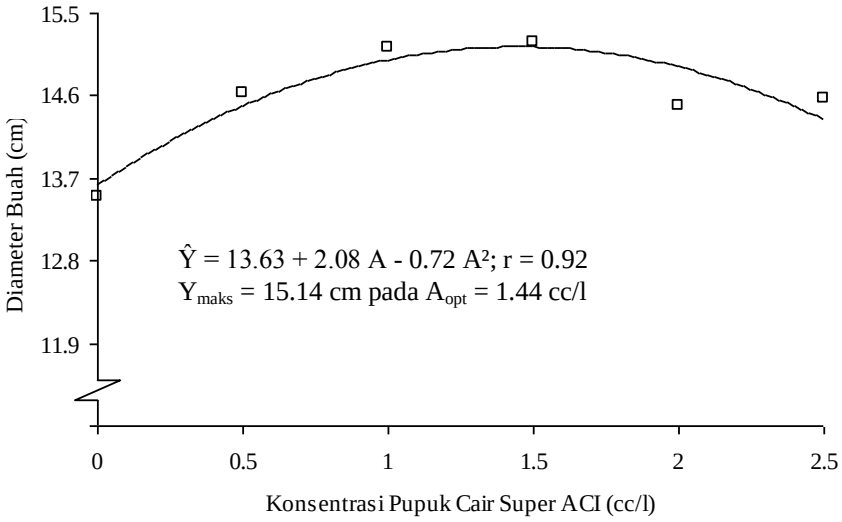

Gambar 2. Pengaruh Konsentrasi Pupuk daun terhadap Diameter Buah Tanaman Semangka

Dari hasil uji regresi dapat diketahui bahwa dengan pemberian konsentrasi pupuk daun sebesar 1.44 cc/l air memberikan pertumbuhan diameter buah tanaman maksimum sebesar 15.14 cm. Pemberian pupuk cair dengan konsentrasi di atas 1.64 cc/l air tidak dapat lagi meningkatkan bobot buah per tanaman, bahkan sebaliknya

dapat memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan besar buah.

Besarnya diameter buah dipengaruhi oleh besarnya fotosintesis yang terjadi selama pertumbuhan. Fotosintesis berlangsung dengan baik dengan tersedianya unsur hara (Sutejo, 1987). Pemberian pupuk daun dapat memenuhi kebutuhan unsur hara selama pertumbuhan, karena mengandung berbagai unsur hara yang dapat digunakan tanaman selama proses pertumbuhannya.

2.3. Bobot per Buah

Pengaruh konsentrasi pupuk daun terhadap bobot buah per buah semangka dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengaruh Konsentrasi Pupuk daun terhadap Bobot per Buah

Perlakuan	Bobot per Buah
	…… kg ……..
A_0	2.69 a
A_1	3.25 ab
A_2	3.42 ab
A_3	3.54 b
A_4	3.31 ab
A_5	3.41 ab
$BNJ_{0.05}$	0.77

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom yang sama berarti berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Dari Tabel 5 terlihat, bahwa bobot buah per buah terberat terdapat pada perlakuan A_3 berbeda nyata dengan A_0, tetapi berbeda tidak nyata dengan A_1, A_2, A_4 dan A_5. Bobot buah per buah antar perlakuan A_0, A_1, A_2, A_4 dan A_5 saling berbeda tidak nyata.

Hubungan antara konsentrasi pupuk daun dengan bobot buah per buah semangka disajikan pada Gambar 3.

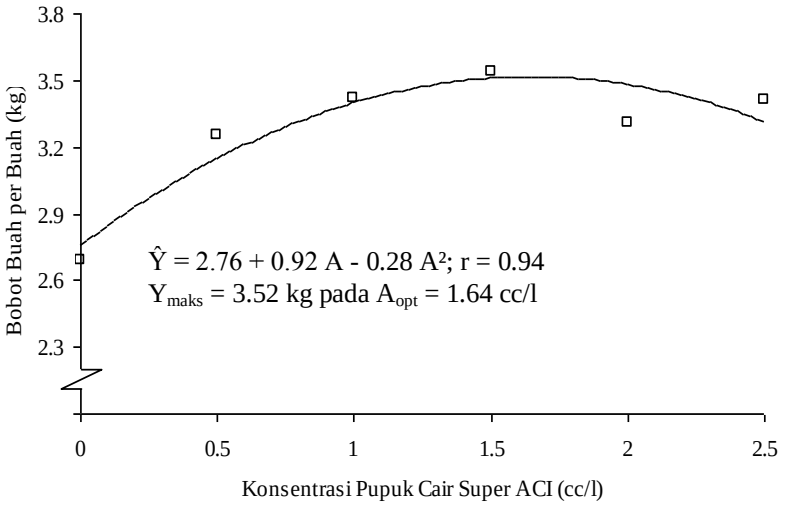

Gambar 3. Pengaruh Konsentrasi Pupuk daun terhadap Bobot Buah per Tanaman Semangka

Dari hasil uji regresi dapat diketahui bahwa dengan pemberian konsentrasi pupuk daun sebesar 1.64 cc/l

air memberikan pertumbuhan bobot buah per buah maksimum sebesar 3.52 kg. Pemberian pupuk cair dengan konsentrasi di atas 1.64 cc/l air tidak dapat lagi meningkatkan bobot buah per buah, bahkan sebaliknya dapat memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan buah semangka.

Pembentukan buah pada tanaman semangka sangat dipengaruhi oleh tersedianya unsur hara selama pertumbuhan. Dalam pembentukan buah dibutuhkan unsur hara makro dan mikro, sehingga buah yang diperoleh juga lebih baik (Novizan, 2002). Dengan penambahan pupuk daun akan meningkatkan kebutuhan unsur hara oleh tanaman, sehingga hasil produksi buah yang dihasilkan juga menjadi lebih baik.

2.4. Bobot Buah per Petak

Pengaruh konsentrasi pupuk daun terhadap bobot buah per petak tanaman semangka dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengaruh Konsentrasi Pupuk daun terhadap Bobot Buah per Petak Tanaman Semangka

Perlakuan	Bobot Buah per Petak
	…… kg ……..
A_0	24.21 a
A_1	29.25 b
A_2	30.77 ab
A_3	31.85 b
A_4	29.75 ab
A_5	30.72 b
$BNJ_{0.05}$	6.93

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom yang sama berarti berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Dari Tabel 6 terlihat, bahwa bobot buah per petak terberat terdapat pada perlakuan A_3 berbeda nyata dengan A_0, tetapi berbeda tidak nyata dengan A_1, A_2, A_4 dan A_5. Hubungan antara konsentrasi pupuk daun dengan bobot buah per petak semangka disajikan pada Gambar 4.

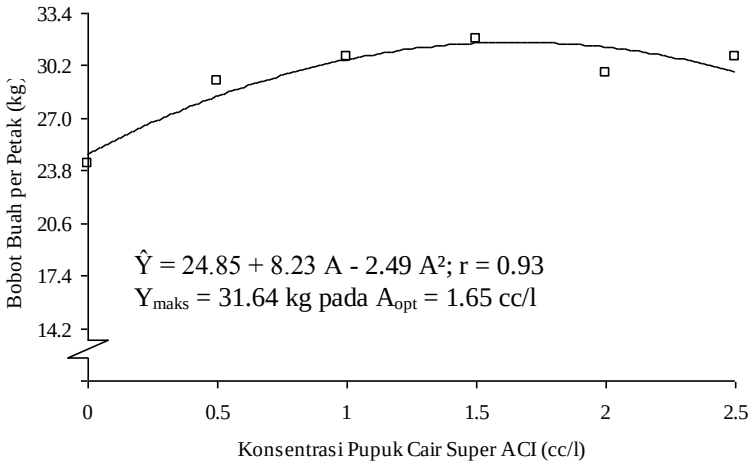

Gambar 4. Pengaruh Konsentrasi Pupuk daun terhadap Bobot Buah per Petak Tanaman Semangka

Dari hasil uji regresi dapat diketahui bahwa dengan pemberian konsentrasi pupuk daun sebesar 1.65 cc/l

air memberikan pertumbuhan panjang turus maksimum sebesar 31.64 kg. Pemberian pupuk cair dengan konsentrasi di atas 1.65 cc/l air tidak dapat lagi meningkatkan bobot buah per petak, bahkan sebaliknya dapat memberikan efek negatif terhadap pembentukan buah.

Peningkatan bobot buah per petak sejalan dengan peningkatan bobot buah per tanaman. Pemberian pupuk daun akan memberikan ketersediaan unsur hara selama pertumbuhan tanaman karena pupuk tersebut mengandung unsur hara lengkap (makro dan mikro), sehingga tanaman yang terdapat dalam satu areal pertanaman pertumbuhannya menjadi lebih seragam. Dengan demikian akan mempengaruhi produksi buah dalam satu petak tanam.

Menurut Lubis dkk., (1986) bahwa ketersediaan unsur hara yang tidak seimbang dan tidak lengkap, apalagi hanya nitrogen saja menyebabkan hilangnya unsur hara lain dalam tanah. Efek ketidakseimbangan hara tersebut terlihat dengan pertumbuhan tanaman yang kurang baik. Untuk menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan yang baik maka dapat dilakukan pemupukan dengan mengikutsertakan unsur mikro dalam pemupukan adalah suatu upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan unsur hara.

Menurut Suhaidi (2000) bahwa pemberian pupuk cair terhadap tanaman dapat memacu pertumbuhan tanaman, mempercepat intensitas kerja pupuk dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan mempermudah aplikasi pupuk. Dengan kebutuhan unsur hara yang semakin terpenuhi akan semakin meningkatkan pertumbuhan tanaman secara merata pada setiap petak tanam. Pertumbuhan tanaman yang relatif seragam akan semakin meningkatkan bobot buah per petak.

3. Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

1. Pemberian pupuk daun nyata meningkatkan panjang turus pada umur 46 dan 61 hst, nyata meningkatkan diameter buah, bobot buah per buah dan bobot buah per petak, tetapi tidak nyata mempercepat umur berbunga tanaman semangka. Pemberian pupuk super ACI 2 cc/l air menghasilkan turus terpanjang sebesar 460.10 cm, diameter buah terbesar sebesar 15.19 cm, bobot per buah terberat sebesar 3.54 kg dan bobot buah per plot terberat sebesar 31.85 kg
2. Peningkatan panjang turus (401.75 cm), diameter buah (15.19 cm), bobot per buah (3.54 kg) dan bobot buah per petak (31.85 kg) akibat pemberian konsentrasi pupuk daun adalah berbentuk persamaan kuadratik.
3. Konsentrasi pupuk daun sebesar 1.55 cc/l air lebih baik memberikan pertumbuhan dan produksi tanaman semangka.

3.2. Saran

1. Untuk memperoleh pertumbuhan tanaman semangka yang baik disarankan menggunakan pupuk daun dengan konsentrasi 1.5 cc/l air.
2. Pertanaman semangka sebaiknya dilakukan di lahan kering untuk menghindari resiko kerusakan buah akibat pembusukan buah.

Daftar Pustaka

Anonimus, 2006. Pupuk Cair Anugraah Cemerlang Indonesia. Panakkukang Mas, Makassar.

Engelstad, O. P., 1997. Teknologi dan Penggunaan Pupuk. Edisi Ketiga. Terjemahan. Oleh Goenadi, D. H. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Kalie, R. 1992. Bertanam Semangka. PS Penebar Swadaya, Jakarta.

Lubis, A. M., A. G. Amrah, M. A. Pulungan, M. Y. Nyakpa, dan N. Hakim. 1986. Pupuk dan Pemupukan. Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Isalam Sumatera Utara, Medan.

Novizan. 2002. Petunjuk Pemupukan yang Efektif. AgroMedia Pustaka. Jakarta

Suhaidi, T dan Lubis, L.M., 2000. Jurnal Ilmiah Pertanian Kultura. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Sutejo, M.M. 1987. Pupuk dan Cara Pemupukan. PT. Bina Aksara. Jakarta.

Sutejo dan Kartasapoetra, 1992. Pupuk dan Cara Pemupukan. PT. Bina Aksara, Jakarta.

BENTUK DAN SOLUSI MENGATASI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PENGAWAS SEKOLAH DI KECAMATAN ONOLALU

Asadi Luaha, S.Pd[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pengawas sekolah di Kecamatan Onolalu. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan lapangan dan tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bntuk-bentuk permasalahan yang dihadapi hadapi oleh pengawas Sekolah antara lain: kurangnya sarana dan prasarana pengawas, kesejahteraan pengawas yang masih minim, kurangnya komunikasi antar pihak yang disupervisi dan mensupervisi, belum menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah, masih adanya guru yang tidak mau disupervisi, adanya guru yang merasa lebih senior dari pengawas, adanya guru yang merasa lebih pintar sehingga ketika disupervisi selalu berusaha mempertahankan idenya dan merasa apa yang dilakukannya lebih benar dari pada apa yang diarahkan oleh pengawas. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di dalam lingkungan kerja kepengawasan,pengawas berupaya menjadikan kepala sekolah dan guru sebagai mitra kerja,meningkatkan pengawas sesuai dengan kebutuhan guru dan pentingnya peningkatan kualitas pengawas tentang skill ke pengawasan, serta tetap memberikan pemahaman betapa pentingnya supervisi pendidikan, baik dari segi supervisi akademik maupun supervisi manajerialnya.

Kata kunci : *bentuk, solusi, permasalahan* dan *pengawas sekolah*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan tantangan kehidupan global, pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan salah satu penentu mutu Sumber Daya Manusia. Dewasa ini keunggulan suatu bangsa tidak lagi ditandai dengan melimpahnya Sumber daya alam, melainkan pada keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM). Mutu pendidikan sering diindikasikan dengan kondisi yang baik, memenuhi syarat, dan segala komponen yang harus terdapat dalam pendidikan, komponen-komponen tersebut adalah masukan, proses, keluaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta pembiayaan (Suhardan, 2010 : 41).

Mutu pendidikan tercapai apabila masukan, proses, keluaran, guru, sarana dan prasarana serta pembiayaan terpenuhi sebagai syaratnya. Namun dari beberapa komponen tersebut yang lebih banyak berperan adalah tenaga kependidikan yang bermutu yaitu yang mampu menjawab tantangan-tantangan dengan cepat dan tanggung jawab. Tenaga kependidikan pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut tenaga kependidikan untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya. Pendidikan yang bermutu sangat membutuhkan tenaga kependidikan yang profesional.

Tenaga kependidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk sikap spritual, sikaf sosial, pengetahuan, dan keterampilan, peserta didik. Oleh karena itu tenaga kependidikan yang profesional akan melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga menghasilkan tamatan yang lebih bermutu. Menjadi tenaga kependidikan yang profesional tidak akan terwujud begitu saja tanpa adanya upaya untuk meningkatkannya, adapun salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan pengembangan profesionalisme. Hal ini dibutuhkan dukungan dari pihak yang mempunyai peran penting dalam hal ini adalah kepala sekolah yang merupakan

[1] *Jabatan Pengawas Sekolah di SDN No 078440, Hilionaha, Kecamatan Onolalu*

pimpinan pendidikan yang sangat penting karena kepala sekolah berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah.

Kegiatan supervisi pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam memberikan pembinaan kepada guru. Hal tersebut karena proses pembelajaran yang dilaksanakan guru merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena kegiatan supervisi dipandang perlu untuk memperbaiki kinerja guru dalam proses pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar peserta didik dan mutu sekolah. Piet A. suhertian menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada *stakeholders* pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran (Suhertin, 2000 : 20).

Supervisi adalah pengawasan profesional dalam bidang akademik dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tentang bidang kerjanya, memahami tentang pembelajaran lebih mendalam dari sekadar pengawas biasa. Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan. Tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah selama ini diatur dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Menteri Pendidikan Nasional.

Ketika supervisi dihadapkan pada kinerja dan pengawasan mutu pendidikan oleh pengawas satuan pendidikan, tentu memiliki misi yang berbeda dengan supervisi oleh kepala sekolah, dalam hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada kepala sekolah untuk mengembangkan mutu kelembagaan pendidikan, memfasilitasi kepala sekolah agar dapat melakukan pengelolaan kelembagaan secara efektif dan efisien.

Mengacu pada pemikiran diatas, maka bantuan berupa pengawasan profesional oleh pengawas satuan tenaga kependidikan tentu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan kepala sekolah dalam menetralisir, mengidentifikasi serta menemukan peluang-peluang yang dapat diciptakan guna meningkatkan mutu kelembagaan secara menyeluruh.

Pengawas sekolah adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pengajaran. Inilah tujuan ideal dari supervisi pengajaran. Apabila konsep-konsep ideal tersebut dilaksanakan, maka dapat diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia akan meningkat secara signifikan.Idealitas supervisi pengajaran tersebut, prakteknya di lapangan selama ini masih jauh dari harapan. Berbagai kendala baik yang disebabkan oleh aspek struktur birokrasi yang rancu, maupun kultur kerja dan interaksi supervisor dengan guru yang kurang mendukung, telah mendistorsi nilai ideal supervisi pengajaran di sekolah-sekolah. Apa yang selama ini dilaksanakan oleh para Pengawas Pendidikan, belum bergeser dari nama jabatan itu sendiri, yaitu sekedar mengawas.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pengawas sekolah di Kecamatan Onolalu.

1.3. Metode Peneleitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan lapangan dan tinjauan literatur. Peneliti melakukan tinjauan lapangan untuk mengetahui bentuk-bentuk permasalahan dan selanjutnya dilakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut berdasarkan teori-teori yang ada.

2. Uraian Teoritis

2.1. Konsep Dasar Pengawas Sekolah

Pengawasan pada umumnya diartikan dengan proses pengamatan dan pencermatan kritis dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kemudian secara detail jika dilihat dari fungsi administrasi dan manajemen, pengawasan dikategorikan pengawasan administrasi dan pengawasan manajerial. Pengawasan administrasi adalah pengawasan terhadap seluruh kegiatan pada unit organisasi (sekolah) di semua aspek tugas dan pekerjaan. Sedangkan pengawasan manajerial bersifat lebih sempit dan lebih khusus tergantung pada manajer atau pimpinan aspek mana pengawasan itu dilakukan. Apabila pengawas hendak melakukan supervisi, kepala sekolah meminta untuk melaksanakan supervisi klinis terhadap guru bidang studi tertentu yang dianggap kurang efektif dalam menggelar tugas kependidikan dan pengajaran.

Definisi lain tentang pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar tugas-tugas terselenggara sesuai rencana yang ditetapkan atau dengan hasil yang dikehendaki. Defenisi ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mengartikan pengawasan adalah suatu proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan organisasi sesuai dengan rencana, kebijakan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996 menyatakan bahwa pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.

Menurut PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) juga menegaskan kriteria pengawas satuan pendidikan adalah berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya delapan tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya empat tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi, memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan, serta telah lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

2.2. Bentuk-bentuk Permasalahan yang Dihadapi oleh Pengawas Sekolah

Program yang baik tidak luput dari kendala atau rintangan dalam aplikasinya. Dalam pelaksanaan supervisi atau dalam kepengawasan, ternyata banyak kendala-kendala yang dijumpai. Berukut ini ada beberapa kendala antara lain: (Asmani, 2012 : 167).

1. Kurangnya Gairah Keilmuan Guru.

Tujuan utama pengawas adalah peningkatan kualitas guru. Namun, guru menempa diri dengan berbagai kegiatan ilmiah tidak serta merta meningkat kualitasnya. Sebab ada yang mengikutinya karena kewajiban organisasi, terkesan terpaksa, sekedar mengikuti perintah, namun tidak mampu menyerap filosofi yang terkandung didalamnya. Sehingga selesai acara, selesai sudah semuanya, tidak ada efek yang ditimbulkan.

Kurangnya gairah keilmuan guru ini menjadi kendala utama pengembangan kualitas guru. Disinilah pekerjaan berat bagi pengawas karena bagaimana mengubah mental dan kesadaran guru yang sudah terbentuk lama atau bawaan lahir. Namun disinilah tantangan bagi pengawas sekolah. Keteladanan menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan imajinasi yang secara bertahap akan memancarkan aura keilmuan dalam membangkitkan semangat intelektualitas guru.

2. Pemimpin yang Kurang Berwibawa.

Kewibawaan sangat penting untuk menggerakkan perubahan. Kewibawaan seseorang mampu menggerakkan orang lain secara alaami dengan kekuatan spiritualnya. Kewibawaan bisa muncul dengan kejujuran, konssisrtensi (*istiqamah*) dalam menerapkan aturan, tidak pandang bulu, dan selalu mempertanggungjawabkan sikap dan perbuatan yang dilakukan.

3. Lemahnya Kreativitas.

Pengawas sekolah membutuhkan kreativitas tinggi untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah-sekolah atau dilapangan. Pengawas harus jeli membaca masalah, menganalisis, mengurai faktor penyebab dan hal-hal yang terkait dengannya, menyuguhkan secara menyeluruh problem atau masalah yang dihadapi, dan langkah yang harus diambil sebagai solusi yang efektif. Pengawas sekolah harus memmpunyai data yang akurat dan obyektif karena pengawas tidak sehari-hari mengikuti proses belajar dan mengajar di sekolah binaannya.

Belum banyak supervisor yang memiliki kreativitas tinggi dalam memecahkan masalah. Disinalah pentingnya supervisor meningkatkan kompetensi secara maksimal. Sehingga, ia mampu mengembangkan gaya berfikir yang kreatif, kritis, inovatif, dan produtif.

4. Mengedepankan Formalitas Mengabaikan Esensi.

Masih banyak pengawas yang melakukan pekerjaannya secara tidak serius, asal-asalan, dan hanya mementingkan formalitas, ia hanya datang, melihat-melihat, mengisi buku tamu, bertanya sebentar, memnta tanda tangan, kemudian pulang. Banyak juga kepala sekolah yang hAnya mempertahankan jabatan, tanpa melakukan pemberdayaan dan pengembangan pribadi dan lembaga secara terprogram. Kesibukan dijadikan alasan utama, padahal jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara serius dan penuh pengabdian.

5. Kurangnya Fasilitas.

Fasilitas sekolah merupakan sarana vital bagi realisasi tujuan yang direncanakan. Dengan adanya fasilitas sangat membantu guru dalam mempecepat pemahaman dan melahirkan skill berharga bagi anak-anak didik. Dengan sarana dan prasara bisa dilakukan sewaqktu-waktu secara kreatif dan penuh tanggung jawab. Guru bisa berperan sebagai dinamisator, fasilitator, dan motivator dalam melatih anak didik untuk mengeluarkan kemampuan terbaik secara terus menerus.

Menciptakan lingkungan kerja yang Kondusif di dalam lingkungan kerja kepengawasan. Membantu mengembangkan kerjasama dan kemitraan kerja terhadap semua unsur yang terkait dalam dunia akademik. Membimbing dan mengarahkan para guru agar kualitas mengajarnya terus meningkat. Menjalin kemitraan dan komitmen yang kuat antara guru, kepala madrasah dan pengawas dalam melaksanakan suvervisi. Memberikan sikap keteladanan dan terus menerus melakukan motivasi kepada guru-guru secara menyeluruh. Langkah-langkah tersebut menurut pengamatan promovendus, berbanding lurus dengan peningkatan provesionalisme guru.

Ada faktor-faktor yang menjadi kendala pengawas untuk meningkatkan profesionalisme guru . Kendala-kendala itu, antara lain : Masih adanya pengawas yang belum memiliki kesadaran dan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Masih adanya pengawas yang tidak memiliki kemampuan profesional di bidang kepengawasan (suvervisi). Masih ada pengawas yang diangkat sekendar memperpanjang usia pensiun, sehingga kinerja rendah. Kurangnya sarana-dan prasarana pengawas. Kesejahteraan pengawas yang masih minim sehingga mempengaruhi kinerja pengawasan. Belum adanya motivasi yang dijunjung tinggi yakni keikhlasan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain.

Dari sisi guru, masih adanya guru yang tidak mau disupervisi karena SDM sebagai guru yang tidak memadai. Adanya guru yang merasa lebih senior dari pengawas sehingga bersikap acuh-tak acuk ketika disupervisi. Adanya guru yang merasa lebih pintar sehingga ketika disupervisi selalu berusaha mempertahankan idenya dan merasa apa yang dilakukannya lebih benar dari pada apa yang diarahkan oleh pengawas. Masih banyaknya guru tidak tetap yang kesejahteraannya belum terpikirkan sehingga berpengaruh pada kinerja pengajaran. Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan. Kurangnya komunikasi antar pihak yang disupervisi dan mensupervisi.

Ketidaklayakan pengawas sekolah saat ini harus diakui, dan tidak harus menyalahkan mereka, karena keterpurukan ini lebih disebabkan kesalahan sistem dan/atau implementasinya yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti rekrutmen pengawas sekolah bermasalah karena tidak sesuai standar yang telah ditetapkan, pengawas sekolah belum diposisikan secara strategis dalam sistem pendidikan.

Segala permasalahan pembelajaran yang dihadapinya, dan mereka sangat paham apa yang harus dilakukan oleh guru, sangat berbeda dengan para oknum pengawas sekolah sekarang ini yang datang ke sekolah menemui kepala sekolah, mengisi buku tamu, dilanjutkan ngobrol membicarakan banyak hal yang tidak berkaitan langsung dengan pembelajaran, setelah puas ngerumpi meminta izin pulang.

Ke depan, pengawas sekolah/madrasah harus direkrut secara benar menurut standar yang telah ditetapkan dan terhindar dari intervensi politik praktis atau politik etis/balas budi sebagaimana pernah dilakukan oleh para penjajah masa dulu, kemudian para pengawas sekolah/madrasah yang mengemban jabatan pengawas haruslah diposisikan dan difungsikan secara strategis dan efektif dalam sebuah sistem pendidikan yang selama ini terkesan sebagai jabatan penghormatan, jabatan prestisus/bergensi menurut guru dan kepala sekolah, tetapi hanya diposisikan dan difungsikan sebagai pelengkap penderita, buktinya tempat mereka bekerja saja dalam kondisi tidak layak ditempati oleh seorang supervisor yang mesti dihormati oleh semua stakeholder pendidikan. Fakta lain, menyebutkan adanya perbedaan perlakuan antara pengawas dan penilik PAUD, seperti: insentif, tunjangan, perlindungan dan belum adanya pemilahan tugas pokok pengawas antara TK/SD.

Kurang efektifnya memposisikan pengawas sekolah dalam sistem pendidikan ini menyebabkan jabatan pengawas sekolah kurang mendapat tantangan, kurang memotivasi mereka untuk membelajarkan dirinya, dan mengakibatkan keterasingan pengawas sekolah dalam profesinya. Jika tidak diupayakan penguatan jabatan pengawas sekolah dalam sistem pendidikan, maka penulis usulkan lebih baik jabatan pengawas sekolah tersebut ditiadakan saja, dan 3 (tiga) fungsi pengawas sekolah, yakni pemantauan, penilaian dan pembinaan diserahkan kepada pihak lain, misalnya diserahkan kepada kepala sekolah.

3. Pembahasan

Dari hasil penelitian dapat diajukan solusi dari kendala yang dihadapi oleh pengawas sekolah adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di dalam lingkungan kerja kepengawasan. Membantu mengembangkan kerjasama dan kemitraan kerja terhadap semua unsur yang terkait dalam dunia akademik. Membimbing dan mengarahkan para guru agar kualitas mengajarnya terus meningkat. Menjalin kemitraan dan komitmen yang kuat antara guru, kepala madrasah dan pengawas dalam melaksanakan supervisi. Memberikan sikap keteladanan dan terus menerus melakukan motivasi kepada guru-guru secara menyeluruh.
2. Sebaiknya pengawas menjadikan kepala sekolah dan guru sebagai mitra kerja, supaya guru tidak menilai supervisor sebagai inspeksi. Solusi lain, pengawas jangan pernah berhenti memberikan bimbingan, nasehat dan dipecahkan bersama melalui musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS).
3. Pelaksanaan tugas pengawas sekolah harus meningkatkan pengawas sesuai dengan kebutuhan guru dan pentingnya peningkatan kualitas pengawas tentang skill ke pengawasan, serta tetap memberikan pemahaman betapa pentingnya supervisi pendidikan, baik dari segi supervisi akademik maupun supervisi manajerialnya.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan supervisi pendidikan adalah:

1. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan yang sebenarnya;
2. Membantu guru melihat lebih jelas persoalan dan kebutuhan peserta didik pemula dan membantu mereka sedapat mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan itu;
3. Membantu guru mengembangkan kecakapan belajar lebih besar;
4. Membantu guru melihat kesukaran peserta didik belajar dan membantu pelajaran efektif;
5. Membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam suatu tim efektif, bekerjasama secara intelligent, dan saling menghargai untuk mencapai tujuan yang sama;

Dengan adanya uraian di atas bahwa sebagai pelaku pendidikan harus mengetahui betapa pentingnya supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah.

Hasil pelaksanaan tugas pengawas sekolah adalah setelah diadakan observasi, kunjungan kelas dan supervisi oleh pengawas, secara jelas diharapkan adanya perubahan sikap terhadap guru akan mengerti bagaimana mengajar dan menggunakan metode yang baik. Hendaknya pengawas menerapkan peranannya sebagai motivator, artinya sebagai pengawas hendaknya:

1. Membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik;
2. Mendorong guru mempraktekkan gagasan-gagasan baru yang dianggap baik bagi penyempurnaan proses belajar mengajar;

3. Bekerjasama dengan guru untuk mewujudkan perubahan yang dikehendaki;
4. Merangsang lahirnya ide baru; dan
5. Menyediakan rangsangan yang memungkinkan usaha-usaha pembaharuan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Uraian di atas cukup memberikan masukan kepada setiap pengawas bahwa selaku pengawas harus mengetahui tugas pokoknya demi untuk peningkatan mutu pendidikan. Sebagaimana tuntutan sekarang bahwa sekolah dan madrasah harus berkompetisi demi kemajuan pendidikan di Indonesia, sehingga pemerintah tidak membedakan sekolah negeri dengan sekolah swasta.

Sekolah harus memperlihatkan kemajuan baik dari kualitas maupun dari kualitas dari sarana dan prasarananya harus bermutu. Dari uraian tersebut bahwa sebagai pelaku pendidikan harus mengetahui betapa pentingnya menempatkan guru yang masih aktif dan produktif, demi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dipahami bahwa pelaksanaan kepengawasan pendidikan juga merupakan suatu produksi untuk menghasilkan mutu yang diawasinya untuk mencari cara bagaimana melakukan penilaian dan pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan pada sekolahdan madrasah secara menyeluruh baik teknis pendidikan maupun administrasi, kecuali terhadap rumpun mata pelajaran umum pengawasannya dilakukan oleh pengawas sekolah dasar yang diangkat oleh Dinas Pendidikan.

Walaupun perangkat pembelajaran sudah dimiliki namun secara kontiniu guru belum menerapkan secara maksimal, tentunya sangat berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada hal melihat tanggung jawab selaku pengawas sudah dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Persoalan penilaian terhadap seorang pengawas pendidikan seyogyanya tidak ditekan pada sejauhmana ia telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan uraian jabatan, melainkan sejauhmana ia telah berhasil mewujudkan misi kepengawasannya.

Oleh sebab itu, titik berat kriteria penilaian atas kinerja seorang pengawas pendidikan haruslah pada perubahan yang terjadi sesuai dengan misi kepengawasannya. Ini berarti bahwa meskipun seorang pengawas akademik telah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai prosedur administrasi yang ada. Namun jika tidak ada bukti-bukti mengenai peningkatan keberhasilan pengajaran, maka kinerjanya harus dinilai rendah. Salah satu acuan penting dalam penilaian ini adalah tidaknya pengajaran yang efektif dan terwujud atau isi kesepakatannya dibuat bersama oleh guru dan kepala sekolah mengenai target output pengajaran.

Lembaga pendidikan apapun bentuk dan sifatnya berusaha akan memperbaiki input, proses, maupun outputnya. Dengan demikian, lembaga pendidikan harus mempersiapkan hasil lulusannya yang berkualitas, bermoral, berakhlak dan berprestasi yang membawa harum lembaga pendidikannya.

Dengan demikian, bahwa tujuan pengawasan pendidikan (supervisi pendidikan) di sekolah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan.
2. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid-murid.
3. Membantu guru dalam menggunakan belajar sumber-sumber pengalaman belajar.
4. Membantu guru dalam menggunakan metode-metode danalat-alat pelajaran modern.
5. Membantu guru dalam hal memenuhi kebutuhan belajar murid-murid.
6. Membantu guru dalam hal menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri.

7. Membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas-tugas yang diperolehnya.
8. Membantu guru dalam membina reaksi mental dan moral pekerjaan
9. Membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber masyarakat dan seterusnya.
10. Membantu guru agar tenag\a tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Bahwa pengawasan adalah proses atau usaha yang sistematis dan terorganisir yang dilakukan untuk mencegah, mengarahkan, dan memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksnanaan kegiatan, sehingga terarah dan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika diterjemahkan terhadap organisasi pendidikan (sekolah) maka pengawas adalah seorang yang melaksanakan tugas supervisi di sekolah untuk melihat atau mengontrol program-program pendidikan dan pengajaran agar berjalan sesuai dengan mekanisme pelaksanaannya.
2. Bentuk-bentuk permasalahan yang dihadapi hadapi oleh pengawas Sekolah antara lain: Kurangnya sarana dan prasarana pengawas, kesejahteraan pengawas yang masih minim, kurangnya komunikasi antar pihak yang disupervisi dan mensupervisi, belum menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah, masih adanya guru yang tidak mau disupervisi, adanya guru yang merasa lebih senior dari pengawas, adanya guru yang merasa lebih pintar sehingga ketika disupervisi selalu berusaha mempertahankan idenya dan merasa apa yang dilakukannya lebih benar dari pada apa yang diarahkan oleh pengawas.
3. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di dalam lingkungan kerja kepengawasan,pengawas berupaya menjadikan kepala sekolah dan guru sebagai mitra kerja,meningkatkan pengawas sesuai dengan kebutuhan guru dan pentingnya peningkatan kualitas pengawas tentang *skill* ke pengawasan, serta tetap memberikan pemahaman betapa pentingnya supervisi pendidikan, baik dari segi supervisi akademik maupun supervisi manajerialnya.

Daftar Pustaka

Abd. Rahman Getteng. 2011. *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika.* Cet. III. Graha Guru. Yogyakarta.

Asmani ,Jamal Ma'ruf i. 2012. *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah*. Diva Press, Yogyakarta.

Fathurrohman, Pupuh dan Suryana, 2011. *Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pengajaran*. Refika Aditma, Bandung.

Sagala, Syaiful. 2011. *Konsep dan Makna Pembelajaran.* Alfabeta, Bandung.

-------. 2011. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan.* Alfabeta, Bandung.

Sanjaya Wina. 2008. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.* Kencana, Jakarta.

Suhardan, Dadang, 2010. *Supervisi Profesional*. Alfabeta, Bandung.

Syaodih Nana Sukmadinata. 2009. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan.* Remaja Rosdakarya, Bandung.

HUBUNGAN PENGAWASAN DAN SUPERVISI DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Otorus Harefa, S.Pd., SD[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengawasan dan supervisi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Metode penelitian menggunakan tinjauan kepustakaan (library research). Penelitian ini didasarkan pada pendapat-pendapat ahli dan hasil-hasil penelitian terdahulu tentang hubungan pengawasan dan supervisi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep dasar pengawasan meliputi pengertian, sasaran, bentuk, karakteristik, faktor dan yang lainnya. Sedangkan konsep dasar supervisi pendidikan itu terdiri atas pengertian, tujuan, prinsip, ruang lingkup, peranan sertajenis serta aspek lainnya, keduanya mempunyai aspek-aspek tertentu yang saling berkaitan dalam Pendidikan. Pengawasan merupakan fungsi administratif dalam fungsi administrator yang memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Ia meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Ia dimaksudkan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan, kemudian membetulkannya dan mencegah perulangannya. Ia mengenai semua orang, kegiatan, benda dan lain-lain.

Kata kunci : *pengawasan*, *supervisi* dan *mutu pendidikan*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Supervisi pendidikan atau yang lebih dikenal dengan pengawasan pendidikan memiliki konsep dasar yang saling berhubungan meskipun keduanya memiliki perbedaan tertentu. Dalam konsep dasar pengawasan dan supervisi pendidikan dijelaskan beberapa dasar-dasar tentang konsep supervisi pendidikan itu sendiri. Pendidikan berbeda dengan mengajar, pendidikan adalah suatu proses pendewasaan yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik dengan memberikan stimulus positif yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan pengajaran hanya mencakup kognitif saja artinya pengajaran adalah suatu proses pentransferan ilmu pengetahuan tanpa membentuk sikap dan kreatifitas peserta didik.

Oleh karena itu, pendidikan haruslah diawasi atau disupervisi oleh supervisor yang dapat disebut sebagai kepala sekolah dan pengawas-pengawas lain yang ada di departemen pendidikan. Pengawasan di sini adalah pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pendidik dan pegawai sekolah lainnya dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan yang baik dan bimbingan serta masukan tentang cara atau metode mendidik yang baik dan professional.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengawasan dan supervisi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan tinjauan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini didasarkan pada pendapat-pendapat ahli dan hasil-hasil penelitian terdahulu tentang hubungan pengawasan dan supervisi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

---

[1] *Pengawas Sekolah Binaan TK Pembina TK/SD Lotu*

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Pengawasan

Sebagaimana halnya perencanaan, pengorganisasian, dan pemberian motivasi, pengawasanpun merupakan salah satu fungsi administrasi dalam menejemen yang penting dalam keseluruhan profesi administrasi. Ketika berbicara tentang pengertian Pengawasan, maka sangat beragam pemahaman yang dikeluarkan oleh para ahli yang telah mempelajari dunia penadministrasian terutama tentang pengawasan yang merupakan bagiannya. Maka, tidak heran jika pengetian pengawasan itu beragam, maka dibawah ini adalah pengertian-pengertian tentang Pengawasan :

1. Mengawasi ialah proses dengan mana administrasi melihat apakah apa yang terjadi itu sesuai apa yang seharusnya terjadi. Jika tidak maka penyesuain yang perlu dibuatnya. Jadi, pengawasan ialah fungsi administrative dalam mana fungsi administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Ia meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Ia dimaksdukan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan, kemudian membetulkannya dan mencegah perulangannya. Ia mengenai semua orang, kegiatan, benda dan lain-lain (Oteng, 2010 : 240).
2. Proses pengawasan merupakan bagian penting dalam pengelolaan. Hadari Nawawi (1973) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efesiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan (Sutikno, 2008 : 71).
3. George R. Terry (1978) mengartikan pengawasan sebagai kegiatan lanjutan yang bersangkutan dengan ikhtiar untuk mengidentifikasikan pelaksanaan program yang harus sesuai dengan rencana. Kunci dasar yang menjadi kunci dalam siste pengawasan adalah umpan balik (*feedback*) (Nanang Fattah, 2004).
4. Dalam pengertian lain, Sondang Siagian (dalam Soebagio Atmodiwirio, 2000) mengartikan pengawasan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksankan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

2.2. Sasaran Pengawasan

Dilihat sebagai proses, tindakan pengawasan terdiri atas empat langkah universal berikut : (Oteng, 2010 : 240 – 241).

1. Menetapkan suatu kriteria atau standar pengukuran/ penilaian;
2. Mengukur atau menilai perbuatan (performance) yang sedang atau sudah dilakukan;

3. Membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan perbedaannya jika ada;
4. Memperbaiki penyimpangan dari standar (jika ada) dengan tindakan pembetulan.

Terlepas dari berbagai bentuk dan jenis pengawasan yang bisa dilakukan, terdapat beberapa sasasaran utama, yaitu :

1. Untuk lebih menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan tersebut.
2. Untuk menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatana operasional benar-benar digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efesiensi dan efektif.
3. Untuk lebih menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar berorientasi kepada kemajuan organisasi.
4. Untuk lebih menjamin penyediaan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
5. Untuk lebih menjamin bahwa standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin.
6. Untuk lebih menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua pihak.

2.3. Bentuk Pengawasan

Dalam buku *Pengelolaan Pendidikan " Teori dan Praktik "* (Afifuddin dan Sobri Sutikno, 2008) membagi pengawasan kepada tiga bagian, diantaranya adalah :

1. Bentuk Pengawasan Atasa Langsung (PAL)

   Pengawasan atasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Pengawasan ini dilakukan oleh setiap atasan setiap saat disetiap pemberian tugas, dan fungsi bawahan disertai pemberian petunjuk atau tindakan korektif bila perlu.
2. Bentuk Pengawasan Fungsional (Wasnal)

   Pengawasan fungsional ini dilakukan oleh aparat secara khusus ditugasi untuk membantu pimpinan untuk menlaksanakan pengawasan dalam batas kewenangan yang ditentukan.
3. Bentuk Pengawasan Melekat (Wakat)

   Pengawasan Waskat dilakukan oleh setiap jabatan/pegawai dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan membandingkan tindakan yang ada, sedang, atau telah dilaksanakan dengan alat pengawasan melekat setiap jabatan pimpinan pada semua tingkatan wajib menciptakan alat pengawasan meekat bgaia satuan-satuan kerja.

Menurut Ngalim Purwanto (2002) tujuan pengawasan melekat bagi para pemimpin ialah untuk mengetahui apakah pimpinan unit kerja dapat menjalankan fungsi dan pengendalian yang melekat padanya dengan baik, sehingga apabila ada penyelewengan, pemborosan, korupsi, pimpinanan unit kerja dapat mengambil tindakan koreksi sedini mungkin.

2.4. Prasyarat Orang yang Melaksanakan Pengawasan

Ada beberapa syarat orang yang melaksanakan pengawasan agar pengawasan bisa efektif, diantaranya, yaitu :

1. Memiliki pengetahuan yang kuat mengenai pekerjaan yang diawasi;

2. Mengetahui rencana kegiatan, tujuan yang ingin dicapai, kebijakan pimpinan, alat ukur keberhasilan tiap tahap dan sebagainya;
3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan cara-cara dan teknik pengawasan;
4. Supel dan loyal sehingga mudah menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang diawasi;
5. Memiliki sifat jujur, adil, bijaksana, konsekwen tapi berwajah ramah, rendah hati, sderhana dan berjiwa pengabdi.
6. Berani. Keberanian merupakan syarat yang amat penting bagi pengawasan, oleh karena tugas pengawasan itu memang penuh dengan resiko. Pengawasan yang baik harus berani melaporkan kenyataan yang sebenarnya ia hadapi dalam pemeriksaan.

Apabila seluruh prasayarat dapat terpenuhi dengan baik, pengawasan akan dapat dirasakan manfaatnya. Tanpa pengawasan yang benar dan teratur, pengelolaan pendidikan tidak akan dapat mengetahui dengan pasti daya guna dan hasil guna suatu kegiatan dalam mengukur efektivitas, efesiensi dan implementasi.

2.5. Karakteristik Pengawasan yang Efektif

Proses Pengawasan yang efektif memperlihatkan beberapa karakteristik, diantaranya :

1. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi.
2. Pengawsaan hendaknya diarahkan kepada menemuka fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan.
3. Pengawasan hendaknya mengacu kepada tindakan perbaikan.
4. Pengawasan harus bersifat fleksibel.
5. Pengawasan harus bersifat preventif.
6. Sistem pengawasa harus dapat difahami, jika hendak berarti orang-orang yang terlibat harus memahami apa yang hendak dicapai oleh pengawasan itu dan bagaimana mereka selaku individu dapat menarik manfaat sepenuhnya dari hasilnya.
7. Pengawasan harus bersifat membimbing supaya para pelaksana meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan.[4]

2.6. Pengawasan Pendidikan di Sekolah-Sekolah

Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan setiap fungsi pengeloalaan pendidkan sejak perencanaaan, pengorganisasian, motivasi pembinaan, penilaian dan pengembangan pendidikan. Mulai dari tingkat pusat sampai terendah. Pengawasan pendidikan di sekolah meliputi kegiatan mengarahkan, membimbing, mendidik, mempertimbnagkan dan menilai. Pengertian yang umum ini terdapat pada perkataan pengawasan sebagai pekerjaan seorang pengawas atau pendidik, dan juga mengenai kegiatan yang bersifat teknis yang biasa disebut inspeksi. Kegiatan tersebut adalah sebagai proses penerapan fungsi pnegelolaan melalui alat dan teknis pengawasan untuk menetapkan apakah rencana-rencana, kebijaksanaan-kebijaksanaan, instruksi-instruksi, dan prosedur-prosedur itu diikuti atau tidak, dan pakah efektif atau tidak pelaksanaannya.

Adapun yang menjadi ruang lingkup pengawasan di sekolah ialah pengendalian dan penialain terhadap :

1. Pelaksanaan kurikulum yang meliputi isi, metode pengajaran, penggunaan alat bantu pengajaran dan evaluasi;

2. Pendayagunaan tenaga teknis sekolah dalam rangka terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efesiens;
3. Pendayagunaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ketatausahaan sekolah yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, urusan perkantoran, dan termasuk proyek agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Hubungan kerja sekolah dengan instansi pemerintahan dan swasta, dunia usaha dan organisasi masyarakat.

2.7. Supervisi Pendidikan

Istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua akar kata, yaitu *super*yang artinya "di atas", dan *vision* mempunyai arti "melihat", maka secara keseluruhan supervisi diartikan sebagai "melihat dari atas". Dengan pengertian itulah maka supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi pekerjaan guru.

Berbicara mengenai pengertian supervisi pendidikan, banyak sekali tawaran dari para ahli pakar, yang bisa diambil sebagai bahan referensi. Ini bisa dibuktikan dengan pendapat beberapa para ahli pakar, misalnya:

a. Menurut M. Ngalim Purwanto dalam bukunya "Administrasi" memberikan pengertian, bahwa supervisi pendidikan, adalah suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya, dalam melakukan pekerjaan secara efektif (Mgalim, 2008 : 76).
b. Menurut Suharsini Arikunto, supervisi pendidikan, adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah, agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi mengajar dengan baik (Suharsimi, 2004 : 10).
c. Sedangkan menurut Made Pidarta, pengertian supervisi pendidikan, adalah suatu proses pembimbingan dari pihak atasan kepada para guru atau personalia sekolah lainnya, yang langsung menangani belajar para siswa, untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat.
d. Carter V. Good, dalam bukunya, Dictionary Of Education , sebagaimana yang dikutip oleh Burhanuddin, memberikan pengertian, bahwa supervise pendidikan adalah usaha dari seorang kepala atau atasan untuk memimpin guru-guru dan petugas lainnya, dalam memperbaiki kinerja, pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan, dan perkembangan guru- guru, dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, dan metode mengajar, serta evaluasi pengajaran (Achmad, 2010 : 7).

Dari beberapa pendapat para ahli pakar di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa supervisi pendidikan adalah usaha untuk membantu, membina, membimbing, dan mengarahkan seluruh staf sekolah, agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar dengan lebih baik.

Begitu juga dengan supervisi pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk membantu para guru dan staf sekolah lainnya, dalam segala hal, khususnya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan edukatif dan administratif yang dilaksanakan dengan secara sistematis, demokratis,dan kooperatif, agar dapat mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif dan kondusif.

Dalam pengertian lain, Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Dengan demikian hakekat supervisi pendidikan adalah suatu proses bimbingan dari pihak kepala sekolah kepada guru-guru dan personalia sekolah yang langsung menangani belajar para siswa, untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Disamping itu juga memperbaiki situasi bekerja dan belajar secara efektif, disiplin, bertanggung jawab dan memenuhi akuntabilitas.

Sedangkan yang melakukan supervisi disebut *supervisor*. Bimbingan di sini mengacu pada usaha yang bersifat manusiawi serta tidak bersifat otoriter. Memperbaiki situasi bekerja dan belajar secara efektif terkandung makna di dalamnya bekerja dan belajar secara disiplin, tanggung jawab, dan memenuhi akuntabilitas. Jadi seorang pendidik itu tidak hanya mendidik dan mengajar akan tetapi dia juga harus masih belajar bagaimana cara-cara mendidik yang baik dan benar. Sehingga makna bahwa belajar tidak mengenal umur itu memang harus direalisasikan (Suharsimi, 2004 : 28).

2.8. Peranan Supervisi Pendidikan

Kegiatan utama pendidikan di sekolah adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah, agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua peserta didik dan sekolah serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif. Maka peranan supervisor adalah memberi dukungan (support), membantu (*assisting*), dan mengikut sertakan (*shearing*).

Selain itu peranan seorang supervisor adalah menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga guru-guru merasa aman dan bebas dalam mengembangkan potensi dan daya kreasi mereka dengan penuh tanggung jawab. Suasana yang demikian hanya dapat terjadi apabila kepemimpinan dari supervisor itu bercorak demokratis bukan otokraris. Kebanyakan guru seolah-olah mengalami kelumpuhan tanpa inisiatif dan daya kreatif karena supervisor dalam meletakkan interaksi bersifat mematikan (Sutopo dan Soemanto, 1988 : 125).

Berdasarkan banyaknya jenis pekerjaan yang dilakukan oleh guru-guru maupun para karyawan pendidikan, supervisi dalam dunia pendidikan dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu supervisi umum, supervisi pengajaran, supervisi klinis, pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional.

a. Supervisi umum dan supervisi pengajaran

Supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan, supervisi terhadap kegiatan pengelolaan administrasi kantor, dan supervisi pengelolaan keuangan sekolah atau kantor pendidikan.

Supervisi pengajaran adalah kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personel maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik

demi tercapainya tujuan pendidikan. Dengan demikian, uraian di atas tentang pengertian supervisi beserta definisi-definisinya dapat digolongkan ke dalam supervisi pengajaran.

b. Supervisi klinis

Supervisi klinis adalah suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru atau calon guru khususnya dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan objektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku mengajar tersebut.

Supervisi klinis termasuk bagian dari supervisi pengajaran. Dikatakan supervisi klinis karena prosedur pelaksanaannya lebih ditekankan pada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang yang terjadi di dalam proses belajar mengajar dan kemudian secara langsung diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut. Ibarat seorang dokter yang akan mengobati pasiennya, mula-mula dicari dulu sebab dan jenis penyakitnya. Setelah diketahui dengan jelas penyakitnya kemudian sang dokter memberikan saran bagaimana sebaiknya agar penyakit itu tidak semakin parah dan pada waktu itu juga dokter memberikan resep obatnya.

Di dalam supervisi klinis cara yang dilakukan adalah supervisor mengadakan pengamatan terhadap cara guru mengajar, setelah itu mengadakan diskusi dengan guru yang bersangkutan dengan tujuan untuk memperoleh kebaikan maupun kelemahan yang terdapat pada saat guru mengajar serta bagaimana usaha untuk memperbaikinya.

c. Pengawasan melekat dan pengawasan fungsional

Di dalam dunia pendidikan di Indonesia istilah supervisi disebut juga pengawasan atau kepengawasan. *Pengawasan melekat* adalah suatu pengawasan yang memang sudah melekat menjadi tugas dan tanggung jawab semua pimpinan. Oleh karena itu setiap pemimpin adalah juga sebagai pengawas, maka kepengawasan yang dilakukan itu disebut pengawasan melekat. Dengan pengawasan melekat yang efektif dan efisien dapat dicegah sedini mungkin terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara sehingga dapat terbina aparat pendidikan yang tertib, bersih, dan berdaya guna. Tujuan pengawasan melekat adalah untuk mengetahui apakah pimpinan unit kerja dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian yang melekat padanya dengan baik sehingga bila ada penyelewengan, pemborosan, dan korupsi pimpinan unit kerja dapat mengambil tindakan koreksi sedini mungkin.

3. Pembahasan

3.1. Hubungan Administrasi dengan Pengawasan

Dipikirkan sebagai proses administrative yang hendak menjamin keselarasan, kecerdasan, dan ekonomi dalam usaha pendidikan, pengawasan jelas mempunyai hubungan ynag erat sekali dengan unsur-unsur proses administrative lainnya, bahkan dalam beberapa hal mungkin hamper tak dapat dipisahkan dari unsur-unsur yang lainnya itu, diantaranya :

1. Perencanaan membangun tujuan serta menggariskan mekanisme. Pekerjaan dan prosedur untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetepakan;
2. Organisasi menetapkan hierarki kedudukan-kedudukan dan hubungan antara orang-orang yang menempati kedudukan-kedudukan;

3. Komuniksi menyalurkan pemerintah, intsruksi, dan informasi ke semua jurusan yang diperlukan didalam organisasi
4. Koordinasi mempersatukan bagian-bagian organisasi, sehingga setiap anggota atau bagian melengkapi dan membantu yang lainnya (Oteng, 2010 : 247).

Semua kegiatan itu jelas membantu kegiatan pengawasan karena menyediakan dasar bagi kepemilikan kondisi yang perlu bagi keberhasilan pekerjaan administrasi dan bagi pengukuran dan penilaian hasil-hasil. Misalnya, system pencatatan dan pelaporan kemajuan murid mnyediakan tidak saja cara mengawasi tetapi juga cara menyesuaikan pengajaran bagi murid perseorangan maupun kelompok kelas. Merencanakan kurikulum dan ujian sekolah adalah juga menyusun sutau rencana pengawasan tertentu terhadap pengajaran serta hasil-hasil yang diperoleh pengajaran.

3.2. Hubungan Administrasi dengan Supervisi

Administrasi dan supervisi merupakan alat penunjang untuk mencapai tujuan pendidikan. Demikian juga halnya tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai bila di dalamnya ada kegiatan administrasi dan supervisi secara sistematis dan kontinu. Kegiatan administrasi dan supervisi di sekolah di laksanakan secara menyeluruh, meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kurikulum, murid, sarana, prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat (Burhanuddin, 2005 : 99).

Administrasi dan supervisi mempunyai hubungan yang erat. Sebenarnya administrasi dan supervisi tidak dapat dipisahkan, tetapi dalam hal-hal tertentu keduanya dapat dibedakan.

1. Kegiatan administrasi didasarkan pada kekuasaan, sedangkan supervisi didasarkan pada pelayanan bimbingan dan pembinaan.
2. Tugas administrasi meliputi keseluruhan bidang tugas di sekolah, termasuk manajemen sekolah, sedangkan supervisi hanya sebagian meliputi dari tugas pengarahan (*directing*), yang merupakan satu segi manajemen sekolah.
3. Supervisi sebagai salah satu fungsi pokok administrasi, berupa pelayanan yang langsung berurusan dengan pengajaran dan perbaikannya. Ia langsung berurusan dengan mengajar belajar dan dengan faktor-faktor yang termasuk dalam dan bertalian dengan fungsi ini- guru, murid, kurikulum, bahan dan alat pengajaran, serta lingkungan sosio-fisik dari situasi mengajar-belajar.
4. Administrasi bertugas menyediakan semua kondisi yang diperlukan untuk pelaksanaan program pendidikan, sedangkan supervisi menggunakan kondisi-kondisi yang telah disediakan untuk peningkatan kualitas belajar mengajar (Oteng, 2010 : 291 – 292).

4. Penutup

Konsep dasar pengawasan meliputi pengertian, sasaran, bentuk, karakteristik, faktor dan yang lainnya. Sedangkan konsep dasar supervisi pendidikan itu terdiri atas pengertian, tujuan, prinsip, ruang lingkup, peranan sertajenis serta aspek lainnya, keduanya mempunyai aspek-aspek tertentu yang saling berkaitan dalam Pendidikan.

Pengawasan merupakan fungsi administratif dalam fungsi administrator yang memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Ia meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Ia dimaksudkan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan, kemudian membetulkannya dan mencegah perulangannya. Ia mengenai semua orang, kegiatan, benda dan lain-lain.

Sedangkan, Supervisi itu sendiri adalah suatu proses bimbingan dari seorang kepala sekolah kepada para guru dan pegawai yang langsung menangani belajar siswa guna memperbaiki situasi belajar mengajar para siswa agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Tujuan dari supervisi pendidikan itu sendiri adalah perbaikan proses belajar mengajar termasuk di dalamnya adalah memperbaiki mutu mengajar guru juga membina profesi guru dengan cara pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar dan keterampilan guru, selain itu memberikan bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar dan teknik evaluasi pengajaran. Prinsip supervisi pendidikan terdiri atas prinsip ilmiah, demokratis, kerja sama, dan konstruktif kreatif. Peranan supervisi pendidikan adalah memudahkan supervisor dalam mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Kemudian sasaran supervisi pendidikan ditujukan pada usaha memperbaiki situasi belajar mengajar antara guru dan murid.

Daftar Pustaka

Afifuddin dan Sobri Sutikno. 2008. *Pengelolaan Pendidikan "Teori dan Praktik"*. Bandung : Prospect Bandung.

Afifuddin, Bambang Samsul Arifin dan Badrudin. 2004. *Administrasi Pendidikan*. Bandung : Insan Mandiri Offset.

Arikunto, Suharsimi. 2004. *Dasar-dasar Supervisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Burhanudin, Yusak. 2005. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Fattah, Nanang. 2004. *Landasan Mmenejemen Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.

Ngalim Purwanto. 2002. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Patoni, Achmad. 2010. *Supervisi Pendidikan (Islam)*. Tulungagung: PPs STAIN Tulungagung.

Pidarta, Made. 1992. *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Purwanto, M. Ngalim. 2008. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sahertian, Piet A. 1981. *Prinsip dan Tehnik Supervisi Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional.

Soetopo Hendyat dan Wasty Soemanto. 1982. *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*. Malang : Rineka Cipta.

Soetopo, Hendyat dan Wasty Soemanto. 1988. *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.

Soebagio Atmodiwiro. 2000. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Ardadizya Jaya.

Sutisna Oteng. 2010. *Administrasi Pendidikan (Dasar Teoriritis untuk Praktek Profesional)*. Bandung : Penerbit Angkasa.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN MATEMATIKA PADA SISWA SMP NEGERI LOTU

Drs. Saroziduhu Daeli[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mata pelajaran matematika pada siswa. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Lotu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportionale Stratified random sampling. Penelitian ini difokuskan terhadap nilai rangking mulai dari kelas VII, VIII, IX pada Siswa SMP Negeri 3 Lotu dengan jumlah responden sebanyak 89 siswa. Penelitian ini dibatasi pada 25 variabel dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar pada siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat 9 faktor hasil ekstraksi yang berpengaruh terhadap keberhasilan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Lotu. Dari sembilan faktor yang terbentuk, faktor lama belajar di rumah menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa SMP Negeri 3 Lotu dengan presentasi sebesar 16,48 %, sedangkan faktor tidak masuk atau tidak mengikuti pelajaran menjadi faktor terkecil yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Lotu dengan variansi sebesar 4,77 %.

Kata kunci : *prestasi belajar* dan *faktor-faktor yang mempengaruhi*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk mempersiapkan kesuksesan masa depan pada zaman globalisasi saat ini. Pendidikan bisa diraih dengan berbagai macam cara, salah satunya pendidikan di sekolah.

Pendidikan disekolah merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia, untuk itu pemerintah telah mencanangkan Wajib Belajar 9 Tahun. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan diharapkan mampu menerapkan metode belajar yang baik dan efektif bagi siswanya, agar menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

Menurut Slameto (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu faktor internal yang bersumber pada diri siswa dan faktor eksternal yang bersumber dari luar diri siswa. Faktor intern terdiri dari kecerdasan atau inteligensi, perhatian, bakat, minat, motivasi, kematangan, kesiapan, dan kelelahan. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Kecerdasan emosional yang dimiliki siswa berperan penting dalam meraih prestasi, karena emosi memancing tindakan seseorang terhadap apa yang dihadapinya. Perhatian dan minat siswa pada saat guru memberikan materi pelajaran juga mempengaruhi pemahaman akan materi yang telah disampaikan. Kemudian setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda, seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu yang sesuai dengan bakatnya. Apabila seseorang harus mempelajari sesuatu yang tidak sesuai dengan bakatnya, maka orang

[1] *Pengawas Sekolah SMPN 3 Lotu*

tersebut akan cepat bosan, mudah putus asa dan tidak senang. Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan, sehingga semakin besar motivasinya akan semakin besar kesuksesan belajarnya.

Faktor lain yang berperan penting dalam menunjang keberhasilan siswa dalam belajar yaitu lingkungan keluarga. Peranan orang tua yang memperhatikan pendidikan anaknya, dan peduli terhadap kemajuan belajar anak serta mendukung fasilitas yang dibutuhkan anaknya akan menunjang keberhasilan prestasi belajar yang dicapai anak tersebut. Selain itu, lingkungan sekolah juga memiliki peranan penting dalam keberhasilan prestasi belajar. Apabila guru yag mengajar berkualitas, hubungan dengan siswa baik, mempunyai kecakapan mengajar, menggunakan metode yang tepat, maka akan membantu meningkatkan prestasi belajar yang dicapai siswa (Djamarah, 2008: 181).

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari SMP Negeri 3 Lotu prestasi belajar matematikanya masih tergolong kurang, sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi keberhasilan matematika pada sekolah tersebut. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mata pelajaran matematika pada siswa SMP Negeri Lotu.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mata pelajaran matematika pada siswa.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Lotu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proportionale Stratified random sampling*. Penelitian ini difokuskan terhadap nilai rangking mulai dari kelas VII, VIII, IX pada Siswa SMP Negeri 3 Lotu dengan jumlah responden sebanyak 89 siswa. Penelitian ini dibatasi pada 25 variabel dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar pada siswa terdiri dari : Kehadiran, Kesulitan Mengerjakan Tugas, Nilai Pelajaran, Perhatian Terhadap Materi, Ketelitian Mengerjakan Soal, Keaktifan Bertanya, Usaha Memahami Materi, Waktu Belajar di Rumah, Cara Mengerjakan Tugas, Suasana Rumah, Hubungan antar Keluarga, Pengawasan Orang Tua, Dorongan atau Motivasi Orang Tua, Sikap Orang Tua, Respon Orang Tua ketika Anaknya Mendapat Nilai Jelek, Cara Guru Mengajar, Hubungan Guru dengan Siswa, Kehadiran Guru, Keadaan Buku Catatan, Fasilitas Perpustakaan, Suasana dan Prasarana Kelas, Suasana Lingkungan Sekolah, Keterlambatan Hadir dan Ketepatan Waktu Mengumpulkan Tugas.

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Belajar

Belajar adalah satu proses perubahan prilaku individu yang disebabkan oleh pengalaman. Perubahan prilaku tersebut senantiasa mengacu kearah yang lebih baik. Adapun aspek-aspek yang tidak termasuk perubahan dalam belajar yaitu kematangan fisik, pertumbuhan dan perkembangan.

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik (Slameto, 2003:1).

2.2. Pengertian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. Acuan kriteria tidak diubah secara serta merta karena hasil empirik penilaian. Pada acuan norma, kurva normal sering digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata kurang memuaskan. Nilai akhir sering dikonversi dari kurva normal untuk mendapatkan sejumlah peserta didik yang melebihi nilai 6,0 sesuai proporsi kurva. Acuan kriteria mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap hasil penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi yang belum tuntas dan atau layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal.

Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Kriteria ketuntasan menunjukkan persentse tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasioal diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal dibawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proses Analisis Faktor I

Pada proses awal analisis faktor, dilakukan beberapa tahap sampai dengan diperoleh faktor-faktor baru sebagai dominan yang ingin diperoleh. Proses pertama tabulas pada data serta melakukan pengolahan dengan software yang telah direferensikan yaitu program SPSS dengan mengambil versi SPSS 20.

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa. Dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut berjumlah 21 variabel yang telah valid.

Dari hasil kuesioner setelah ditabulasi, dilakukan uji KMO dan *Barlett's Test* dengan menggunakan SPSS. Dari hasil output SPSS untuk 21 pernyataan yang dijawab oleh 89 responden dalam kuesioner, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.554
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	408.322
	df	210
	Sig.	.000

Dari hasil output SPSS pada tabel KMO and Barlett's Test terlihat angka *Kaiser-Meyer-Olkin Meausre of Sampling Adequacy* sebesar 0,554 di atas 0,50; dengan signfikansi 0,000 adalah di bawah 0,50, maka variabel dan sampel sudah layak untuk dianalisis lebih lanjut. Dilihat dari angka *Chi-square* sebesar 408,322 artinya

keduapuluh satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa dapat diterima pada tingkat signifikansi 5 %.

Perhitungan selanjutnya adalah dengan melihat nilai MSA. Hasil nilai MSA dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil pada tabel menunjukkan bahwa 21 variabel yang tersisa mempunyai nilai lebih dari 0,5 berdasarkan 21 variabel yang dinilai dalam kuesioner yang merupakan jawaban 89 responden, diperoleh dari nilai MSA yang diperoleh di atas 0,3. Ini menandakan semua variabel memiliki korelasi cukup tinggi dengan variabel lainnya, sehingga selanjutnya dapat dilakukan analisis pada seluruh variabel yang diteliti. Besar nilai MSA yang diperoleh disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai *Measure of Sampling Adequarcy* (MSA)

No	Variabel	*Measure of Samplong Adequarcy*
1	Variabel 1	0,390
2	Variabel 2	0,498
3	Variabel 3	0,648
4	Variabel 4	0,645
5	Variabel 5	0,577
6	Variabel 6	0,426
7	Variabel 7	0,513
8	Variabel 8	0,474
9	Variabel 9	0,555
10	Variabel 10	0,635
11	Variabel 11	0,450
12	Variabel 12	0,561
13	Variabel 13	0,679
14	Variabel 14	0,515
15	Variabel 15	0,616
16	Variabel 16	0,508
17	Variabel 17	0,594
18	Variabel 18	0,679
19	Variabel 19	0,548
20	Variabel 10	0,487
21	Variabel 21	0,554

Nilai Anti Image Matries adalah nilai dengan simbol (a) yang menunjukkan besaran *Measure of Sampling Adequarcy* (MSA) masing-masing faktor. Besaran MSA tersebut menunjukkan kecukupan pengaruh dari faktor tersebut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa. Dilihat dari nilai MSA, berarti keduapuluh satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa dapat diproses lebih lanjut karena nilai MSA-nya rata-rata di atas 0,30.

Angka *Anti Image Covariance*, menunjukkan nilai korelasi positif antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator berpengaruh positif terhadap indikator lainnya.

3.2. Proses Anlasisis Faktor II (Ekstraksi)

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah *Principal Componen Analysis* (Analisis Komponen Utama). Di dalam *Principal Componen Analysis* jumlah varians data dipertimbangkan yaitu diagonal matriks korelasi, setiap elemennya sebesar satu dan *full variance* dipergunakan untuk pembentukan

faktor, yaitu variabel-variabel lama yang jumlahnya lebih sedikit dan tidak berkorelasi lagi satu sama lain, seperti variabel-variabel asli yang memang saling berkorelasi. *Communalities* adalah jumlah varians yang disumbangkan oleh suatu variabel dengan seluruh variabel lainnya dengan analisis.

Tabel *total variance explained* menunjukkan korelasi antara masing-masing variabel dengan faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4, faktor 5, faktor 6, faktor 7, faktor 8 dan faktor 9. Penentuan variabel yang masuk masing-masing faktor dilakukan dengan membandingkan besaran korelasi pada setiap baris. Hasil pengujian *Total Variance Explained* dapat dilihat pada Tabel 3..

Tabel 3. *Total Variance Explained*

	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
Component	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3,462	16,484	16,484	3,462	16,484	16,484	1,990	9,476	9,476
2	2,093	9,965	26,449	2,093	9,965	26,449	1,940	9,237	18,713
3	1,740	8,284	34,733	1,740	8,284	34,733	1,798	8,563	27,276
4	1,518	7,230	41,963	1,518	7,230	41,963	1,723	8,204	35,480
5	1,323	6,299	48,262	1,323	6,299	48,262	1,647	7,842	43,322
6	1,298	6,181	54,443	1,298	6,181	54,443	1,549	7,375	50,697
7	1,115	5,310	59,754	1,115	5,310	59,754	1,468	6,989	57,686
8	1,077	5,127	64,881	1,077	5,127	64,881	1,311	6,245	63,931
9	1,001	4,768	69,649	1,001	4,768	69,649	1,201	5,718	69,649
10	0,942	4,486	74,134						
11	0,830	3,953	78,087						
12	0,725	3,451	81,538						
13	0,703	3,349	84,887						
14	0,619	2,947	87,834						
15	0,566	2,694	90,528						
16	0,466	2,221	92,749						

17	0,388	1,847	94,595						
18	0,328	1,563	96,159						
19	0,316	1,504	97,663						
20	0,274	1,307	98,970						
21	0,216	1,030	100,000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total kesembilan faktor tersebut sebesar 69,649 %, yang berarti bahwa kesembilan faktor tersebut dapat menjelaskan 69,649 % dari variabilitas keduapuluh satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa. *Eingenvalues* menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varians keduapuluh satu variabel yang dianalisis. Jumlah angka *eingenvalues* untuk keduapuluh satu variabel adalah : (3,462 + 2,093 + 1,740 + 1,518 + 1,323 + 1,298 + 1,115 + 1,077 + 1,001 + 0,942 + 0,830 + 0,725 + 0,703 + 0,619 + 0,566 + 0,466 + 0,388 + 0,328 + 0,316 + 0,274 + 0,216) = 21.

$$= \frac{3,462}{21} \times 100\% = 16,49\ \%$$

Jika 21 variabel diekstrak menjadi 9 faktor, maka :

1. Varian faktor pertama adalah 16,48 %
2. Varian faktor kedua adalah 9,97 %
3. Varian faktor ketiga adalah 8,28 %
4. Varian faktor keempat adalah 7,23 %
5. Varian faktor kelima adalah 6,30 %
6. Varian faktor keenam adalah 6,18 %
7. Varian faktor ketujuh adalah 5,31 %
8. Varian faktor kedelapan adalah 5,13 %
9. Varian faktor kesembilan adalah 4,77 %.

Total kesembilan faktor akan menjelaskan (16,48 + 9,97 + 8,28 + 7,23 + 6,30 + 6,18 + 5,31 + 5,13 + 4,77) % = 69,65 % atau kesembilan faktor tersebut akan menjelaskan 69,65 % dari variabilitas ke-21 yang asli tersebut.

Sedangkan *eigenvalue* menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varians ke-21 variabel yang dianalisis.

1. Jumlah angka *eigenvalue* untuk ke-21 variabel adalah sama dengan total variabel ke-21 variabel atau 3,462 + 2,093 + 1,740 + 1,518 + 1,323 + 1,298 + 1,115 + 1,077 + 1,001 + 0,942 + 0,830 + 0,725 + 0,703 + 0,619 + 0,566 + 0,466 + 0,388 + 0,328 + 0,316 + 0,274 + 0,216 = 21.
2. Susunan *eigenvalue* selalu diurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, dengan kriteria bahwa angka *eigenvalue* di bawah 1 tidak digunakan dalam menghitung yang terbentuk.

Dari Tabel 3 di atas menyatakan bahwa hanya 9 faktor yang terbentuk, terlihat dari *eigenvalue* dengan nilai di atas 1, namun pada faktor yang sepuluh angka *eigenvalue* sudah di bawah 1, yakni 0,942 sehingga proses *faktoring* seharusnya berhenti pada sembilan faktor saja, maka dalam penelitian ini hanya sembilan faktor yang terbentuk.

3.3. Proses Analisis Faktor III (Rotasi)

Faktor loading yaitu besarnya korelasi antara masing-masing variabel dengan faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4, faktor 5, faktor 6, faktor 7, faktor 8 dan faktor 9. Penentuan variabel dari msing-masing faktor dilakukan dengan memperbandingkan besaran korelasi setiap baris. Angka yang paling besar menunjukkan korelasi paling kuat. Angka korelasi di bawah 0,50 mengindikasikan korelasi yang lemah dan jika korelasinya di atas 0,50 mengindikasikan korelasinya kuat.

Factor loading hasil rotasi menunjukkan bahwa variabel-variabel berkorelasi kuat hanya pada satu faktor tertentu, misalnya korelasi antara variabel X_1 dan faktor sembilan sebesar 0,890 (korelasi kuat), sedangkan dengan faktor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 masing-masing 0,035, 0,044, -0,010, 0,086, 0,080, 0,105, 0,017 dan 0,003 (korelasi lemah).

Nilai *eigenvalue* dari faktor yang diekstraksi mencerminkan jumlah variansi yang dapat dijelaskan oleh suatu faktor. Hasil rekapitulasi faktor yang dihasilkan dengan metode analisis faktor yaitu menjadi 9 faktor.

3.4. Proses Analisis Fator IV (Interpretasi Faktor)

Faktor Pertama

Faktor pertama hasil rotasi faktor didukung oleh 4 variabel. Variabel-variabel tersebut yang secara berurutan nilai bobotnya adalah X_2, X_4, X_7 dan X_9. Bobot masing-masing variabel pendukung faktor pertama tersebut sesuai tabel berikut ini:

Tabel 4. Bobot Variabel Pendukung Faktor Pertama

Variabel Pendukung	Nama Variabel	Bobot Variabel
X_2	Mendapatkan nilai kurang dari KKM untuk semua mata pelajaran	0,696
X_4	Ketelitian dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru dalam setiap pelajaran	0,632
X_7	Lama belajar di rumah setiap hari	0,824
X_9	Kondisi rumah pada saat belajar	0,484

Dari tabel di atas, variabel X_7 mempunyai bobot terbesar, yaitu 0,824. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pertama cukup layak diberi nama faktor lama belajar di rumah. Faktor pertama ini adalah faktor yang paling kuat yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Lotu dengan variansi sebesar 16,48 %.

Faktor Kedua

Faktor kedua hasil rotasi faktor didukung oleh 3 variabel. Variabel-variabel tersebut yang secara berurutan nilai bobotnya adalah X_{10}, X_{13} dan X_{14}. Bobot masing-masing variabel pendukung faktor kedua tersebut sesuai tabel berikut ini:

Tabel 5. Bobot Variabel Pendukung Faktor Kedua

Variabel Pendukung	Nama Variabel	Bobot Variabel
X_{10}	Hubungan antar keluarga siswa saat ini	0,689
X_{13}	Sikap orang tua pada jam belajar di rumah dan tidak belajar.	0,632
X_{14}	Tindakan orang tua apabila anda mendapat nilai yang terendah	0,725

Dari tabel di atas, variabel X_{14} mempunyai bobot terbesar, yaitu 0,725. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor kedua cukup layak diberi nama faktor tindakan orang tua terhadap nilai rendah siswa. Faktor ini merupakan faktor kedua terkuat yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Lotu dengan variansi sebesar 9,97 %.

Faktor Ketiga

Faktor ketiga hasil rotasi faktor didukung oleh 2 variabel. Variabel-variabel tersebut yang secara berurutan nilai bobotnya adalah X_{19} dan X_{20}. Bobot masing-masing variabel pendukung faktor ketiga tersebut sesuai tabel berikut ini:

Tabel 6. Bobot Variabel Pendukung Faktor Ketiga

Variabel Pendukung	Nama Variabel	Bobot Variabel
X_{19}	Kenyamanan keadaan ruangan kelas serta sarana dan prasarana yang ada di dalam kelas dalam mendukung proses belajar mengajar.	0,797
X_{20}	Suasana sekolah mendukung untuk belajar	0,803

Dari tabel di atas, variabel X_{20} mempunyai bobot terbesar, yaitu 0,803. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor ketiga cukup layak diberi nama faktor suasana sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar. Faktor ini merupakan faktor ketiga terkuat yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Lotu dengan variansi sebesar 8,28 %.

Faktor Keempat

Faktor keempat hasil rotasi faktor didukung oleh 2 variabel. Variabel-variabel tersebut yang secara berurutan nilai bobotnya adalah X_6 dan X_{14}. Bobot masing-masing variabel pendukung faktor keempat tersebut sesuai tabel berikut ini:

Tabel 6. Bobot Variabel Pendukung Faktor Keempat

Variabel Pendukung	Nama Variabel	Bobot Variabel
X_6	Berapa besar murid dapat menangkap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru.	0,877
X_{14}	Tindakan orang tua anda apabila anda mendapat nilai yang terendah	0,714

Dari tabel di atas, variabel X_6 mempunyai bobot terbesar, yaitu 0,877. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor keempat cukup layak diberi nama faktor daya tangkap murid terhadap materi pelajaran yang disampaikan guru. Faktor ini merupakan faktor keempat terkuat yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Lotu dengan variansi sebesar 7,23 %.

Faktor Kelima

Faktor kelima hasil rotasi faktor didukung oleh 3 variabel. Variabel-variabel tersebut yang secara berurutan nilai bobotnya adalah X_{16}, X_{17} dan X_{21}. Bobot masing-masing variabel pendukung faktor kelima tersebut sesuai tabel berikut ini:

Tabel 7. Bobot Variabel Pendukung Faktor Kelima

Variabel Pendukung	Nama Variabel	Bobot Variabel
X_{16}	Guru datang tepat waktu pada saat mengajar	0,741
X_{17}	Keadaan buku catatan	0,465
X_{21}	Pernah terlambat dalam mengumpulkan tugas	0,759

Dari tabel di atas, variabel X_{21} mempunyai bobot terbesar, yaitu 0,759. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor kelima cukup layak diberi nama faktor keterlambatan siswa dalam mengumpulan tugas. Faktor ini merupakan faktor kelima terkuat yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Lotu dengan variansi sebesar 6,30 %.

Faktor Keenam

Faktor keenam hasil rotasi faktor didukung oleh 2 variabel. Variabel-variabel tersebut yang secara berurutan nilai bobotnya adalah X_{12} dan X_{18}. Bobot masing-masing variabel pendukung faktor keenam tersebut sesuai tabel berikut ini:

Tabel 8. Bobot Variabel Pendukung Faktor Keenam

Variabel Pendukung	Nama Variabel	Bobot Variabel
X_{12}	Pemberian hadiah oleh orang tua kepada murid untuk mendorong motivasi belajar	0,791
X_{18}	Kelengkapan buku di perpustakaan	0,607

Dari tabel di atas, variabel X_{12} mempunyai bobot terbesar, yaitu 0,791. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor keenam cukup layak diberi nama faktor pemberian hadian oleh orang tua

kepada murid untuk motivasi belajar. Faktor ini merupakan faktor keenam terkuat yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Lotu dengan variansi sebesar 6,18 %.

Faktor Ketujuh

Faktor ketujuh hasil rotasi faktor didukung oleh 2 variabel. Variabel-variabel tersebut yang secara berurutan nilai bobotnya adalah X_8 dan X_{11}. Bobot masing-masing variabel pendukung faktor ketujuh tersebut sesuai tabel berikut ini:

Tabel 9. Bobot Variabel Pendukung Faktor Ketujuh

Variabel Pendukung	Nama Variabel	Bobot Variabel
X_8	Cara dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru	0,577
X_{11}	Orang tua sering mendampingi atau mengawasi pada saat belajar	0,795

Dari tabel di atas, variabel X_{11} mempunyai bobot terbesar, yaitu 0,795. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor ketujuh cukup layak diberi nama faktor pendampingan orang tua mengawasi pada saat belajar. Faktor ini merupakan faktor ketujuh terkuat yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Lotu dengan variansi sebesar 5,31 %.

Faktor Kedelapan

Faktor kedelapan hasil rotasi faktor didukung oleh 2 variabel. Variabel-variabel tersebut yang secara berurutan nilai bobotnya adalah X_4 dan X_5. Bobot masing-masing variabel pendukung faktor kedelapan tersebut sesuai tabel berikut ini:

Tabel 10. Bobot Variabel Pendukung Faktor Kedelapan

Variabel Pendukung	Nama Variabel	Bobot Variabel
X_4	Ketelitian anda dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru dalam setiap pelajaran	0,624
X_5	Aktif bertanya dalam setiap pelajaran yang diberikan oleh guru	0,758

Dari tabel di atas, variabel X_5 mempunyai bobot terbesar, yaitu 0,758. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor kedelapan cukup layak diberi nama faktor keaktifan siswa bertanya. Faktor ini merupakan faktor kedelapan terkuat yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Lotu dengan variansi sebesar 5,13 %.

Faktor Kesembilan

Faktor keseimbilan hasil rotasi faktor didukung oleh 1 variabel. Variabel-variabel tersebut yang secara berurutan nilai bobotnya adalah X_1. Bobot variabel pendukung faktor kesembilan tersebut sesuai tabel berikut ini:

Tabel 11. Bobot Variabel Pendukung Faktor Kesembilan

Variabel Pendukung	Nama Variabel	Bobot Variabel
X_1	Pernahkah sebulan tidak masuk atau tidak mengikuti pelajaran	0,890

Dari tabel di atas, variabel X_1 mempunyai bobot sebesar 0,890. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor kesembilan cukup layak diberi nama faktor tidak masuk atau tidak mengikuti pelajaran. Faktor ini merupakan faktor terlemah yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Lotu dengan variansi sebesar 4,77 %.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat 9 faktor hasil ekstraksi yang berpengaruh terhadap keberhasilan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Lotu. Hal ini dapat digambarkan dari variansi kumulatif sebesar 69,65 %. Variabel-variabel yang terlihat/terobservasi adalah sebagai berikut :

   $F_1 = 0{,}696\ X_2 + 0{,}632\ X_3 + 0{,}824\ X_7 + 0{,}484\ X_9$

   $F_2 = 0{,}689\ X_{10} + 0{,}632\ X_{11} + 0{,}725\ X_{14}$

   $F_3 = 0{,}797\ X_{19} + 0{,}803\ X_{20}$

   $F_4 = 0{,}696\ X_2 + 0{,}714\ X_{15}$

   $F_5 = 0{,}741\ X_{16} + 0{,}465\ X_{17} + 0{,}759\ X_{21}$

   $F_6 = 0{,}791\ X_{12} + 0{,}607\ X_{18}$

   $F_7 = 0{,}577\ X_8 + 0{,}795\ X_{11}$

   $F_8 = 0{,}624\ X_4 + 0{,}758\ X_5$

   $F_9 = 0{,}890\ X_1$

2. Dari sembilan faktor yang terbentuk, faktor lama belajar di rumah menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa SMP Negeri 3 Lotu dengan presentasi sebesar 16,48 %, sedangkan faktor tidak masuk atau tidak mengikuti pelajaran menjadi faktor terkecil yang mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Lotu dengan variansi sebesar 4,77 %.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi sekolah

   Lama belajar di rumah terbukti mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar siswa, sehingga penulis memberikan saran kepada guru agar memberikan tugas rumah yang lebih banyak, sehingga dapat memberikan waktu belajar bagi siswa belajar di rumah.

2. Bagi keluarga

   Orang tua diharapkan memberikan pengawasan dan motivasi kepada anak, agar memberikan waktu belajar lebih banyak di rumah.

Daftar Pustaka

Anderson, T. W. 1984. *An Introdaction to Multivariate Statistical Analyisis,* New York: John Wiley & Sons,Inc.

Arikunto Suharsimi. 2009 *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Cochran, William G. 1991. *Teknik Penarikan Sampling.* Terjemahan Rudiansyah, Erwin R. Osman: Jakarta UI-Press.

Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. *Rahasia Sukses Belajar.* Jakarta: Rineka Cipta.

Papalia, D. E, Olds, S. W., Fieldman R. D. 2003. *Human Development (9th ed),* New York: Mc Graw Hill Inc,

Slameto, 1999. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudjana, 1996. *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi.* Bandung: Penerbit Tarsito.

Supranto, J. 2004. *Analisis Multivariate Arti dan Interpretasi.* PT. Rineka Cipta Jakarta

Tu'u, Tulus.2004. *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

ASPEK HUKUM PERDAGANGAN REGIONAL DALAM KETENTUAN *World Trade Organization* (WTO) (Studi Terhadap Kesepaktan AFTA-CHINA)

Halimatul Maryani, SH., MH.[1]

ABSTRACK

The establishment of World Trade Organization (WTO) through Law No.7/1994 on Legalization of Trade Establishment has spread the concept of trade liberalization to the world especially its country members where the basic concept of trade liberalization is the elimination of constraints in international trade. In its implementation, this concept froms a globalization which means universal and includes a very big field. In relation to the agreement or understanding in a regional Free Trade Agreement, there is multilateral system (WTO) which is much better than the existing systems in regional level. Yet, the problem is that the multilateral system in the framework of WTO gets stuck and cannot function well that the country members begin to establish regional trade blocks such as ASEAN, AFTA, including, ACFTA to obtain a direct benefit and develop their regional economic growth where regional trade is currently making more progress and developing. The establishment of this regional trade is allowed based on Article 24 of GATT.

Since January 1, 2010, China has joint the Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) in the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of South East Asian Nation and the People`s Republic of China (Asean – China) signed by the President of Republic of Indonesia (Megawati) on November 4, 2002 in Phnom Penh, Cambodia, and has also been ratified through Presidential decree No.48/2004 and Law No.24/2000 on International Agreement.

The principles found in the Framework of ACFTA remains the same as those in the framework of WTO such as Most Favorite Nation, National Treatment, prohibition of quantitative restriction, tariff-based protection, transparency, also the principle of mutual achievement, solidarity, cooperation and respect to national sovereignty.

Keywords: *regional Trade, WTO, ACFTA*

Pendahuluan

Latar Belakang

Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) telah memberikan konsep liberalisasi perdagangan kepada dunia khususnya kepada negara anggota, dimana knsep tersebut adalah penghilangan hambatan-hambatan dalam lintas perdagangan internasional dan dalam pelaksanaannya akan membentuk globalisasi, yang maknanya ialah universal dalam bidang yang sangat luas. Dari segi ekonomi dan perdagangan globalisasi sudah terjadi pada saat mulainya perdagangan rempah-rempah, kemudian tanam paksa di Jawa, sampai tumbuhnya perkebunan-perkebunan di Hindia Belanda, dan pada saat itu globalisasi lahir dengan kekerasan dalam alam kolonialisme. Pada masa kini globalisasi ekonomi dan perdagangan dilakukan dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional yang melahirkan aturan perdagangan bebas serta memfokuskan pengembangan pasar bebas terbuka.

Untuk mencapai kondisi perdagangan bebas perlu cukup waktu, sebab konsekuensi yang ditimbulkan tidak sedikit. Penghapusan hambatan perdagangan internasional disatu sisi dapat membawa kebaikan, misalnya perdagangan bebas memungkinkan arus masuk produk import lebih melaju, banyak beragam sehingga

[1] *Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan Email: maryaniritonga@yahoo.co.id*

menambah pilihan bagi konsumen. Proses kearah perdagangan bebas ini disebut dengan liberalisasi perdagangan (*trade liberalization)*.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) lahir dengan tujuan untuk membuat suatu unifikasi hukum dibidang perdagangan internasional. Meskipun pada awalnya masyarakat internasional ingin membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional di bawah PBB, namun dengan adanya penolakan dari Amerika Serikat, maka negara peserta GATT membuat kesepakatan agar perjanjian dalam GATT ditaati oleh para pihak yang menandatanganinya. Beragam kelemahan yang terdapat dalam GATT kemudian diperbaiki melalui beberapa pertemuan. Salah satu pertemuan yang berhasil adalah Putaran Uruguay antara tahun 1986-1994. Pada putaran tersebut dicapai kesepakatan untuk membentuk sebuah lembaga perdagangan internasional World Trade Organization (WTO).

Hal kongkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1994 dengan meratifikasi *Agreement On Establishing the World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Manfaat yang diharapkan dari integrasi perekonomian yang ada di Indonesia ke perekonomian dunia secara global melalui keikutsertaan dalam kesepakatan-kesepakatan WTO salah satunya adalah terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, sehingga perekonomian Indonesia akan meningkat lebih baik bagi kepentingan nasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang melalui hubungan regional.

Dengan adanya WTO, maka sistem yang telah menjadi kompleks akibat perluasan yang dihasilkan *Uruguay Round* dapat ditempatkan dalam satu payung dengan suatu organisasi yang lebih baik, sehingga kegiatan GATT versi baru ini akan menuntut penanganan lebih kontinyu dan intensif di kalangan negara anggota. Perjanjian *Uruguay Round* juga mengubah status organisasi GATT menjadi WTO sebagai organisasi internasional sepenuhnya, dan *Final Act* merumuskan dibentuknya WTO sebagai organisasi internasional.

Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional yang turut meratifikasi kerangka WTO ini, dengan sendirinya tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut. Untuk itu Indonesia tanpa tawar menawar, harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya, dengan kerangka WTO, khususnya dalam kaitannya dengan bidang yang diatur dalam WTO, adalah murni multilateral.

Perkembangan saat ini, banyak negara-negara membuat perjanjian perdagangan regional, karena bersifat lebih mudah dan aplikatif tidak melibatkan terlalu banyak negara serta kepentingannya seperti yang terjadi dalam WTO. Dengan kata lain ada pengecualian yang membolehkan bagi negara anggota WTO untuk membentuk organisasi-organisasi ekonomi (perdagangan) secara regional bilateral dan tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lainnya. Bahkan sekarang ini sering dijadikan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam membuat kesepakatan, menjalin kerjasama dibidang ekonomi dan perdagangan antar negara misalnya, dalam konteks *custum union* atau *free trade area.*

Salah satu perjanjian perdagangan regional yang ada saat ini adalah *Asean Free Trade Area* (AFTA) yang diprakarsai oleh *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebuah organisasi regional negara-negara di Asia Tenggara. AFTA lahir pada tahun 1995 dengan tujuan untuk memberikan keuntungan-keuntungan perdagangan bagi negara-negara yang berasal dari ASEAN. Upaya AFTA untuk mewujudkan

tujuannya adalah dengan melakukan kesepakatan preferensi terhadap barang-barang yang ada dari negara ASEAN. Selain itu juga Uni Eropa, *Asia Facific Economic Co-operati*on (APEC), *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dan lainnya dengan syarat bahwa pembentukan organisasi (perdagangan) regional tersebut tidak menjadi rintangan perdagangan bagi pihak ketiga, hal ini berdasarkan pasal 24 GATT.

Kelahiran AFTA sendiri merupakan upaya dari ASEAN untuk melindungi kepentingan negara anggota dalam perdagangan multilateral yang didomisi oleh negara-negara maju. Berdasarkan kesadaran tersebut, maka terkesan bahwa AFTA merupakan usaha ASEAN melakukan proteksi terhadap pasar regionalnya dan timbul atas perjanjian perdagangan regional yang lainnya, karena dengan adanya perjanjian perdagangan regional ini akan melemahkan sistem perdagangan multilateral. Padahal dalam ketentuan GATT sendiri mengatur tentang diperbolehkannya untuk membentuk perjanjian pedagangan regional.

Terkait dengan perjanjian atau kesepakatan dalam perdagangan bebas "*Free Trade Agreement"* atau FTA yang bilateral dan regional, sebenarnya ada sistem multilateral (WTO) yang jauh lebih baik daripada sistem-sistem yang ada dalam kerangka bilateral dan regional. Akan tetapi yang menjadi problema adalah bahwa sistem multilateral dalam kerangka WTO terhambat, macet, dan tidak berjalan dengan baik, sehingga mulailah negara-negara membentuk blok-blok perdagangan regional seperti ASEAN, AFTA, termasuk ACFTA dengan tujuan meraih keuntungan langsung. Dimana saat ini perdagangan secara regional lebih merebak, maju dan berkembang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka prinsip-prinsip pengaturan perdagangan bebas dalam kerangka ACFTA sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam ketentuan WTO. Hal ini disebabkan bahwa ketentuan dalam ACFTA tetap mengacu kepada WTO.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan tema tersebut, maka yang menjadi isu hukum dalam penulisan ini adalah **"**Bagaimana pengaturan kesepakatan perdagangan bebas Regional dalam kerangka WTO ?

Tujuan Penulisan

Ada tujuan yang sangat penting dalam penulisan ini yaitu yang untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan kesepakatan perdagangan bebas Regional dalam ketentuan WTO.

Pembahasan

a. Pengertian Kesepakatan Perdagangan Regional

Mengenai istilah regional sebenarnya sudah tercakup dalam katagori istilah kesepakatan atau perjanjian internasional dengan konsep bilateral, regional dan multilateral. Namun demikian ada baiknya pengertian tersebut dijelaskan secara harfiah. Menurut kamus hukum, pengertian bilateral. .

Regional adalah daerah, bagian dari satu daerah, mengandung arti kedaerahan atau bersifat daerah. Sedangkan regionalisme atau regionalism' adalah paham untuk mengadakan kerja sama antara negara-negara di satu kawasan misalnya negara-negara di kawasan ASEAN. Maka dengan demikian regional mengandung dua pengertian antara lain seperti daerah-daerah dalam suatu negara tertentu dan daerah-daerah atau wilayah dalam satu kawasan tertentu (misalnya negara-negara di kawasan Asia).

Dalam studi hubungan internasional, regionalisme memiliki irisan studi yang sangat erat dengan studi kawasan atau *Area Studies*. Bahkan dalam aplikasi analisis istilah regionalisme atau kawasan sering kali tumpang tindih. Oleh karena itu defenisi regionalisme akan banyak mengambil dari definisi yang berkembang dalam studi kawasan.

Menurut Mansbaach, regional adalah pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling mengutungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional. Untuk organisasi regional adalah organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara di kawasan wilayah tertentu seperti AFTA, ASEAN, APEC, EFTA, NAFTA, LAFTA dan lain-lain.

Peristiwa yang menyangkut peristiwa yang terjadi dalam satu kawasan (regional), jika disebutkan, maka akan dapat mengetahui dikawasan mana peristiwa itu berlangsung, karena telah mengetahui ciri-ciri dari suatu kawasan itu, misalnya batas wilayah, batas idiologis, atau batas wewenang hukum.

Sebagai upaya untuk memahami regionalisme, ada 5 (lima) proses berlangsungnya regionalisme yaitu, regionalisasi, kesadaran dan identitas regional, kerjasama regional antar negara, Integrasi regional yang didukung negara, dan kohesi regional.

b. Dasar Hukum Perdagangan Regional Dalam WTO

Pengaturan perdagangan regional (*Regional Trading Arrangements*) dimana satu kelompok negara sepakat untuk menghilangkan atau mengurangi rintangan-rintangan terhadap import dari sesama anggotanya dan telah berlangsung dibeberapa negara regional dunia, seperti European Union dengan pasar tunggalnya, ASEAN dengan AFTA-nya dan lain-lain GATT. Dalam Pasal 24 GATT dijelaskan bahwa mengakui adanya integrasi yang erat dalam bidang ekonomi melalui perdagangan yang lebih bebas, yaitu mengakui pengelompokan-pengelompokan regional sebagai suatu pengecualian dan aturan umum klausul prinsip umum MFN, dengan syarat dipenuhi ktriteria-kriteria tertentu secara ketat. Ketentuan GATT dimaksud agar pengaturan regional memudahkan perdagangan diantara negara-negara yang bersangkutan, tanpa menimbulkan hambatan terhadap perdagangan dengan dunia luar. Pengecualian dan aturan klausal MFN ini ada yang ditetapkan dalam pasal GATT sendiri dan sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam putusan-putusan komferensi GATT melalui suatu penanggalan (*waiver*) dan prinsip tersebut berdasarkan pasal XXV pengecualian dimaksud adalah:

1. Keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas (*frontier traffic advantage),* tidak boleh dikenakan terhadap anggota GATT,
2. Perlakuan preferensi di wilayah-wilayah tertentu yang sudah ada seperti kerjasama ekonomi dalam *British Commonwelth the French Union (*Perancis dengan negara-negara bekas koloninya) , tetap boleh terus dilaksanakan namun tingkat batas prefensinya tidak boleh dinaikkan,
3. Anggota-anggota GATT membentuk suatu *Customs Unions* atau *Free Trade Area* harus memenuhi persyaratan pasal XXIV GATT.
4. Pemberian preferensi tarif oleh negara-negara maju kepada produk impor dari negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara yang kurang beruntung (*least developed)* melalui fasilitas

sistem preferensi umum dan juga pengamanan (*safeguard rule*) yaitu upaya pemerintah untuk melindungi dan memproteksi untuk sementara waktu industri dalam negerinya.

Pada hakikatnya pengelompokan tersebut ada syaratnya, yaitu bahwa pengelompokan harus dibuat dengan maksud agar mendorong perdagangan diantara negara-negara tersebut, tanpa menimbulkan rintangan atau hambatan perdagangan terhadap negara ketiga. Dengan demikian integrasi regional seperti itu harus berfungsi sebagai pelengkap bagi sistem perdagangan multilateral, bukan sebagai ancaman terhadapnya dalam *free trade area* setiap anggota tetap menjalankan kebijaksanaan perdagangan ekternalnya, termasuk tarif terhadap non anggota. Sedangkan dalam *cutom union,* negara anggotanya melaksanakan suatu bea tarif yang seragam terhadap bukan negara anggotanya.

Ketentuan WTO juga mengatur mengenai pengecualian atas integrasi nasional, Pasal XXIV GATT 1994 (sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Understanding on Article XXIV) dan Pasal V GATS memperbolehkan anggota WTO untuk perdagangan bebas dengan lebih cepat diantara anggota-anggota tertentu yang membentuk suatu kelompok, Ketika anggota WTO membentuk, sebagai contoh, integrasi kepabeanan (*customs union*), mereka memberikan perlakuan berbeda yang lebih baik di antara mereka dalam hal perdagangan (seperti penghapusan seluruh bea masuk) yang mana tidak diberikan kepada anggota WTO lainnya yang bukan merupakan bagian dari *customs union* tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan kewajiban MFN yang terdapat dalam pasal I GATT 1994. Pengecualian atas integrasi regional dapat dijadikan dasar untuk membenarkan suatu tindakan yang melanggar kewajiban MFN tersebut atau kewajiban lainnya dalam kerangka GATT 1994 dan GATS. Dalam beberapa tahun terakhir, perjanjian integrasi regional antara anggota WTO semakin berkembang. Saat ini, terdapat sekitar 200 perjanjian perdagangan regional yang berlaku, dan angka ini kemungkinan besar akan berlipat ganda pada tahun-tahun berikutnya. Terdapat suatu kekhawiran besar karena banyaknya *customs union* dan area perdagangan bebas (*free trade areas*) (yang pada pada hakekatnya mendiskriminasi anggota WTO yang bukan bagian darinya) menimbulkan ancaman terhadap sistem perdagangan multilateral (yang berdasarkan pada prinsip non-diskriminasi).

Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan pengecualian ini: Pasal XXIV untuk perjanjian integrasi regional yang berkaitan dengan perdagangan barang, dan Pasal V untuk perjanjian integrasi regional yang berkaitan dengan perdagangan jasa, persyaratan dari kedua Pasal tersebut haruslah dipenuhi.

Suatu tindakan yang seharusnya dilarang oleh GATT 1994 dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XXIV: 5 GATT 1994:

a. jika tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pembentukan suatu *customs union,* suatu area perdagangan bebas, atau suatu perjanjian perdahuluan (*interim agreement*), yang memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam ketentuan WTO.
b. jika pembentukan *customs union* atau area perdagangan bebas tersebut akan terhambat, atau tidak dapat dilaksanakan, jika penerapan tindakan tersebut tidak diperkenankan.

Anggota WTO dapat memilih antara membentuk suatu area perdagangan bebas atau suatu *customs union.* Dalam area perdagangan bebas, integrasi yang dilakukan lebih sedikit jika dibandingkan dengan dalam

suatu *customs union.* Perdagangan internal diliberalisasikan dan perdagangan dengan negara ketiga secara bersama-sama diatur, sementara dalam area perdagangan bebas hanya perdagangan internal yang diliberalisasikan. Dalam *customs unions* dan area perdagangan bebas, dipersyaratkan penghapusan bea masuk dan hambatan perdagangan lainnya antara anggota *customs union* atau area perdagangan bebas tersebut harus mencakup seluruh perdagangan secara substansial; dan sebagai akibat dari pembangkitan *customs union* atau area perdagangan bebas tersebut, perdagangan dengan negara ketiga tidak boleh dibuat lebih sulit atau lebih terhambat. Persyaratan tambahan yang berlaku terhadap *customs union;* bea masuk dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan yang dibelakukan oleh anggota *customs union* tersebut terhadap perdagangan dengan negara ketiga harus sama secara substansial. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh sebuah *customs union* atau area perdagangan bebas bisa dilihat dalam Pasal XXIV ayat (5) dan (8) GATT 1994 dan *the* WTO *Understanding on the Interpretation of Article* XXIV. Ketentuan WTO ini juga mengatur tentang kemungkinan untuk membuat sebuah *interim agreement* (perjanjian permulaan), atau sebuah perjanjian yang mengarah, dalam priode tertentu, kepada pembentukan sebuah *customs union* atau area perdagangan bebas. Priode yang diajukan untuk membentuk *customs union* atau area perdagangan bebas tersebut, haruslah dilakukan dalam *reasonable length of time* (jangka waktu yang pantas). Menurut *Understanding on the Interpretation of Article* XXIV, jangka waktu yang pantas ini tidak boleh melebihi sepuluh tahun.

Namun dalam kedua pengelompokan ini bea dan pengaturan-pengaturan lain yang mempengaruhi perdagangan dari anggota kelompok dengan nonmembers disyaratkan untuk tidak boleh restriktif daripada yang sebelumnya diterapkan sebelum kelompok itu didirikan.

Khusus bagi negara berkembang sekitar dua pertiga negara-negara anggota GATT adalah negara-negara sedang berkembang yang masih berada dalam tahap awal pembangunan ekonominya. Untuk membantu pembangunan tersebut, pada tahun 1995, suatu bagian baru yaitu part IV, ditambahkan ke dalam GATT. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong negara-negara industri membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang. Bagian IV ini mengakui kebutuhan negara sedang berkembang untuk menikmati akses pasar yang lebih menguntungkan dan tidak membolehkan negara-negara maju membuat rintangan baru terhadap ekspor negara-negara sedang berkembang. Negara-negara industri juga mau menerima bahwa mereka tidak akan meminta balasan dalam perundingan penurunan atau penghilangan tarif daan rintangan lainnya terhadap perdagangan negara-negara berkembang.

Pada waktu Putaran Tokyo 1979 berakhir, negara-negara sepakat dan mengeluarkan putusan mengenai pemberian perlakuan yang lebih besar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dunia (*abling clause)*. Keputusan tersebut mengakui bahwa negara sedang berkembang juga adalah pelaku atau bentuk hukum yang permanen dalam sistem perdagangan dunia. Perlakuan ini juga merupakan dasar hukum bagi negara industri dalam memberikan *General System Preference* (GSP) kepada negara-negara berkembang.

c. Perkembangan Pengaturan Perdagangan Regional Dalam AFTA

Jika melihat sejarah perkembangan internasional, maka akan terlihat pada awalnya hubungan internasional itu dilakukan secara bilateral. Hubungan ini terjadi karena kedekatan wilayah dan dilakukan berdasarkan motif kepentingan nasional khusus dalam perdagangan.

Kesepakatan perdagangan secara bilateral ini dinyatakan belum memberikan hasil yang maksimal dalam hal memajukan anggotanya, karena kebutuhan antara negara yang semakin kompleks. Menguatnya regionalisme pada awal tahun 1960 menarik perhatian negara-negara untuk menguatkan kembali kerjasama regional tentunya dibidang perdagangan. Perkembangan berikutnya adalah mulai bermunculan kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian regional dalam perdagangan.

Sebelum lahirnya kesepakatan perdagangan regional, dunia internasional telah menyepakati perjanjian internasional multilateral yaitu GATT. Dalam ketentuan GATT sendiri telah mengatur tentang diperbolehkannya pembentukan perjanjian perdagangan regional dengan syarat tidak mengganggu proses liberalisasi perdagangan dan kompetensi bebas.

Dalam ketentuan kerjasama di antara negara-negara baik secara bilateral maupun regional telah lama berkembang dan makin banyak orang untuk mengadakan kerjasama internasional yang dibentuk setelah usianya perang dunia II. Namun belum semua organisasi-organisasi internasional itu menghimpun negara anggotanya ke dalam bentuk integrasi perekonomian.

Ada empat macam tahapan-tahapan atau proses integrasi ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1) Areal perdagangan bebas/*free trade area/FTA*

Yaitu proses integrasi mulai terjadi antara anggota secara interen, sesama negara anggota menghapuskan pemberlakuan tarif (bea cukai), tetapi masing-masing negara anggota tetap memberlakukan tarif sendiri-sendiri dalam perdagangan dengan negara non anggota.

2) Kesatuan pabean/*custum union*

Custum union merupakan kelanjutan dari kawasan perdagangan bebas (FTA). Selain pembebasan tarif sesama anggota, juga terhadap non anggota diperlukan tarif yang sama besarnya, kemudian penggabungan anggota ke dalam kesatuan tunggal dengan satu masalah saja yaitu administrasi bea dan cukai contoh *Central America Common Market* (CACM).

3) Pasar bersama/*commom market*

Tahap ketiga perkembangan regional dan merupakan lanjutan dari custum union. Negara anggota saling melakukan kebijakan liberalisasi arus faktor-faktor produksi sekaligus menjalankan perdagangan. Dalam hal ini tetap sama dengan *custom union* ditambah dengan penghapusan segala macam pembatasan terhadap mobilitas faktor (tenaga kerja boleh bekerja di tempat lain).

4) Integrasi ekonomi sepenuhnya/*economic union*

Yaitu merupakan bentuk integrasi yang paling sempurna dan semua negara anggota telah menyatukan serta mengharmonisasikan kebijakan ekonomi nasionalnya dan bahkan diikuti dengan kebijakan social. Suatu lembaga Supra Nasional untuk mengatur ekonomi dengan berbagai kaitannya seperti moneter, perpajakan, fiscal, sosial, industri, perdagangan, pertanian dan sebagainya

d. Berlakunya Perdagangan Bebas ACFTA

Dasar hukum perjanjian ACFTA adalah *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China,* yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia (Megawati) pada tanggal 4 Novenber 2002 di Phnom Penh,

Kamboja, dan telah diratifikasi oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

Dengan demikian dasar hukum penandatanganan dan pemberlakuan perjanjian ACFTA mengacu kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 11 UU No. 24 tahun 2000 dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 dilakukan dengan Keputusan Presiden. Maka dalam konteks pasal 11 ini secara tegas dan meyakinkan bahwa pengesahan perjanjian internasional ACFTA yang termasuk katagori perdagangan dilakukan melalui Kepres, sehingga ratifikasi ACFTA adalah sah secara hukum.

Kemudian secara berturut-turut terjadi perkembangan negosiasi di mana secara formal ACFTA pertama kali ada pada saat ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism* 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Kemudian persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi, 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Oleh karena itu telah disahkannya ACFTA secara formal, maka Indonesia perlu untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang diperjanjian dalam ACFTA, dimana pada pokoknya dalam 10 tahun akan dikuatkan kerjasama ekonomi antara China dan Asean dengan melakukan berbagai strategi yang diharapkan dapat menguatkan kerjasama ekonomi tersebut.

Pasca berdirinya perdagangan bebas kawasan tertentu di beberapa wilayah seperti yang dimulai di Uni Eropa, North America Free Trade Area (NAFTA) serta tidak terlepas dari ketentuan WTO (World Trade Organization), trend baru ini kemudian menjadikan meningkatnya Regional Free Trade Area di wilayah lainnnya, termasuk AFTA, ACFTA, APEC dan lain-lain dimana perdagangan bebas regional ini berdiri di akhir tahun 1960-an.

Tidak hanya itu, perdagangan bebas menjadi daya tarik sendiri dalam usaha menciptakan pasar bebas lebih luas lagi, sehingga negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, India, dan Arab Saudi menggandeng kawasan-kawasan agar dapat menjalin kerjasama perdagangan bebas, sebagai basis pasar (*market*) untuk mendapatkan keuntungan ekonomi negara anggota. Perdagangan bebas ini menjadi trend di negara-negara besar dalam rangka menyaingi pasar milik AS dan Uni Eropa yang sangat besar.

Asean-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat antara negara-negara ASEAN dengan China. ACFTA ini dirancang sebagai kerjasama perdagangan antara kedua belah pihak dengan menghilangkan atau mengurangi batasan-batasan seperti penerapan non tarif, peningkatan akses pasar jasa, penentuan dan ketentuan arus investasi, peningkatan kerjasama ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan diantara kedua belah pihak.

Simpulan

Berdasarkan uraian dan perjelasan tersebut, maka untuk memperinci rangkuman dari apa yang telah diuraikan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut, bahwa pembentukan kesepakatan perdagangan bebas regional dalam kerangka World Trade Organization (WTO) adalah dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal XXIV GATT tentang diperbolehkannya pembentukan kerjasama regional dibidang perdagangan. Namun

demikian dipersyaratkan bahwa pembentukan perjanjian perdagangan regional tersebut tidak boleh menjadi rintangan bagi perdagangan multilateral. Pembentukan kesepakatan perdagangan bebas regional pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip MFN. Dalam hal ini terdapat beberapa pengecualian terhadap prinsip MFN berdasarkan ketentuan GATT. Pengecualian dan aturan klausal MFN ini ada yang ditetapkan dalam pasal GATT sendiri dan sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam putusan-putusan komferensi GATT melalui suatu penanggalan (*waiver*), misalnya keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas (*frontier traffic advantage),* tidak boleh dikenakan terhadap anggota GATT, perlakuan preferensi di wilayah-wilayah tertentu secara regional, tetap boleh terus dilaksanakan namun tingkat batas prefensinya tidak boleh dinaikkan, anggota-anggota GATT membentuk suatu *Customs Unions* atau *Free Trade Area* harus memenuhi persyaratan pasal XXIV GATT, tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lainnya, pemberian prefensi tarif oleh negara-negara maju kepada produk impor dari negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara yang kurang beruntung (*least developed)* melalui fasilitas sistem preferensi umum.

Daftar Pustaka

Administrator, *KTT ASEAN dan Penyelesaian ACFTA*, http://sinandikahukum.wordpress.com/2010/06/09/ktt-asean-dan-penyelesaian-sengketa.

Administrator, *Menyiasati ACFTA*, http://www.berita-Indonesia.com/ekonomi/menyiasati -acfta.

Administrator, " Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) Dalam Kerangka WTO", http://sinandikahukum.wordpress.com/2009/03/01/perjanjian-perdagangan-regional-rta-dalam-kerangka-world-trade-organization-wto-study,

Adolf. Huala, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005

_____, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, 2006

_____, *Hukum Perdagangan Internasional Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan,* Jakarta: BP.IBLAM, cetakan I, 2005

Kansil, SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1979

_____, dan Cristine S.t. Kansil, SH,MH, *Modul Hukum Internasional*, (Jakarta: Djambatani, 2002

Kartadjoemena, H.S, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: UI Press 1997

_____, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyesaian Sengketa,* Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 1998.

M.S. Sutiarnoto, Tantangan dan Peluang investasi Asing, Jurnal Hukum, Vol. 6, 2001

_____, Diktat Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Medan: Sekolah Pasca sarjanan USU, 2005), hal.4

Nuraeni, Silvya, Deasy dan Sudirman, Arifin, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional,* Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Sudradjat, Eko Prilianto, " Free Trade dan Fair Trade Dalam Konsep Hukum", http://Whatbecomethegreaterne.blogspot.com/2007/12/konsep-hukum-fair-trade.html http://www./indosiar.com//ohas/83715/china-bergabung-dalam-afta.

PENINGKATAN PERAN GURU DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA

Fatiziduhu Zega, S.Pd.[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan peran guru dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tinjauan literatur. Pembahasan pada penelitian ini didasarkan pada pendapat-pendapat ahli dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang bermutu dan berkesan sepanjang hayat oleh siswa adalah pembelajaran yang berarti bagi pembelajarnya, yaitu siswa. Guru sebagai manusia dewa harus memperlakukan siswa dengan baik. Kebutuhan siswa sangat perlu diketahui oleh guru. Berhasiltidaknya sebuah pembelajaran tergantung dari pendekatan yang digunakan guru, materi/ kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa, dan sarana prasarana untuk pembelajaran.

Kata kunci : *peran guru* dan *kegiatan pembelajaran*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Secara kuantitatis pembangunan pendidikan di Indonesia, khususnya jenjang pendidikan dasar dan sekolah menengah, menunjukkan keberhasilan yang impresif. Sayangnya keberhasilan kuantitatis yang mengesankan itu belum dibarengi dengan keberhasilan yang bersifat kualitatif.

Penanda ini antara lain dapat dipelajari dalam laporan peringkat HDI tahun 1996 Indonesia peringkat 102 dari 174 negara, tahun 1999 peringkat 105 dari 174 negara, tahun 2000 peringkat 109 dari 174 negara. Begitu juga dalam prestasi belajar yang dipantau oleh International Association for the Evaluation of Education Achievment di bidang membaca SD, Indonesia berada di urutan 26 dari 27 negara; kemampuan Matematika siswa SMP ada diurutan ke-34 dari 38 negara; kemampuan di bidang IPA untuk SMP ada diurutan ke-32 dari 38 negara.

Ada dua alasan klasik yang sering dikemukakan untuk menjelaskan capaian kualitas pendidikan yang kurang menggembirakan itu, yaitu tingkat kesejahteraan yang berkaitan dengan kompetensi guru dan ketimpangan dalam persebaran penugasannya, baik dalam arti disparitas kuantitatif maupun ketidaksesuaian bidang keahlian dengan tugas. Kedua alasan tersebut memang benar sehingga perlu diupayakan pengatasannya oleh berbagai pihak. Menurut DYP Sugiharto dalam makalah yang berjudul *Memformulasikan Kerangka Pikir tentang Strategi Pembelajaran dan manajemen Sekolah* ada alasan yang krusial yang menyebabkan pembelajaran kurang bermakna, yaitu strategi pembelajaran di sekolah masih terpaku pada paradigma penerusan informasi yang hanya melibatkan berpikir tingkat rendah (low cognitive skills) yaitu menghafal.

Kondisi pembelajaran di sekolah terpuruk dalam keadaan “kurang gizi” yang antara lain ditandai oleh siswa tidak senang belajar, tidak mau belajar, tidak tahu mau belajar apa, tidak memiliki hasil belajar yang memadai, dan tidak dapat menggunakan hasil belajar yang mereka peroleh. Lingkungan sekolah dan pengajaran tidak berhasil membawa siswa ke dalam suasana belajar dengan motivasi yang tinggi sehingga menciptakan kondisi belajar yang benar-benar bermanfaat (meaningful learning). Kegiatan belajar justru menjadi beban bagi siswa sehingga mereka berusaha menjauhinya atau mencari jalan pintas dengan menyontek atau cara-cara lain yang tidak benar.

[1] *Pengawas Sekolah Binaan SMPN 1.2.3*

Kebijakan pemberlakuan KBK yang kemudian ditindaklanjuti dengan KTSP sebenarnya cukup menjajanjikan, karena menuntut perubahan kerangka berpikir dalam penerapannya sehingga benar-benar membuahkan penguasaan kompetensi yang ditargetkan. Namun kenyataannya kerangka pikir penerus informasi masih saja tetap melekat seperti kotak hitam yang misterius.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pengembangan kemandirian peserta didik sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan fisik, psikis, dan emosinya dalam suatu lingkungan interaksi dengan orang dewasa (Rudini, 1994: 1). Kenyataan di lapangan bukannya kemandirian yang dihasilkan tetapi justru peserta didik yang telah tamat di satuan pendidikan tidak menghasilkan lapangan pekerjaan. Lulusan satuan pendidikan justru mencari lapangan pekerjaan bahkan sangat ironis meminta-minta pekerjaan.

Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor. Satu di antara faktor penyebab lulusan satuan pendidikan tidak berdaya menghadapi persoalan hidup adalah rendahnya kualitas pendidikan yang dihasilkan olah satuan pendidikan. Menurut Prof. Dr. Dandan Supratman, M.Pd. (2007: iii) persoalan pokok yang dihadapi masa depan pendidikan adalah persoalan mentalitas pengelola kependidikan dalam menghadapi: keberagaman watak, rendahnya tingkatkatan kreatif, moral tak punya malu, daya juang hilang, motivasi berprestasi tipis, toleransi lupa, kerjasama malas, santung dianggap tak perlu, anutan ala primitive, gaya hidup konsumtif, yang utama dipuja adalah duit, kendali bangsa: Pancasila tinggal nama.

Pendidikan nasional menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembelajaran bahasa Indonesia kelihatannya masih jauh dari harapan. Indikatornya adalah setelah menyelesaikan pembelajaran di satuan pendidikan respon siswa menunjukkan ketidaksenangannya belajar bahasa Indonesia. Siswa merasa bosan yang diajarkan hanya itu-itu saja. Metode mengajar dari guru juga monoton. Materi pembelajaran tidak ada hubungannya dengan dunia yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri. Pada akhirnya pembelajaran kehilangan arah dari segi guru, kontens, dan makna.

1.2. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan peran guru dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tinjauan literatur. Pembahasan pada penelitian ini didasarkan pada pendapat-pendapat ahli dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

2. Uraian Teoritis

2.1. Pembelajaran Pendidikan

Pembelajaran di sekolah bersifat integratif, materi yang dibelajarkannya merupakan akumulasi sejumlah disiplin ilmu sosial (Martorella, 1985). Pembelajaran pun lebih menekankan aspek "pendidikan" daripada

"transfer-konsep", karena melalui pembelajaran siswa diharapkan memahami sejumlah konsep, dan melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Hakikat belajar adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku pada diri individu yang belajar. Perubahan tingkah laku terjadi karena usaha individu yang bersangkutan. Belajar mempengaruhi oleh berbagai faktor, yakni bahan yang dipelajari, faktor-faktor instrumental, faktor-faktor lingkungan, dan kondisi individual si pelajar (Depdikbud, 1983).

Percival dan Ellington (1984) menggambarkan model sistem pendidikan dalam proses belajar, bahwa masukan untuk sistem belajar terdiri atas orang, informasi, dan sumber lainnya. Sedangkan keluarannya berupa siswa dengan penampilan yang lebih maju dalam berbagai aspek. Di antara masukan dan keluaran terdapat kotak hitam yang berupa proses pembelajaran atau pendidikan. Reigeluth (1983) secara lebih spesifik menyoroti tentang variabel-variabel pembelajaran yang meliputi tiga komponen: metode, kondisi, dan hasil-hasil. Metode merupakan cara menyampaikan isi pesan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi pembelajaran mencakup karakteristik siswa, lingkungan belajar, bahan pembelajaran dan tujuan kelembagaan. Sedangkan hasil-hasil pembelajaran menggambarkan apa atau seberapa jauh tujuan-tujuan pembelajaran telah dicapai.

Pembelajaran sebagai suatu proses, menurut Surya (1982) melandaskan diri kepada prinsip-prinsip: (1) sebagai usaha memperoleh perubahan tingkah laku; (2) hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan; (3) merupakan suatu proses; (4) terjadi karena adanya sesuatu pendorong dan tujuan yang akan dicapai; dan (5) merupakan bentuk pengalaman.

Sedangkan ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar, meliputi perubahan intensional, perubahan positif dan aktif, perubahan efektif dan fungsional (Surya, 1982). Perubahan intensional mengandung konotasi bahwa siswa menyadari akan adanya perubahan yang dialami atau sekurang-kurangnya ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan bersifat positif, artinya bermanfaat dan sesuai dengan harapan. Juga berarti bahwa perubahan itu senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang baru dan lebih baik daripada yang telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan aktif berarti bahwa perubahan itu terjadi tidak dengan sendirinya, tetapi lebih karena usaha siswa itu sendiri. Sedangkan perubahan yang bersifat efektif artinya berdayaguna, membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Bersifat fungsional artinya bahwa hasil dari perubahan itu relatif menetap, dan setiap saat apabila dibutuhkan, perubahan itu dapat direproduksi dan dimanfaatkan.

Kombinasi antar-variabel pembelajaran, khususnya karakteristik siswa dan metode yang digunakan, akan menghasilkan keluaran berupa siswa dengan ketiga bentuk perubahan tadi yang mencakup ranah-ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik (Bloom, 1974) sebagai akibat pengalaman belajar. Untuk mengukur efektivitas metode tertentu dihubungkan dengan karakteristik siswa, dapat dilakukan dengan cara mengukur penampilan siswa setelah belajar.

2.2. Kemampuan Dasar Profesional Guru

Pendekatan kemampuan dalam pendidikan jabatan guru pada dasarnya menunjuk pada proses berpikir dan bekerja yang teratur dan mengacu sistem di dalam perancangan dan pelaksanaan program. Dengan demikian

program memiliki ketanggapan terhadap tuntutan masa kini dan kepekaan atas kondisi masa depan, karena program buka saja dilatari apa yang diketahui tentang individu dan masyarakat serta kaitan antara keduanya, akan tetapi juga diacu atas citra tentang manusia dan masyarkat yang dikehendaki yang menyiratkan kebutuhan masa depan. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kemampuan dalam pendidikan guru merupakan peletakan salah satu dari dua pilar utama yang menopang profesi yaitu keterandalan layanannya kepada masyarakat, yang merupakan prasyarat bagi pilar yang lain yaitu pengakuan serta pengharagaan layanan tersebut oleh masyarakat dan pemerintahan.

Walaupun jaringan gagasan yang membentuk sosok pendekatan kemampuan agaknya cukup mantap karena sepenuhnya dapat dipulangkan kepada latar kebudayaan, kemasyarakatan dan kelembagaan Indonesia, akan tetapi sebagai gagasan yang rumit, penyelenggaraan pendidikan di lapangan memerlukan penemuan bentuk yang memakan waktu, dan membutuhkan penanganan terpadu dan berkesinambungan dari berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan, termasuk kelompok profesi itu sendiri.

Program PGBK (Pendidikan Guru Berdasarkan Kemampuan) bertolak dari perangkat kemampuan yang diperkirakan dipersyarakatkan bagi pelaksanaan tugas-tugas keguruan yang telah ditetapkan bermuara pada peragaan penguasaan perangkat kemampuan tersebut oleh siswa calon guru setelah mengikuti sejumlah pengalaman belajar.

Perangkat kemampuan dimaksud termasuk proses pencapaian oleh asumsi-asumsi, pernyataan yang dianggap benar, baik atas dasar bukti-bukti empirik, dugaan ahli, maupun nilai-nilai masyarakat berdasarkan Pancasila. Asumsi-asumsi dimaksud mencakup tiga bidang yaitu yang berkenaan dengan hakikat-hakikat manusia, masyarakat pendidikan, subjek didik, guru, belajar-mengajar, dan kelembagaan.

2.3. Permasalahan Pendidikan Sebagai Suatu Sub-Sistem

Sebagai salah satu sub-sistem di dalam sistem negara/ pemerintahan, maka keterkaitan pendidikan dengan sub-sistem lainnya diantaranya ditunjukan sebagai berikut: Pertama, berlangsungnya sistem ekonomi kapitalis di tengah-tengah kehidupan telah membentuk paradigma pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yang harus disertai dengan adanya sejumlah pengorbanan ekonomis (biaya) oleh rakyat kepada negara. Pendidikan dijadikan sebagai jasa komoditas, yang dapat diakses oleh masyarakat (para pemilik modal) yang memiliki dana dalam jumlah besar saja.

Hal ini dapat dilihat dalam UU Sisdiknas No.20/2003 Pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan bahwa (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Sedangkan dalam pasal 54 disebutkan pula (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, terlihat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional saat ini akan dialihkan dari negara kepada masyarakat dengan mekanisme BHP (lihat RUU BHP dan PP tentang SNP No.19/2005) yaitu adanya mekasnisme Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada tingkat SD-SMA dan Otonomi Pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi. Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.

2.4. Guru dalam Kegiatan Pembelajaran Bahasa

Guru memegang peranan penting dalam sistem dan proses pendidikan manapun. Kendati dewasa ini konsep CBSA telah banyak dikumandangkan dan dilaksanakan dalam proses belajar-mengajar di sekolah dan juga Kurikulum 1994 guru tetap menempati kedudukannya tersendiri. Hal itu sejalan dengan pendapat Hamalik (1990) yang menyatakan bahwa siswa hanya mungkin belajar dengan baik jika guru telah mempersiapkan lingkungan positif bagi siswa untuk belajar.

Profesionalisme guru sangat menentukan keberasilan belajar siswa. Menurut Hamalik (1990), profil kemampuan dasar guru mencakupi:

(1) Kemampuan menguasai bahan,
(2) Kemampuan mengelola program belajar-mengajar,
(3) Kemampuan mengelola kelas,
(4) Kemampuan menggunakan media dan sumber;
(5) Kemampuan menguasai landasan pendidikan,
(6) Kemampuan menilai prestasi belajar siswa,
(7) Kemampuan mengelola interaksi belajar-mengajar, dan sebagainya.

Bagi guru BI, kemampuan di atas belumlah cukup. Guru dituntut pula memiliki keterampilan berbahasa sebab guru sering dijadikan contoh dalam pemakaian bahasa bagi para siswanya. Dalam hubungan ini, Lado (1979) mengemukakan bahwa guru bahasa dituntut memiliki kemahiran berbahasa, pengetahuan bahasa, pemahaman budaya, dan pemahaman tentang teknik pengajaran bahasa.

3. Pembahasan

Guru dalam mengajarkan bahasa ada dua model yaitu menjelaskan sesuatu kepada peserta didik, melatihkan sesuatu kepada siswa, dan melibatkan siswa di dalam suatu kegiatan berbahasa. (Purwo, 1997: 19) Model pembelajaran ini mempunyai berbagai dampak bagi siswa. Pembelajaran dengan model yang pertama, yaitu guru menjelaskan sesuatu kepada siswa akan menyebabkan siswa lupa. Potensi untuk lupa akan terjadi karena guru tidak memberikan pengalaman belajar kepada siswa.

Pembelajaran dengan model yang kedua, yaitu guru melatihkan sesuatu kepada siswa menuntut siswa tekun mengulang-ulang mengerjakan bahan ajar sampai berkali-kali. Apabila siswa setelah diberi latihan berkali-kali masih saja belum bisa, guru terus saja melatihkan bahan yang sama itu. hasil yang diharapkan dapat diraih dari latihan secara bertubi-tubi ini ialah supaya siswa akhirnya dapat menguasai bahan yang disiapkanguru. Bahan yang disiapkan oleh guru secara rapi dan sistematis itu, melalui banyak kali latihan, akhirnya akan dapat diingat dan melekat di benak siswa. Namun kegiatan latihan yang bertubi-tubi seperti ini dirasa membosankan tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi guru.

Guru yang melibatkan siswa untuk melakukan kegiatan berbahasa hanyalah berperan sebagai fasilitator pembuka jalan atau penyulut api saja bagi suatu kegiatan tertentu. Siswalah yang aktif menjalankan kegiatan ini. Model ini akan membawa dampak yang bagus pada diri siswa, yaitu siswa lebih memahami, mendalami, dan mampu menerapkan dalam berbagai situasi. Hal ini terjadi karena siswa diberi pengalaman belajar dan ruang yang sangat luas untuk mengekspresikan pembelajaran.

Dalam model guru melibatkan siswa untuk melakukan kegiatan berbahasa tidak menenkankan pada hasil kegiatan tetapi lebih memntingkan proses mengalami sendiri kegiatan berbahasa tersebut. Guru tidak terpaku pada bahan yang dipersiapkan sebelumnya tetapi siap untuk menyesuaikan diri dengan minat kebutuhan siswa dan keadaan kelas. Dengan model pembelajaran yang ketiga ini dirasa pembelajaran lebih berhasil dan berarti bagi siswa dalam mengembangkan segala kemampuan dalam dirinya. Model ini lebih dikenal dengan pendekatan komunikatif.

Dengan bentuk pembelajaran komunikatif yang diberikan siswa pembelajaran tidak berpusat pada guru. Siwa dilibatkan secara penuh dalam pembelajaran berbahasa. Bentuk seperti ini sudut pandang diambil dari segi siwa, bukan dari segi guru. Penyampaian bahan, penetapan teknik mengajar misalnya dilakukan bukan dengan berpijak dari sudut pandang guru, melainkan dari sudut pandang siswa. Siswa merupakan pusat atau kiblat, dan arah itu segala pertimbangan guru ditetapkan.

Menurut Bambang Kaswanti Purwo menempatkan siswa berarti memperhitungkan bahwa masing-masing siswa memiliki potensi dan latar belakang yang berbeda-beda. Menempatpusatkan siswa berarti mempertimbangkan bahwa memberi siswa sesuatu tidak senantiasa berarti bahwa yang diberikan itu cocok dan dapat diterima oleh yang diberi. Misalnya guru dapat dan memang harus mempersiapkan apa yang akan disajikan di kelas. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya di kelas guru harus siap untuk tidak terlalu ketat mengikuti rancangan mengajarnya. Guru harus siap mengubah rencana mengajarnya begitu melihat rancangan tidak seuai dengan situasi siswa saat itu.

Yang dititikberatkan guru bukan mengejar habisnya bahan pelajaran melainkan sudahkah kompetensi yang diberikan kepada siswa sudah tercerna dengan baik. Untuk itu diperlukan kepekaan guru untuk membaca kebutuhan, kemampuan, dan daya tangkap siswa, lalu berusaha untuk memenuhi.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Pembelajaran yang bermutu dan berkesan sepanjang hayat oleh siswa adalah pembelajaran yang berarti bagi pembelajarnya, yaitu siswa. Guru sebagai manusia dewa harus memperlakukan siswa dengan baik.

Kebutuhan siswa sangat perlu diketahui oleh guru. Berhasiltidaknya sebuah pembelajaran tergantung dari pendekatan yang digunakan guru, materi/kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa, dan sarana prasarana untuk pembelajaran.

4.2. Saran

Guru sebelum melakukan tugas dalam pembelajaran sebaiknya menanyakan atau menginventaris kebutuhan siswa. Kebuthan siswa inilah yang akan menjadi bagian analisis guru dalam membuat rencana pembelajaran. Kebermaknaan dalam pembelajaran perlu dionjolkan agar pembelajaran berbahasa dapat berjalan dengan baik. Selain itu pembelajaran diarahkan pada suasana yang menggembirakan.

Daftar Pustaka

Mulyasa, E. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.`

Mustakim. 2007. *Keefektivan Model STAD dan Jigsaw pada Pembelajaran Menyunting Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Mertoyudan Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2006/2007*.Tesis. Semarang: Program Pascasarjana UNNES.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi

Purwo, Bambang Kaswanti. 1997. Pokok-Pokok Pengajaran Bahasa dan Kurikulum1994: Bahasa Indonesia

Rahadi, Aristo. 2003. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Depdiknas.

Rudini dkk.. 1994. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II: Kurikulum untuk Abad ke-21*. Jakarta: PT Grasindo.

Sadiman, Arief S. 1986. *Media Pendidikan:Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. Jakarta: CV Rajawali.

Sanjaya, Wina. 2006. *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana

Subana, M. *Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia: Berbagai Pendekatan, Metode Teknik, dan Media Pengajaran*. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiharto, DYP. *Memformulasikan Kerangka Pikir tentang Strategi Pembelajaran dan Manajemen Sekolah*. Makalah. Semarang. UNNES.

Suprayekti. 2003. *Interaksi Belajar Mengajar*. Jakarta: Depdiknas.

Supriadi, Dedi. 1999. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.

Tim Pengembang MKDK IKIP Semarang. 1989. Psikologi Belajar. Semarang: IKIP Semarang Press.

Winarno. 2003. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Depdiknas.

ANALISIS PENGARUH SOSIAL EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN MASYARAKAT PETANI DI KECAMATAN HILI SERANGKAI

Orani Zebua, SE, MSc[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor sosial ekonomi (modal, umur, luas lahan, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan) terhadap kemiskinan masyarakat petani di daerah penelitian. Penelitian dilakukan di Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan prosedur Simple Random Sampling yaitu suatu teknik sampling yang dipilih secara acak. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 10 % dari populasi sehingga diperoleh 41 KK petani sebagai sampel penelitian. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak modal (X_1), umur (X_2), luas lahan (X_3), tingkat pendidikan (X_4) dan jumlah tanggungan (X_5) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani (Y). Secara parsial modal (X_1) dan luas lahan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani, tetapi umur (X_2), tingkat pendidikan (X_4) dan jumlah tanggungan (X_5) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani.

Kata kunci : *sosial ekonomi, petani* dan *kemiskinan*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi ketidakmerataan pembangunan antar daerah adalah pengurangan kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dapat digambarkan melalui pendapatan nyata perkapita, sedangkan mutu kehidupan tercermin dari tingkat dasar konsumsi yang meliputi unsur pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan dengan tujuan mempertahankan derajat hidup manusia secara wajar. Pendapatan perkapita merupakan rata-rata pendapatan untuk setiap individu atau untuk setiap anggota keluarga yang diperoleh dengan membandingkan rata-rata pendapatan rumah tangga perbulan dengan jumlah anggota keluarga pada suatu wilayah tertentu. Semakin tinggi pendapatan yang diterima, semakin tinggi daya beli penduduk, dan kemampuan yang bertambah ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Masalah kemiskinan merupakan persoalan pokok bangsa Indonesia yang selalu menjadi prioritas pemerintah dan menjadi agenda rutin dalam Rencana Pembangunan Nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan yang cenderung menurun secara melambat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa strategi penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal. Hal ini tergambar dari belum meratanya pembangunan antar daerah di Indonesia. Meskipun demikian, permasalahan kemiskinan memang tidak dapat teratasi dengan mudah, karena kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya mencakup sisi ekonomi, tetapi juga sisi sosial dan budaya.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers *dalam* Chriswardani Suryawati, (2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu

[1] *Dosen Tetap Yayasan IKIP Gunung Sitoli*

intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Menurut BPS (2012), seseorang masuk dalam kriteria miskin jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan.

Penanggulangan atau pengurangan jumlah penduduk miskin telah lama menjadi agenda dan prioritas pembangunan nasional. Berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan baik dalam skala nasional maupun lokal. Selama ini kebijakan dan strategi pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut dilakukan melalui pelaksanaan proyek dan atau program yang seringkali penyaluran dan pembinaan sumber dananya sangat terbatas. Sedangkan kebutuhan masyarakat akan sumber dana melalui bank konvensional tidak terakomodir dikarenakan persyaratan dan prosedur tidak bisa diakses masyarakat miskin.

Menurut BPS (2012), penetapan penghitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah Rp 259.520 perkapita perbulan. Penetapan angka Rp 259.520 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan di gunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut Sajogyo (2002), tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan (Criswardani Suryawati, 2005).

Kabupaten Nias merupakan salah satu kecamatan di Sumatera Utara yang masih tertinggal pembangunan ekonominya khususnya Kecamatan Hili Serangkai. Menurut data BPS (2017) bahwa jenis tanaman pangan yang diusahakan di Kecamatan Hili Serangkai terdir dari 2 jenis tanaman yaitu ubi kayu dan ubi jalar, sedangkan tanaman perkebunan terdiri dari karet dan coklat. Pada umumnya mata pencaharian masyarakat di desa Payung adalah bertani. Masyarakat di desa ini masih banyak yang tergolong miskin yang dicirikan dicirikan dengan tidak punya rumah, tidak punya lahan garapan atau tanah dan masih rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di daerah ini adalah faktor yang paling utama dari penyebab kemiskinan karena masih banyak anak-anak dari warga tidak bersekolah. Disamping itu tingkat pendapatan petani di desa tersebut masih tergolong rendah, sehingga hanya dapat mencukupi kebutuhan primer.

Masyarakat pedesaan memiliki mata pencaharian dari pertanian, sehingga faktor-faktor yang berhubungan dengan pertanian lebih mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat petani terdiri dari : modal, umur, luas lahan, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan. Dari uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang analisis pengaruh sosial ekonomi terhadap kemiskinan masyarakat petani di Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor sosial ekonomi (modal, umur, luas lahan, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan) terhadap kemiskinan masyarakat petani di daerah penelitian.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara *purposive sampling* yaitu mengambil sampel secara sengaja, dengan catatan sampel tersebut representatif atau mewakili populasi. Adapun alasan dipilihnya Kecamatan Hili Serangkai ini sebagai daerah penelitian karena daerah ini tingkat kemiskinan penduduk yang masih tinggi.

Penelitian ini menggunakan prosedur *Simple Random Sampling* yaitu suatu teknik sampling yang dipilih secara acak. Cara metode ini dapat dilakukan jika analisa penelitian bersifat diskriptif atau bersifat umum. Setiap unsur populasi harus memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai responden. Populasi penduduk miskin di Kecamatan Hili Serangkai berjumlah 410 KK. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 10 % dari populasi sehingga diperoleh 41 KK petani sebagai sampel penelitian.

Untuk mengetahui pengaruh modal, umur, luas lahan, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan terhadap kemiskinan masyarakat petani digunakan uji korelasi *Rank Spearman* (*rs*) yang didukung dengan program SPSS versi 20.

2. Uraian Teoritis

2.1. Kemiskinan

Kemiskinan dapat dicirikan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga Negara (Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN). Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers *dalam* Chriswardani Suryawati (2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Chriswardani Suryawati, 2005). Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Menurut Nasikun *dalam* Chriswardani Suryawati (2005), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

a. *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
b. *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani sekala besar dan berorientasi ekspor.
c. *Population growth*, prespektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan seperti deraet hitung.
d. *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
e. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
f. *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
g. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
h. *Exploatif inetrmediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
i. *Inetrnal political fragmentation and civil stratfe*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
j. *International process*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

2.2. Ukuran Kemiskinan

Menurut BPS (2013), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang

berada di lapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Menurut Sayogyo, tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan (Criswardani Suryawati, 2005).

Kriteria kemiskinan di daerah pedesaan:

a. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
b. Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Kriteria kemiskinan di daerah perkotaan:

a. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
b. Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin (Criswardani Suryawati, 2005).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur kemiskinan berdasarkan dua kriteria (Criswardani Suryawati, 2005), yaitu:

a) Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit.
b) Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter per segi per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan.

2.3. Sumber-Sumber Kemiskinan

Menurut Sharp *et al*. (2000), kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu :

1). Rendahnya kualitas angkatan kerja.

Penyebab terjadinya kemiskinan adalah rendahnya kualitas angkatan kerja (SDM) yang dimiliki oleh suatu Negara, biasanya yang sering menjadi acuan tolak ukur adalah dari pendidikan (buta huruf). Semakin tinggi angkatan kerja yang buta huruf maka semakin tinggi juga tingkat kemiskinan yang terjadi pada masyarakat.

2). Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal.

Terbatasnya modal dan tenaga kerja menyebabkan terbatasnya tingkat produksi yang dihasilkan sehingga akan menyebabkan kemiskinan.

3). Rendahnya masyarakat terhadap penguasaan teknologi.

Pada jaman era globalisasi seperti sekarang menuntut seseorang untuk dapat menguasai alat teknologi. Semakin banyak seseorang tidak mampu menguasai dan beradaptasi dengan teknologi maka akan menyebabkan pengangguran, hal ini awal mula kemiskinan terjadi. Semakin banyak jumlah pengangguran maka semakin tinggi potensi terjadi kemiskinan.

4). Penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Penduduk yang tinggal dinegara berkembang terkadang masih jarang memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada. Sebagai contoh masyarakat di desa untuk memasak lebih cenderung menggunakan kayu bakar dari pada menggunakan gas yang lebih banyak digunakan pada masyarakat perkotaan.

5). Tingginya pertumbuhan penduduk.

Menurut teori Malthus, pertumbuhan penduduk sesuai dengan deret ukur sedangkan untuk bahan pangan sesuai dengan deret hitung. Berdasarkan hal ini maka terjadi ketimpangan antara besarnya jumlah penduduk dengan minimnya bahan pangan yang tersedia. Hal ini merupakan salah satu indikator penyebab terjadinya kemiskinan.

Menurut Kuncoro (2000) kemiskinan dapat disebabkan oleh :

a) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal.
b) Kemiskinan muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga akan mempengaruhi terhadap produktifitas dan pendapatan yang diperoleh.

3. Pembahasan

3.1. Pengaruh Sosial Ekonomi terhadap Kemiskinan Masyarakat Petani di Daerah Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *SPSS 20 for windows*. Analisis masing-masing variabel dijelaskan dalam uraian berikut :

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1069559.991	2336337.525		.458	.650
	Modal	1.952	.109	.886	17.863	.000
	Umur	-16996.182	33458.509	-.030	-.508	.615
	Luas_lahan	1367270.556	646632.171	.102	2.114	.042
	Pendidikan	32856.829	144336.419	.010	.228	.821
	Jlh_tangungan	301881.973	242961.034	.068	1.243	.222

a. Dependent Variable: Pendapatan

Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda menunjukkan bahwa :

a. Koefisien X_1 (modal) sebesar 1,952 yang menunjukkan hubungan positif, artinya jika modal mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pendapatan naik sebesar 1,952 satuan.
b. Koefisien X_2 (umur) sebesar 16.996,182 yang menunjukkan hubungan negatif, artinya jika umur mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pendapatan naik sebesar 16.996,182 satuan.
c. Koefisien X_3 (luas lahan) sebesar 1.367.270,556 yang menunjukkan hubungan positif, artinya jika luas lahan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pendapatan naik sebesar 1.367.270,556 satuan.

d. Koefisien X_4 (pendidikan) sebesar 32.856,829 yang menunjukkan hubungan positif, artinya jika pendidikan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pendapatan naik sebesar 32.856,829 satuan.

e. Koefisien X_5 (jumlah tanggungan) sebesar 301.881,973 yang menunjukkan hubungan positif, artinya jika jumlah tanggungan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pendapatan naik sebesar 301.881,973 satuan.

Untuk mengetahui pengaruh umur, luas lahan, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan terhadap pendapatan petani dilakukan dengan uji regresi linier berganda. Besarnya pengaruh modal, umur, luas lahan, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan terhadap pendapatan dapat dilihat dari koefisien determinasi seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Koefisisen Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.983[a]	.966	.961	1.33559E6

a. Predictors: (Constant), Jlh_tangungan, Luas_lahan, Pendidikan, Modal, Umur

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa koefisien Adjusted R Square sebesar 0,961 menunjukkan bahwa pendapatan petani dipengaruhi oleh modal, umur, luas lahan, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan. Pengaruh modal, umur, luas lahan, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan terhadap pendapatan usahatani sebesar 96,10 % dan sisanya sebesar 3,90 % dipengaruh oleh faktor lain di luar penelitian ini. Modal yang semakin besar dapat menyediakan sarana produksi yang lebih banyak, sehingga produktivitas usahatani semakin meningkat. Umur petani yang masih muda akan lebih produktif karena memiliki tenaga yang lebih besar, sedangkan umur petani yang semakin tua dapat mengurangi produktivitas. Lahan yang semakin luas dapat meningkatkan produksi usahatani dan jika diikuti oleh tingkat pendidikan petani yang semakin tinggi maka pengelolaan usahatani menjadi lebih baik sehingga produksi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Peningkatan produksi akan meningkatkan pendapatan usahatani. Demikian juga halnya dengan jumlah tanggungan dapat mengurangi pendapatan usahatani, karena jumlah tanggungan merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan usahatani.

Untuk menguji signfikansi dari variabel independen yaitu : modal (X_1), umur (X_2), luas lahan (X_3), tingkat pendidikan (X_4) dan jumlah tanggungan (X_5) secara serempak terhadap pendapatan usahatani (Y) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji F

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.753E15	5	3.506E14	196.553	.000[a]
	Residual	6.243E13	35	1.784E12		
	Total	1.815E15	40			

a. Predictors: (Constant), Jlh_tangungan, Luas_lahan, Pendidikan, Modal, Umur

b. Dependent Variable: Pendapatan

Tabel 3 menunjukkan bahwa secara serempak modal (X_1), umur (X_2), luas lahan (X_3), tingkat pendidikan (X_4) dan jumlah tanggungan (X_5) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan (Y) dimana diperoleh nilai F-hitung sebesar 196,5534 > F-tabel (2,49), hal ini berarti bahwa peningkatan dari salah satu variabel independen akan semakin meningkatkan pendapatan usahatani.

Untuk mengetahui pengaruh modal (X_1), umur (X_2), luas lahan (X_3), tingkat pendidikan (X_4) dan jumlah tanggungan (X_5) secara parsial dilakukan dengan uji t seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1069559.991	2336337.525		.458	.650
	Modal	1.952	.109	.886	17.863	.000
	Umur	-16996.182	33458.509	-.030	-.508	.615
	Luas_lahan	1367270.556	646632.171	.102	2.114	.042
	Pendidikan	32856.829	144336.419	.010	.228	.821
	Jlh_tangungan	301881.973	242961.034	.068	1.243	.222

a. Dependent Variable: Pendapatan

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa secara parsial variabel modal, luas lahan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani, sedangkan umur, pendidikan dan jumlah tanggungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani.

a. Modal

Hasil uji t menunjukkan bahwa modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani, dimana t-hitung sebesar 17,863 > t-tabel (2,021). Hal ini menunjukkan semakin besar modal maka produksi ushatani semakin meningkat, karena dengan modal yang semakin besar maka penyediaan faktor produksi seperti sarana produksi, tenaga kerja dan alat-alat pertanian semakin baik. Peningkatan produksi usahatani akan semakin meningkatkan pendapatan usahatani. Menurut **Mubyarto (2000)** bahwa produksi merupakan kegiatan atau proses yang mengubah faktor-faktor produksi menjadi produk. Tingkat produksi suatu tanaman ditentukan oleh suatu tingkat penggunaan faktor-faktor produksi yang terdiri dari alam, lahan, tenaga kerja, modal dan pengelolaan.

b. Umur

Hasil uji t menunjukkan bahwa umur tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani, dimana t-hitung sebesar -0,508 < t-tabel (2,021). Hal ini menunjukkan ada kecenderungan penurunan pendapatan dengan semakin tinggi umur petani. Menurut **De Celle (1989)** bahwa umur akan berpengaruh terhadap kematangan fisik dan emosi. Semakin tua melewati umur produktif maka kekuatan fisik dan mental petani semakin menurun, sehingga produksi usahatani akan semakin menurun. Penurunan produksi usahatani akan semakin mengurangi pendapatan usahatani.

c. Luas Lahan

Hasil uji t menunjukkan bahwa luas lahan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani, dimana t-hitung sebesar 2,114 > t-tabel (2,021). Hal ini menunjukkan semakin luas lahan maka pendapatan usahatani semakin meningkat. Petani yang mempunyai lahan yang lebih luas akan lebih efesien mengelola usahataninya dibanding daripada petani yang berlahan sempit. Hal ini dikarenakan keefektifan dan efisiensi dalam penggunaan sarana produksi (saprodi). Petani yang kegiatan utamanya bertani menggantungkan hidup dari tanah garapannya. Dengan demikian luas tanah garapan yang dimilikinya menjadi salah satu petunjuk besarnya pendapatan yang diterimanya **(Suardiman, 2001)**.

Menurut **Mosher (1987)** yang menjelaskan bahwa luas lahan yang digarap petani, cenderung terkait dengan ketersediaan modal usahatani yang cukup untuk pengembangan usahataninya. Petani dengan modal yang besar akan mengelola usahatani dalam skala yang lebih luas.

d. Tingkat Pendidikan

Hasil uji t menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani, dimana t-hitung sebesar 0,228 < t-tabel (2,021). Hal ini disebabkan rata-rata pendidikan petani di daerah pengkajian tergolong tamat SD dan SMP, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan informasi yang diperoleh tentang pengelolaan usahatani. Pendidikan merupakan sarana belajar, dimana selanjutnya akan menanamkan pengertian sikap yang menguntungkan menuju penggunana praktek pertanian yang lebih modern. Petani dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi teknologi.

e. Jumlah Tanggungan

Hasil uji t menunjukkan bahwa jumlah tanggungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani, dimana t-hitung sebesar 1,243 < t-tabel (2,021). Hal ini disebabkan rata-rata petani di daerah pengkajian adalah keluarga kecil. Jumlah tanggungan umumnya akan berpengaruh terhadap ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga responden. Jika umur tanggungan tersebut adalah usia kerja maka jumlah tanggungan tersebut dapat dipergunakan sebagai tenaga kerja dalam keluarga, tetapi jika tanggungan masih dalam kelompok umur anak-anak atau tidak produktif maka jumlah tanggungan menjadi beban bagi pendapatan keluarga.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Tingkat kemiskinan petani di daerah penelitian berada pada kategori miskin sekali dan paling miskin, dengan konsumsi pangan beras setara dengan 154,61 kg/orang/tahun masih lebih kecil dari kategori miskin yaitu sebesar 180 kg/orang/tahun.
2. Secara serempak modal (X_1), umur (X_2), luas lahan (X_3), tingkat pendidikan (X_4) dan jumlah tanggungan (X_5) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani (Y)

3. Secara parsial modal (X_1) dan luas lahan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani, tetapi umur (X_2), tingkat pendidikan (X_4) dan jumlah tanggungan (X_5) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani.

6.2. Saran

1. Bagi petani, perlu meningkatkan pendapatan usahatani agar dapat keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan luas lahan usahatani yang dilakukan.
2. Bagi pemerintah, perlu menyediakan modal melalui kredit perbankan agar petani dapat meningkatkan luas usahataninya untuk meningkatkan pendapatan petani.

Daftar Pustaka

BPS, 2013. *Sumatera Utara dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo.

BPS, 2013, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008.* Badan Pusat Statistik, Propinsi Sumatera Utara.

BPS, 2017. *Kabupaten Nias dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias.

Criswardani Suryawati, 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. http://www.jmpk-online.net/Volume_8/Vol_08_No_03_2005.pdf. Diakses tanggal 11 Juni 2015.

Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. UPP-AMP.YKPN, Yogyakarta.

M. Muh. Nasir, Saichudin dan Maulizar. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. LIPI. Jakarta.

Mosher A. T. 1987. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. (terjemahan, Krisnandhi). Jakarta: Yasaguna.

Sajogyo, 2002. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Sharp, Ansel M, Charles A. Register and Paul W. Cerimes. 2000. *Economic of Social Issue*. Edisi ke-12. Richard D. Irwin. Chicago.

Slamet, M. 1992. *"Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tinggal Landas".* Dalam: *Penyuluhan Pembangunan Indonesia Menyongsong Abad XXI*. Diedit oleh: Aida V, Prabowo T, Wahyudi R. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.

Sudarno dan Rietveld, 1987, *Adopsi inovasi pada industri kecil*. Prisma. Nomor 4, April, hal. 57– 66.

Suryawati Chriswardani, 2005. Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manaejmen Pelayanan Kesehatan*. Vol.08/No.03/Septembe/2005. Hal 121-129.

PERANAN AUDITOR INTERNAL DALAM ORGANISASI PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Serniati Zebua, SE, M.Si[1]

ABSTRAK

Auditor internal harus dapat melakukan perannya dengan professional dan bertanggung jawab sehingga menghasilkan masukan-masukan dan pengendalian terhadap resiko-resiko capaian tingkat keberhasilan dari target yang ditentukan oleh pimpinan tertinggi organisasi. Sinergisitas pimpinan masing-masing direktorat jenderal, Inspektorat Propinsi Sumatera Utara dan auditor eksternal dapat terjalin dengan baik sehingga deteksi-deteksi dini terhadap penyimpangan terhadap aturan maupun pencapaian terhadap renstra 2014-2018 Propinsi Sumatera Utara dapat dihasilkan dengan baik.

Kata kunci : *auditor internal* dan *good governance*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkembangan profesi internal auditing dalam era globalisasi saat ini sangat pesat, bahkan Internal auditor telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari organisasi pemerintah (*governance*) yang dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja pemerintah maupun perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Dimana dalam perkembangannya, telah terjadi perubahan pandangan terhadap profesi internal auditor dari paradigma lama yang masih berorientasi pada mencari kesalahan (*watchdog*) menuju paradigma baru yang lebih mengedepankan peran sebagai konsultan dan katalis. Selain itu juga telah terjadi pendekatan baru dalam internal audit yaitu *risk based audit approach*.

Dengan demikian diharapkan supaya para auditor dapat meningkatkan sistem pengendalian intern karena sistem pengendalian intern ini merupakan prasyarat bagi penyelenggaran pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang baik. Sistem pengendalian intern ini merupakan salah satu unsurfungsi audit internal. Dengan demikian, fungsi audit internal yang berjalan dengan baik akan menghasilkan keluaran yang baik yang akan menjadi masukan bagi auditor eksternal, eksekutif, dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, sudah selayaknya fungsi pengawasan internal lebih diberdayakan dan dilaksanakan secara baik demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara atau *good governance* pada sektor publik yaitu terwujudnya transparansi, akuntabilitas, kejujuran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut auditor internal sebagai salah satu pengendali intern dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelola laporan keuangan negara harus mengeluarkan pendapat atau opini pada laporan keungan yang akan diterbitkan.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan auditor internal dalam organisasi pemerintahan.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu.

[1] *Dosen Tetap IKIP, Gunung Sitoli*

2. Uraian Teoritis

2.1. Peranan Auditor Internal

Menurut Sawyer (2008) auditor internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Auditor internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional organisasi dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi.

Auditor internal adalah yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya untuk menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkannya, oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menemukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi (Mulyadi, 2002).

Dalam lingkup Kementerian/Lembaga auditor internal bertugas memastikan bahwa rencana kerja jangka panjang, menengah maupun tahunan yang telah disahkan oleh DPR telah berjalan di setiap unit organisasi di dalamnya. Dalam Permenpan 220 tahun 2008 pengertian dari pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultansi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada dasarnya dari pengertian di atas, hasil pekerjaan auditor internal digunakan sebagai tolak ukur pencapaian dari organisasi terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan. Awalnya auditor internal lebih berperan sebagai pengawas atau mata dan telinga manajemen karena manajemen membutuhkan kepastian terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghindari tindakan yang menyimpang. Di sini audit internal lebih berorientasi pada pelaksanaan tindakan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pihak pelaksana dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan ini sering dianggap sebagai tindakan yang konfrontatif. (Tampubolon, 2005). Seiring dengan berjalannya waktu, fokus utama audit internal mengalami pergeseran menjadi konsultan untuk perusahaan atau kliennya, yaitu membantu satuan kerja operasional mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah-masalah dan memberikan saran untuk tindakan perbaikan yang dapat memberikan tambahan nilai sebagai amunisi memperkuat organisasi. Bahkan untuk masa yang akan datang diprediksikan peran auditor internal akan menjadi katalisator yang di mana akan ikut serta dalam penentuan tujuan dari suatu perusahaan atau organisasi (Tampubolon, 2005). Peran APIP dalam hal ini di jabarkan dalam Permenpan 220 tahun 2008 pasal 3 ayat 1 yaitu jabatan fungsional auditor sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan APIP. APIP diberikan tugas tambahan selain audit, evaluasi, reviu dan pemantauan yaitu pengawasan lain, seperti konsultasi, sosialisasi dan asistensi hal ini dikarenakan perubahan paradigma auditor internal. Auditor internal harus mampu mengindetifikasi dan mengelola resiko-resiko yang terjadi di masing-masing tingkatan organisasi. Auditor internal membantu memberikan saran untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Saat ini auditor sedang didorong menjadi katalisator, katalisator menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau

mempercepat suatu peristiwa. Katalisator dalam internal auditing merupakan suatu fungsi auditor internal untuk membantu anggota organisasi secara langsung dalam mempercepat suatu penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Perubahan auditor internal dari pola *watch dog* menjadi katalisator bukan hal sederhana, auditor sebagai orang yang ikut dalam proses pengambilan kebijakan, auditor mampu menjadi solusi dari resiko-resiko yang terjadi dalam organisasi sehingga kebijakan dapat dipastikan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Peran Auditor Internal menurut Tampubolon (2005) sebagai berikut:

Tabel 1. Peran Auditor Internal

Uraian	Peran Auditor Internal	
	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Peran	Pengawas	Konsultan dan Katalisator
Pendekatan	Detektif (mendeteksi terjadinya suatu masalah)	Prefentif (mencegah masalah)
Sikap	Seperti layaknya seorang polisi	Sebagai mitra bagi perusahaan
Ketaatan/ kepatuhan	Semua policy/kebijakan	Hanya policy yang relevan
Fokus	Kelemahan/ penyimpangan	Penyelesaian yang konstruktif
Audit	Financial/compliance audit	Financial, compliance, operational audit, quality assurance
Dampak yang diberikan	Jangka pendek	Jangka menengah dan jangka panjang

Sumber: Tampubolon (2005)

Dahulu auditor internal lebih banyak berperan sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang ditetapkan akan dilaksanakan oleh pegawai. Orientasi auditor internal banyak dilakukan pemeriksaan pada tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan-ketentuan yang ada (*compliance*). (Tampubolon, 2005).

Sesuai dengan definisi baru, kegiatan audit internal bertujuan untuk memberikan layanan pada organisasi. Karena kegiatan tersebut, maka auditor internal memiliki fungsi sebagai pemeriksa sekaligus berfungsi sebagai mitra manajemen. Pada dasarnya seluruh tingkatan manajemen dapat menjadi klien auditor internal. Oleh karena itu auditor internal wajib melayani klien dengan baik dan mendukung kepentingan klien dengan tetap mempertahankan loyalitasnya (Tampubolon, 2005).

Penelitian yang dilakukan Lisa dan Barry (1997) menyebutkan bahwa Internal Audit berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian fraud yang terjadi di suatu organisasi. Albergh (2010 *dalam* Wydilestariningtyas dan Akbar, 2014) menyatakan bahwa "*Not Everyone Is Honest*", seandainya semua orang jujur maka Perusahaan tidak perlu waspada dengan tindakan fraud. Akan tetapi banyak orang mengaku telah melakukan tindakan fraud ketika lingkungan tempat mereka bekerja memiliki integritas yang rendah, kontrol yang rendah dan tekanan yang tinggi. Ketiga hal ini akan memicu orang berprilaku tidak jujur. Tindakan fraud dapat dicegah dengan cara menciptakan budaya kejujuran, sikap keterbukaan dan meminimalisasi kesempatan untuk melakukan tindakan fraud.

2.2. Fungsi Pengawasan

Banyak sekali arti dan definisi pengawasan dalam beberapa lietratur namun paling tidak pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses yang dimulai dari penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut termasuk didalamnya melakukan *feedback* agar penyimpangan dari standar kinerja tidak semakin jauh;"*Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results"*. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;"*The process of ensuring that actual activities conform the planned activities"*.

Isu utama dalam fungsi pengawasan pada instansi pemerintah adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Tujuan dari dilaksanakannya pengawasan terhadap keuangan negara adalah (1) untuk menjaga agar anggaran yang disusun dan ditetapkan benar-benar dapat dilaksakan dengan baik, (2) untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan (3) untuk menjaga agar pelaksanaan APBN benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan.

Pengawasan keuangan negara dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. Aparat pengwas internal terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian/Unit Pengawasan Lembaga dan Inspektorat Propinsi dan Kota/Kabupaten. BPKP sesuai PP 62/2006 berfungsi melakukan koordinasi atas seluruh pengawasan intern Pemerintah. Sedangkan pengawas eksternal dilakukan oleh BPK, Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/D), media masa beserta lembaga atau anggota masyarakat lainnya. Sedangka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) adalah eksternal pemeriksaan sesuai UU No. 15 Tahun 2003 tentang BPK anatara lain disebutkan dalam penjelasan adalah lembaga yang bebas dan mandiri serta memiliki profesionalisme. Perbedaan fungsi pengawasan inetral dan eksternal adalah mekanisme pleaporan dan tujuan audit, dimana BPK setiap tahunnya memberikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) dan hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKKP) dan seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah, yaitu Propinsi dan Kota dan Kabupaten.

Keuangan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan publik atau bahkan ada yang berpendapat bahwa keuangan negara adalah sama dengan keuangan publik. Bagi setiap negara tidak terlalu jelas subjek dari keuangan negara karena tergantung dari bentuk dan sistem pemerintahan dari masing – masing negara yang diatur dalam konstitusi. Eksistensi keuangan publik dibutuhkan ketika belanja untuk memenuhi kebutuhan akan peneydiaan barang dan jasa publik diperlukan, sehingga keuangan negarapun ada saat dibutuhkan pengadaan atas barang dan jasa publik berupa layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, minyak dan gas, sandang dan panganmelalui subsidi langsung atau pun melalui *public service obligation* (PSO). Definisi keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengawasan keuangan negara dimulai dari tahap perencanaan atau dimulai dari proses hingga disetujuinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Pengawasan keuangan negara pada tahap pelaksanaan dilakukan pada sisi penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Pada sisi penerimaan

pengawasan dilakukan oleh Kantor Pelayanan ataupun Pemeriksa Pajak untuk penerimaan negara dalam bentuk pajak, Kantor Inspeksi Bea dan Cukai untuk penerimaan dalam bentuk bea dan cukai serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sedangkan pengawasan keuangan negara pada sisi pengeluaran lebih ditekankan pada pengawasan internal dari masing–masing instansi yang akan melakukan pengeluaran keuangan negara tersebut.

Prinsip-prinsip yang dipakai dalam pelaksanaan pengeluaran negara adalah :

1. *Wetmatighead*, pengawasan yang menekankan pada aspek kesesuaian antara praktek pelaksanaan dan pengelolaan APBN/D dengan peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang berlaku;
2. *Rechmatighead*, pengawasan yang menekankan dari aspek legalitas pelaksanaan APBN/D; dan
3. *Doelmatighead*, pengawasan yang menekankan pada pentingnya penilaian kinerja dan peranan faktor tolok ukur dalam pelaksanaan APBN/D.

3. Pembahasan

Perancanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selaam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi dan tujuan, sasaran kebijakan dan program yang relistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Rencana Strategis (Renstra) instansi merupakan integrasi keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan linkungan strategis, nasional dan global serta tetap dalam tananaman manajemen nasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Inspektoran Provinsi Sumatera Utara menyusun dokumen Rencana Strategis kurun waktu 2014 - 2018. Keluarga Permendagri tersebut akan memperkuat tugas, fungsi dan peran Kepala SKPD, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah serta mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan (Inspektorat Propinsi Sumatera Utara, 2014).

Auditor Inspektorat Propinsi Sumatera Utara harus mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dalam memahami renstra. Dari target-target yang telah dijabarkan oleh mereka auditor harus mampu memetakan tentang kendala kendala yang akan terjadi di lapangan dan penerapannya. Auditor sebagai orang yang dianggap mampu mengelola resiko-resiko yang akan terjadi sehingga menjadi penting wawasan dan teori-teori tentang organisasi dan aturan-aturan yang menjadi rujukan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan oleh masing-masing satker. Sekretariat pada Inspektorat Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini sebagai unit yang mengelola sumber daya auditor harus mampu memetakan kemampuan dan pengetahuan yang wajib dimiliki oleh auditor juga mengatur ritme waktu antara melakukan kegiatan reviu, audit, pendampingan juga diklat-diklat tenis untuk meningkatkan kompetensi sumber dayanya. Sekretariat harus rutin bertukar pikiran melakukan *benchmark* kepada Inspektorat

Propinsi Sumatera Utara dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan peran auditor internal. Sesuai Interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) – standar 120.2 tahun 2004, tentang pengetahuan mengenai penyimpangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi penyimpangan. Selain itu, Statement on Internal Auditing Standards (SIAS) No. 3, tentang Deterrence, Detection, Investigation, and Reporting of Fraud (1985), memberikan pedoman bagi auditor internal tentang bagaimana melakukan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap fraud. SIAS No. 3 tersebut juga menegaskan tanggung jawab auditor internal untuk membuat laporan audit tentang fraud. Dengan tanggung jawab sebesar itu sepertinya tidak mungkin bila auditor kesehariannya hanya melakukan audit hanya sebagai rutinitas tetapi tidak dapat memberikan gambaran dengan tentang capaian-capaian kinerja dari organisasi dan penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan tidak tercapainya target-target dari organisasi.

Auditor internal sebagai katalisator terlibat aktif dalam melakukan penilaian risiko yang terdapat dalam proses bisnis organisasi. Oleh karena itu diperlukan sikap proaktif dari pihak auditor internal dalam mengenali risiko-risiko yang dihadapi atau mungkin dihadapi manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Peran katalisator yang dijalankan auditor internal tidak saja terbatas pada tindakan perbaikan dan memberikan nasihat tetapi juga mencakup dalam system design and development, review terhadap kompetensi sumberdaya manusia dalam suatu fungsi organisasi, keterlibatan dalam penyusunan corporate planning, evaluasi kinerja, *budgeting*, *strategy formulation* dan usulan perubahan strategi (Simbolon, 2010). Dengan berubahnya paradigma auditor sebagai katalisator auditor mempunyai andil dalam perumusan kebijakan manajemen. Auditor mampu berkerjasama dengan baik dengan auditi, sehingga auditi dapat mengutarakan dengan baik keinginan keinginannya terhadap organisasi yang sedang dijalankannya. Auditor harus mempu memberikan "pelayanan yang baik" terhadap auditi. Pelayanan yang baik adalah auditor mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Auditor bukan orang yang hanya menyatakan salah atau benar, boleh atau tidak tetapi lebih jauh dari itu, mampu memberikan solusi dan bertanggung jawab terhadap solusi yang diberikannya mampu membuat lebih efektif, ekonomis dan efisien. Auditor mampu menentukan ruang lingkup pekerjaannya dengan baik, evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan sistem pengendalian yang dilakukan oleh satker dan informasi-informasi yang didapatkan pada saat itu. Kriteria-kriteria penilaian yang akan dilakukan oleh seorang auditor harus disepakati oleh kedua pihak sehingga tingkat ketercapaian dan kesuksesannya berada pada posisi dan cara pandang yang sama antara auditor dan auditi.

Institut Of Internal Auditors (IIA) telah menetapkan standar praktik audit yang mengikat para anggotanya. Ada lima standar umum yang berkaitan dengan masalah-masalah berikut ini : (Boynton and Kell, 2008):

1. Auditor internal harus independen dari aktivitas yang mereka audit.
2. Keahlian Profesional. Audit internal harus dilakukan dengan keahlian dan kemahiran profesional.
3. Ruang Lingkup Pekerjaan. Ruang lingkup auditing internal harus mencakup pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan.

4. Pelaksanaan pekerjaan audit. Pekerjaan audit harus meliputi perencanaan audit, pemeriksaan dan evaluasi informasi, pengkomunikasian hasil-hasil dan tindak lanjut.
5. Pengelolaan pemeriksaan pemeriksaan intern. Direktur auditing internal harus mengelola pemeriksaan pemeriksaan internal dengan baik.

Auditor internal adalah sebuah profesi yang dinamis yang mengantisipasi perubahan dalam lingkungan organisasinya, sangat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan struktur, proses dan teknologi organisasinya. Aktivitas auditor internal dilaukan dalam kondisi budaya yang beragam dalam organisasi yang bervariasi baik dalam tujuan, ukuran, maupun struktur dan oleh orang di dalam atau luar organisasi. Perbedaan ini bisa jadi mempengaruhi praktek auditor internal di setiap kondisi.

Keterlibatan auditor internal dalam setiap tahapan manajemen atau Keterlibatan auditor internal dalam setiap tahapan manajemen atau *system development life cycle* sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan, menurut Hall (2007) dalam tahap ini akuntan ataupun auditor internal sering diminta untuk memberikan keahlian mereka untuk mengevaluasi kelayakan sebuah proyek, mereview masalah kelayakan ekonomi, kelayakan perencanaan sistem pengendalian intern dan kelayakan operasi.
2. Tahap analisis sistem, auditor berperan dalam memberikan laporan audit pada sistem yang akan diuji oleh tim studi. Akuntan dengan latar belakan pendidikan formal dan informalnya menunjukan bahwa ia memiliki keahlian untuk melakukan analisis sistem.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yakni (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami. Inspektorat Jenderal Kementerian/lembaga Aparat pengawasan intern pemerintah (auditor internal) pada Kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri kepada pihak-pihak terkait sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 dapat dimanfaatkan oleh auditor eksternal. Auditor internal yang merupakan bagian dari organisasi, walaupun dituntut untuk tetap profesional hasil audit yang dihasilkan dipengaruhi oleh budaya/iklim yang tercipta dari organisasi tersebut. Auditor internal dapat bersinergi dengan auditor eksternal pemerintah dalam melihat tidak kewajaran laporan keuangan dan hasil capaian dari target yang telah dicanangkan dengan perspektif yang berbeda. Auditor eksternal dapat memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh auditor internal. Sinergi tersebut diharapkan dapat tercipta dengan baik sehingga paradigma auditor sebagai katalisator dapat dilaksanakan dengan baik. Sinergi antara auditor internal dan eksternal sangat baik dilakukan auditor eksternal dapat memberikan informasi titik-titik resiko yang ada pada organisasi dan auditor internal harus mampu memberikan solusi kepada organisasi terhadap resiko-resiko yang ada. Sehingga auditor eksternal negara yang mempunyai tanggung jawab memberikan penilaian keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dapat memberikan penilaian yang baik. Kerjasama antara auditor internal dengan satker yang dilakukan penilaiannya harus dapat terjalin dengan baik juga sehingga organisasi mampu mendapatkan penilaian opini yang yang baik dari auditor eksternal dan diharapkan penilaian yang baik itu dapat berbanding lurus dengan capaian kinerja dari organisasi tersebut.

4. Penutup

Auditor internal harus dapat melakukan perannya dengan professional dan bertanggung jawab sehingga menghasilkan masukan-masukan dan pengendalian terhadap resiko-resiko capaian tingkat keberhasilan dari target yang ditentukan oleh pimpinan tertinggi organisasi. Sinergisitas pimpinan masing-masing direktorat jenderal, Inspektorat Propinsi Sumatera Utara dan auditor eksternal dapat terjalin dengan baik sehingga deteksi-deteksi dini terhadap penyimpangan terhadap aturan maupun pencapaian terhadap renstra 2014-2018 Propinsi Sumatera Utara dapat dihasilkan dengan baik.

Daftar Pustaka

Boynton, Johnson & Kell, 2008. *Modern Auditing* Jilid 1 Edisi Ketujuh (Alih Bahasa Akuntansi) Buku Satu Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.

Hall, James A. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Inpekstorat Provinsi Sumatera Utara. 2014. *Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2014 - 2018*. Medan.

Lisa M Perry and Barry J Bryan. 1997. Heightened Responsibilities Of The Auditor Internal In The Detection Of Fraud. *Managerial Finance.* Vol.23 No. 12.;Pg.38.

Mulyadi. 2002. *Auditing Buku 1*, Edisi Keenam. Jakarta : Salemba Empat.

Sawyer, Lawrence B, Dittenhofer Mortimer A, Scheiner James H, 2005, *Internal Auditing*, Diterjemahkan oleh : Desi Adhariani, Jilid 1, Edisi 5, Salemba Empat : Jakarta.

Simbolon, Harry Andrian. 2010. *Paradigma Baru Audit Internal*. http:// akuntansibisnis.wordpress.com/feed/ Diakses 23 Juli 2017.

Tampubolon Robert. 2005. *Risk And System Based Internal Audit*. Jakarta : PT Elexmedia Komputindo.

Widilestaringtyas, Ony dan Rahman Toni Akbar. 2014. Pengaturan Audit Internal terhadap Risiko Fraud (Survey pada PT. BRI di Wilayah Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 6 No. 1 : 19 – 38.

PELAKSANAAN SUPERVISI OLEH KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS DI SEKOLAH DASAR NEGERI 078549 BOTOHILI

Amila Waruwu, S.Pd.[1]

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas di SD Negeri 078549 Botohili, Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus (case study). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi dilakukan untuk mengetahui guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kepala sekolah dapat mengetahui kompetensi dan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran dari masing-masing guru melalui kegiatan monitoring, pemantauan dan pengawasan pembelajaran di kelas.

Kata kunci : *supervisi, kepala sekolah* dan *pengawas*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Menurut pendapat Sergiovani dan Starrat dalam Mulyasa (2006:11) menyatakan bahwa *"supervision is process designed to help teacher and supervisor leam more about their practice;to better able to use their knowledge and skills to better serve parents and schools; and to make the school a more effective learning community"*.

Pelaksanaan supervisi bukan untuk mencari kesalahan guru tetapi pelaksanaan supervisi pada dasarnya adalah proses pemberian layanan bantuan kepada guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukan guru dan meningkatkan kualitas hasil belajar.

Kegiatan supervisi pendidikan sangat diperlukan oleh guru, karena bagi guru yang bekerja setiap hari di sekolah tidak ada pihak lain yang lebih dekat dan mengetahui dari dalam segala kegiatannya, kecuali Kepala Sekolah. Guru merupakan salah satu faktor penentu rendahnya mutu hasil pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan program supervisi pendidikan maka harus mencakup semua komponen yang terkait dan mempengaruhi terhadap keberhasilan program supervisi pendidikan. Keberhasilan tersebut dilihat dari komponen perencanaan, implementasi dan dampak dari program supervisi pendidikan. Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai supervisor secara efektif, maka Kepala Sekolah memiliki kompetensi yaitu kemanusiaan, manajerial, dan teknis.

Dalam menjalankan amanah tanggung jawabnya, seorang Kepala Sekolah tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu diperlukan adanya pengawas yang mengontrol dan meluruskan kembali kesalahan dan kekliruan tersebut. Sehingga dengan demikian akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Sehingga tujuan dari pembelajaran dapat terwujud.

[1] *Pengawas SDN 078549 Botohili, Kecamatan Lolowau*

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas di SD Negeri 078549 Botohili, Kabupaten Nias Selatan.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus (*case study*). Menurut Kristiawan dan Elnanda (2017) penelitian kualitatif merupakan *one of research procedure that produces descriptive data in form of words, writing, and behavior of the people being observed.* Sedangkan case study menurut Yuliani dan Kristiawan (2017) meruapakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya. Menurut Nazir (2009: 57) *case study* adalah peneltian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.

Penelitian dilakukan di SD Negeri 078549 Botohili, Kabupaten Nias Selatan. Sumber- sumber data penelitian ini adalah kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru-guru di lingkungan SDN 078549 Botohili. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data interaktif yang terdiri dari tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2007: 337).

2. Uraian Teoritis

2.1. Supervisi

Secara etimologis supervisi terdiri atas dua kata, super (lebih) dan vision (pandangan). Dengan kata lain supervisi mengandung arti pandangan yang lebih. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa supervisi dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak yang disupervisi. Supervisi pendidikan sebenarnya adalah bantuan dalam mengembangkan situasi pembelajaran kearah yang lebih baik, dengan jalan memberikan bimbingan dan pengarahan pada guru-guru dan petugas lainnya untuk meningkatkan kualitas kerja mereka dibidang pengajaran dan segala aspeknya (Risnawati, 2014: 214). Pendapat lain menurut Kimball Wiles dalam (Maryono, 2011) menyatakan bahwa *"Supervision is assistance in the development of a better teaching learning situation".* Supervisi adalah proses bantuan untuk meningkatkan situasi belajar mengajar agar lebih baik. Pengertian ini menunjukkan bahwa supervisi adalah proses bantuan, bimbingan,dan atau pembinaan supervisor kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran.

Menurut Sagala (2009 : 195), supervisi yaitu sebagai bantuan dan bimbingan profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi dan bimbingan secara kontinu untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok.

Supervisi adalah segala batuan dari para pemimpin sekolah, yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan. Tujuan pendidikan ia berupa dorongan, bimbingan dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan pengajaran, pemilihan alat-alat

pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya.

Kegiatan supervisi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang apalagi oleh yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu, karena seorang supervisor adalah orang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan.Tidak hanya itu, seorang supervisor biasanya adalah seorang status leader oleh kedudukannya dan oleh karena itu ia memikul tanggungjawab untuk merealisasikan pontensi kreatifitas dari orang yang dibina dalam memecahkan setiap problema dengan cara mengikut sertakan orang lain untuk berpartisipasi bersama (Sahertian, 1986 : 40).

Melalui supervisi, diharapkan seorang guru dapat; 1) bekerja keras dan demokratis; 2) ramah dan suka mendengarkan orang lain; 3) sabar; 4) luas pandangan dan menaruh perhatian kepada orang lain; 5) penampilan pribadi yang menyenangkan dan sopan santun; 6) jujur; 7) suka humor; 8) kemampuan kerja yang baik dan konsisten; 9) menaruh perhatian pada problem siswa; 10) fleksibel dalam cara mengajar; 11) bisa menggunakan pujian dan mau memperbaiki; 12) pandai dalam mengajar pada bidang studi (Sahertian, 1994). Supervisi agar bisa berjalan dengan baik harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi, dalam hal ini Mulyasa (2006:113) menyebutkan prinsip-prinsip supervisi adalah; 1) hubungan konsultatis, kolegial dan bukan herarkis; 2) dilaksanakan secara demokratis; 3) berpusat pada tenaga kependidikan/guru); 4) dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan (guru); 5) merupakan bantuan professional. Pelaksanaan supervisi tidak hanya mendatangi guru dan memeriksa berkas atau melihat pelaksanaan mengajar dikelas, hal ini sesuai pandapat Marshall (2009) perlu secara drastis memikir ulang model supervisi yang ada selama ini untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik.

Berdasarkan teori mengenai supervisi diatas, dapat dimengerti bahwa supervisi adalah kegiatan yang dilakukan seorang kepala sekolah dalam mengembangkan, mengarahkan dan upaya untuk memberi dorongan kepada guru- guru dan petugas lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, bahan-bahan pengajaran, metode dan evaluasi pengajaran.

2.2. Kelapa Sekolah

Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah meliputi kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Sebagai manager kepala sekolah mengelola sekolah guna mencapai tujuan pendidikan hal ini sesuai dengan pendapat Hersey dan blanchard dalam (Risnawati, 2012 : 64) mengartikan istilah manajemen itu dengan kegiatan yang dilakukan bersama orang lain atau melelui orang lain atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang disebut "*Emaslim*" (edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator). Salah satu standar dan tugas kepala sekolah adalah kompetensi supervisi. Kompetensi tersebut yaitu: (1) merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; (2) melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; (3) menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme

guru. Kepala sekolah berperan dalam pengelolaan sekolah hal ini sesuai dengan pendapat Supardi (2012: 13) bahwa, "kepemimpinan kepala sekolah melalui pemberian layanan supervisi kepada guru merupakan salah satu variabel organisasi yang mempengaruhi kinerja guru".

Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Sedang sifat unik, menunjukkan bahwa sekolah sebagai organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. Ciri-ciri yang menempatkan sekolah memiliki karakteristik tersendiri, dimana terjadi proses belajar mengajar, tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan umat manusia (Wahjosumidjo, 2002: 81).

Karena sifatnya yang kompleks dan unik itulah sehingga sekolah sebagai organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu Kepala dan Sekolah. Kata Kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan Sekolah adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran (Wahjosumidjo, 2002: 83).

Dengan demikian secara sederhana kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga profesional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid menerima pelajaran. Kata memimpin dari rumusan tersebut mengandung makna luas, yaitu kemampuan untuk menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Wahjosumidjo, 2002: 83).

Adapun kewenangan kepala sekolah sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan sekolah adalah mengatur dan mengelola tiga hal pokok, yaitu personil, sarana dan dana. Sebagai seorang manager, kepala sekolah harus mampu dan mempunyai kemampuan manajemen yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Kemampuan ini sangat mendukung pada saat mengatur personil atau SDM yang dimiliki sekolah (Saroni, 2006: 21-22).

Kepala sekolah adalah sosok yang diberi kepercayaan dan kewenangan oleh banyak orang (anak buah) untuk membawa sekolah ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kepercayaan yang diberikan oleh anak buah ini adalah didasarkan pada beberapa aspek yang dimiliki oleh kepala sekolah dan diharapkan dapat menjadi modal untuk membawa pada keberhasilan bersama (Saroni, 2006: 37).

2.3. Pengawas Sekolah

Dalam memajukan pendidikan ada unsur guru kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan profesional yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang akademik (teknis pendidikan) maupun bidang manajerial /pengelolaan sekoah (Sagala, 2012: 138).

Disebutkan tugas pokok pangawas sekolah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 19 Tahun 2005, Tentang Estándar Nasional Pendidikan, pada Pasal 55 menyatakan bahwa, "pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan". Peran kepala sekolah begitu penting seperti pendapat Sagala (2012) pengawas sekolah memberikan pembinaan, penilaian, dan

bantuan/bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil dalam pengelolaan sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah, sedangkan tanggungjawab sebagai pengawas adalah membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan (supervisi manajerial), pengawas sekolah juga bertugas membantu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/membimbing dan hasil prestasi belajar siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Bedasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan dalam Risnawati (2014 : 162-163) ada tujuh kemampuan dasar yang harus dimiliki pengawas sekolah dalam membina kepala sekolah, yaitu: 1) Membantu penyusunan rencana pengembangan sekolah (termasuk menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, indicator keberhasilan, arah dan strategi, kebijakan internal, dan program kerjanya); 2) Memantau pengelolaan sistem kode etik dan tata laku semua subjek pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa/peserta didik; 3) Memfasilitasi pengambilan keputusan demokratik, partisipatif, dan kolektif; 4) Membimbing pengembangan kurikulum dan silabus secara dinamik dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pencapaian peningkatan mutu pendidikan; 5) Memantau pelaksanaan program pendidikan berorientasi kepada peningkatan mutu pendidikan yang memperhatikan baik unsur masukan, proses, dan hasil/output pendidikan; 6) Mengarahkan pendelegasian dan pendistribusian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara proporsional dan konsisten; 7) Mendorong pengelolaan seluruh sumber daya pendidikan termasuk dana.

3. Pembahasan

Pelaksanaan supervisi kepala sekolah membagikan jadwal supervisi dan sesuai dengan jadwal mengadakan supervisi kepada guru. Adapun yang di supervisi administrasi perencanaan pembelajaran yang berisi komponen dengan baik walau jadwalnya ada yang berubah dikarenakan ada kegiatan lain sehingga di alihkan hari lain, tetapi guru juga mengerti.

Dalam pelaksanaan supervisi akademik meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa guru-guru di SD Negeri 078549 Botohili sudah ada yang mengikuti kegiatan pelatihan kurikulum K-13, tetapi pada umumnya guru belum memahami K-13, sehingga kepala sekolah mengundang narasumber untuk mengadakan workshop K-13 yang dilaksanakan tiga kali pertemuan tiap hari Sabtu di bulan September mulai minggu pertama sampai dengan ketiga pada tahun 2017. Rata-rata guru sudah menyiapkan administrasi pembelajaran namun dalam pelaksanaan pembelajaran guru masih banyak yang menggunakan cara-cara lama yaitu murid membaca buku guru menjelaskan dan di akhiri mengerjakan soal. Hal ini di karenakan masih banyaknya guru yang belum menguasai komputer dan belum memanfaatkan TIK dalam pembelajaran.

Sarana prasarana guna menunjang pembelajaran yang lebih baik memang belum memadai, kemudian metode mengajar, media juga masih perlu di kembangkan lagi agar proses balajar menjadi pembelajaran yang aktif,kreatif dan menyenangkan. Dari hasil wawancara dengan guru ada hampir 65 % guru yang nerveus ketika akan di supervisi hai ini disebabkan beberapa faktor; 1) guru yang hampir pensiun rata-rata usianya 55 tahun ke atas; 2) guru yang kurang menguasai komputer/ IT.

Supervisi guru telah menjadikan guru kinerjanya lebih baik, terlihat dari penyusunan perangkat pembelajaran sudah baik, pelaksanan pembelajaran belum sepenuhnya baik karena masih menggunakan metode-

metode yang lama seperti ceramah, penugasan. Dari administrasi juga tertib dari daftar hadir, daftar nilai dan lain-lainnya. Secara umum dengan adanya supervisi akademik meningkatkan kinerja guru terlihat dari rata-rata nilai supervisi baik hal ini sesuai dengan penelitian.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2017) bahwa supervisi kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Selama ini belum ada guru yang minta supervisi klinis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi guru, hal ini disebabkan guru malu dianggap mampu. Supervisi pengawas di SD Negeri 078549 Botohili dalam pelaksanaannya terdiri atas supervisi manajerial; yaitu supervisi kepada kepala sekolah yang berkaitan dengan kepala sekolah sebagai manajer di sekolah. Sebagai manajer kepala sekolah melakukan kegiatan merencanakan, menyusun, mengadministrasi, mengontrol, evaluasi segala kegiatan yag ada di sekolah baik administrasi siswa, administrasi, keuangan, administrasi tenaga pendidik, administrasi tenaga kependidikan, administrasi kurikulum. Supervisi akademik dilakukan pengawas sekolah kepada guru-guru di SD Negeri 078549 Botohili, pengawas sekolah memberikan jadwal supervisi kepada kepala sekolah terlebih dahulu, dan kepala sekolah menyampaikan kepada guru. Pada waktu yang telah dijadwalkan pengawas sekolah datang dan memeriksa berkas administrasi guru yaitu: 1) kalender akademik, 2) program tahunan, 3) program semester, 4) analisis SK / KD, 5) RPP, 6) buku absen, 7) buku nilai, 8) agenda pembelajaran, 9) buku supervisi, 10) kriteria-ketuntasan minimal (KKM). Pengawas sekolah menilai dengan sekala liket koponen-komponen yang disupervisi, dan yang menjadi catatan belum ada tindak lanjut dari supervisi kepala sekolah.

Perbedaan supervisi kepala sekolah dengan supervisi pengawas sekolah di SD Negeri 078549 Botohili; 1) berdasar subyek yang di supervisi kepala sekolah mensupervisi guru guna memperbaiki pembelajaran sedang pengawas mensupervisi kepala sekolah dalam bidang manajerial dan supervisi akademik bagi guru. 2) Kepala sekolah jadwalnya lebih fleksibel sedang pengawas sekolah sudah terjadwal. 3) Kepala sekolah mengamati kegiatan belajar mengajar sedang pengawas sekolah hanya mensupervisi administrasi dan persiapan mengajar saja. 4) Supervisi Kepala sekolah ditindaklanjuti dengan program kegiatan sekolah, contohnya mengadakan workshop K-13 setelah menyimpulkan hasil supervisi guru masih banyak yang belum menguasai K-13, sedang pengawas sekolah belum ada tindak lanjut. 5) Guru merasa lebih nyaman di supervisi kepala sekolah dari pada di supervisi pengawas sekolah, dikarenakan guru lebih dekat hubungan personal dengan kepala sekolah.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Supervisi dilakukan untuk mengetahui guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kepala sekolah dapat mengetahui kompetensi dan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran dari masing-masing guru melalui kegiatan monitoring, pemantauan dan pengawasan pembelajaran di kelas.

4.2. Saran

Untuk meningkatkan proses belajar mengajar di SD Negeri 078549 perlu dilakukan supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Daftar Pustaka

Kristiawan, M., dan Elnanda, D. 2017. The Implementation of Authentic Assessment in Cultural History of Islam Subject. *Al-Talim Journal*, *24*(3).

Marshall, Kim. 2009. *Rethinking Teacher Supervision and Evaluation: How to Work Smart, Build Collaboration, and Close the Achivement Gap*. Wiley Imprint, San Fransisco.

Maryono. 2011. *Dasar-Dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.

Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Ramadhan, Ahmad. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Dan Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMK Negeri Di Kabupaten Majene. *Journal of Educational Science and Technology (EST) Volume 3 Nomor 2 Agustus 2017 Hal. 136-144.*

Risnawati. 2014. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.

Sagala, H. Syaiful. 2012. *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*. Alfabeta. Bandung.

Sahertian Piet A, 1986. *Prinsip dan tehnik Supervisi Pendidikan*.Usaha Nasional, Surabaya.

Saroni, Muhammad. 2006. *Manajemen Sekolah: Kiat Menjadi Pendidik yang Kompeten*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta, Bandung.

Supardi. 2014. *Kinerja Guru.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wahjosumidjo, 2002. *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

PENGGUNAAN METODE PENGAJARAN BIDANG STUDI BAHASA INDONESIA DI SMP NEGERI 1 ULUNOYO, KECAMATAN ULUNOYO KABUPATEN NIAS SELATAN

Kasihani Giawa, S.Pd.[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode pengajaran bidang studi Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ulunoyo, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauhmana penggunaan jenis metode mengajar oleh para guru bidang studi Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ulunoyo, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan. Untuk mengetahui hal tersebut, tentu diperlukan data mengenai jenis metode yang sering digunakan. Oleh karena itu, maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis metode mengajar yang banyak digunakan para guru bidang studi Bahasa Indonesia pada saat penelitian diadakan, adalah metode ceramah bervariasi. Pemakaian alat bantu mengajar oleh Para guru bidang studi bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan secara berurutan adalah : satuan pelajaran, alat peraga, literatur, ilustrasi, dan elektronik.

Kata Kunci : *metode pengajaran* dan *bahasa Indonesia*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan, salah satu aspeknya ialah melaksanakan proses belajar-mengajar yang fungsional dan efektif dengan mengembangkan Sistem Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Menurut sistem PPSI, dalam proses belajar-mengajar perlu dikembangkan lima komponen yang satu sama lainnya saling berkaitan dalam pencapaian tujuan pengajaran. Kelima komponen tersebut adalah :

1. Tujuan Instruksional yang dirumuskan dalam satuan pelajaran/Model Program.
2. Materi pelajaran meliputi bahan yang akan diajarkan.
3. Kegiatan belajar-mengajar yang meliputi metode pengajaran dan rumusan langkah-langkah mengajar, menyangkut kegiatan guru dan siswa.
4. Alat peraga atau alat pelajaran, buku-buku serta informasi lainnya yang menunjang pencapaian tujuan.
5. Untuk memperoleh data mengenai tercapai tidaknya tujuan pengajaran perlu evaluasi.

Diantara kelima komponen tersebut di atas, terdapat metode pengajaran dalam pelaksanaan belajar meng-ajar yang merupakan salah satu unsur penentuan pencapaian tujuan. Oleh karena itu pengembangan alternatif yang baik dan inovatif dalam pembaharuan bidang pendidikan pada umumnya, dan khususnya metodologi pengajaran memerlukan dukungan penelitian yang terarah, sehingga dapat menghasilkan bentuk-bentuk alternatif yang memang dapat diketengahkan.

Telah dikemukakan bahwa pembangunan bidang pendidikan yang sedang berlangsung dewasa ini, menuntut peningkatan mutu pendidikan. Dan dengan sendirinya tentu akan menuntut kualifikasi pengajar yang benar benar terampil dan kreatif dalam mengembangkan proses belajar-mengajar, yang pada gilirannya menantang pars guru untuk mengembangkan dan meningkatkan strategi belajar-mengajar, yang dalam hal ini adalah metode pengajaran.

---

[1] *Pengawas SMP 1 Ulunoyo, Kecamatan Ulunoyo*

Metode pengajaran yang digunakan para guru pada setiap jenjang persekolahan pada umumnya masih terbiasa dengan metode ceramah, yang memang cukup mudah untuk dilaksgnakan. Padahal metode tersebut tidak banyak mendukung strategi belajar-mengajar yang menghendaki penggunaan multi metode, sesuai dengan tuntutan Kurikulum SMP. Sedangkan yang dikehendaki oleh dunta pendidikan dewasa ini adalah membawa anak didik aktif dalam proses belajar-mengajar sehingga anak didik sebagai subjek didik menjadi individu-individu yang aktif dan kreatif, serta memiliki kemampuan untuk mandiri.

Bertolak dari pemikiran-pemikiran di atas, penulis berkeinginan untuk menginventarisir penggunaan metode pengajaran bahasa Indonesia, mengungkap latarbelakang permasalahan bilamana terjadi penyimpangan dari kurikulum, faktor-faktor yang menyebabkan para guru belum melaksanakan metode sesuai tuntutan kurikulum.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode pengajaran bidang studi Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ulunoyo, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauhmana penggunaan jenis metode mengajar oleh para guru bidang studi Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ulunoyo, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan. Untuk mengetahui hal tersebut, tentu diperlukan data mengenai jenis metode yang sering digunakan. Oleh karena itu, maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif.

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisa pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan.

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas mengandung makna: mendidik, mengajar dan melatih. Pendidikan merupakan proses transformasi pengetahuan, teknologi dan lain-lain keterampilan. Agar proses transformasi dapat berlangsung lancar, perlu diperhatikan beberapa syarat, antara lain : hubungan edukatif yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mursell (2000) yang mengemukakan pelajaran yang disajikan harus diorganisir berbentuk kegiatan yang nampak riil, menarik dan berharga bags slaws, membangkitkan tujuan yang aktif mengkonfrontasikan dengan tantangan yang berarti, membawa dia kepada pengertian yang lebih dalam serta luas dan memberi sikap yang lebih halus serta ketrampilan yang lebih adekuat.

Jadi jelas bahwa dalam penyajian bahan pe]ajaran perlu dipilih metode pengajaran yang relevan sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran secara maksimal. Pengorganisasian proses belajar-mengajar dengan bentuk kegiatan yang dapat membangkitkan siswa secara aktif, diperlukan proses belajar-mengajar yang berinteraksi. Istilah interaksi adalah istilah yang menggambarkan hubungan aktif dua arah, antara pendidik dan anak didik.

2.2. Faktor-Faktor Interaksi

Proses interaksi edukatif yang terlihat dalam skema tersebut haruslah interaksi yang bermakna, ter-organisir dan terarah pada pencapaian tujuan. Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi dua arah dalam peroses interaksi edukatif, antara lain :

a. Tujuan

Faktor tujuan dapat dibedakan antara tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pada dasarnya telah siap tercantum dalam tujuan pengajaran yang terdapat pada kurikulum setiap jenjang persekolahan. Sedangkan tujuan khusus adalah tujuan yang harus dirumuskan oleh setiap guru, mengacu pada perubahan tingkah laku atau sikap pada diri siswa setelah proses belajar-mengajar berakhir.

Menurut Abd. Gafur (1982) yang disadur dari pendapat Bloom; ada tiga aspek obyektives sebagai sasaran/ tujuan khusus, yakni :

1. Aspek pengenalan (Cognitive domain) terdiri dari aspek perasaan (Affektive domain) dan aspek gerak (Psychomotor domain).
2. Bahan

   Faktor bahan atau maters pelajaran hendaknya dipilih dan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.

b. Metode

Pemilihan jenis metode bukanlah hal yang mudah, melainkan memerlukan berbagai pertimbangan, misalnya dari segi siswa, tujuan, fasilitas serta kemampuan dari guru itu sendiri. Tidak ada satu metode pun yang dianggap paling tepat untuk menyampaikan segala macam materi. Sebab setiap metode memiliki batas-batas kebaikan maupun kelemahan terhadap tujuan dan situasi tertentu. Karena itu terbuka kemungkinan bahwa dalam satu situasi tertentu harus memakai lebih dari satu metode sekaligus. Dengan demikian cara mengajar yang mempergunakan teknik yang beraneka ragam, manakala penggunaannya didasari oleh pengertian yang mendalam dari pihak guru, akan memperbesar minat siswa untuk belajar dengan sendirinya tentu akan memperbesar peluang pencapaian tujuan pengajaran.

c. Sarana

Pencapaian tujuan pengajaran dapat diwujudkan lebih baik, jika dalam proses belajar-mengajar mempergunakan alat bantu mengajar. Hal ini sesuai dengan pendapat A. Kosasih Djahiri (1980), yang mengatakan : "... maka dalam penggunaan metode inipun termasuk penentuan pendayagunaan aneka jenis ragam media (multi media) dalam proses belajar tadi. Penggunaan media ini`berarti memfungsionalkan aneka jenis indera..."

Hal-hal inilah yang banyak mempengaruhi terjadinya interaksi dua arah antara guru dengan murid, selama proses belajar-mengajar berlangsung.

d. Evaluasi

Setelah proses interaksi belajar-mengajar berakhir dengan memperhatikan keempat faktor tersebut, perlu diadakan langkah evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk memperoleh angka indeks yang menentukan berhasil tidaknya seorang siswa "belajar" dan seorang guru "mengajar".

Agar interaksi edukatif yang berlangsung mencapai hasil optimal, diperlukan juga penentuan langkah-

langkah pengajaran. Menurut Leonard H.Clark (1983), langkah-langkah tersebut sebagai berikut :
... As adapted for teaching the steps are :

1. Define your objectives
2. Study the pupils
3. Modify the objectives in view of the pupils
4. Decide on strategy
5. Set up motivational macchinery
6. Organize the plans
7. Carry out the tactics.

Kutipan tersebut menjelaskan, bahwa pengajaran perlu mengadakan penyesuaian langkah-langkah, diantaranya: menetapkan tujuan instruksional, memahami siswa, menyesuaikan tujuan instruksional dengan tingkat pemahaman siswa, menentukan strategi yang dalam hal ini metode pengajaran, membangkitkan minat siswa, pengorganisasian, perencanaan, serta mencobakan strategi yang telah ditentukan.

Bertolak dari hal-hal di atas, maka diharapkan agar dalam interaksi edukatif selama berlangsung proses belajar-mengajar, guru lebih menekankan keaktifan pada diri siswa. Hal ini sesuai dengan tuntutan kurikulum SMP, baik dalam garis-garis besar program pengajaran maupun dalam pedoman pelaksanaannya dapat terpenuhi.

Untuk mengaktifkan siswa dalam belajar, perlu memperhatikan beberapa prinaip, yang antara lain seperti yang dikemukakan oleh Conny Gemiawan (1985): “Kalau kita hendak mengaktifkan para siswa dalam belajar, seyogianya kita membuat pelajaran itu menantang, merangsang daya cipta untuk menemukan serta menyesankan.” Sedangkan S. Nasution (2002) mengatakan: “... Metode belajar yang mengharuskan pelajar untuk menemukan jawabannya (*discovery*) tanpa bantuan khusus. Dengan memecahkan masalah, pelajar menemukan aturan baru yang lebih tinggi tarafnya aekalipun ia mungkin tidak dapat merumuskannya secara verbal. Menurut penelitian masalah yang dipecahkan sendiri tanpa bantuan khusus, memberikan hasil yang lebih unggul, yang digunakan atau ditransfer dalam situasi-situasi lain. Karena itu bagi pendidikan sangatlah panting untuk mendorong anak menemukan penyelesaian soal dengan pemikiran sendiri”.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan siswa dalam menemukan jawaban permasalahan akan memberi hasil yang lebih unggul, karena terkesan atas prestasi yang dicapainya. Hal yang demikian itu akan membuat siswa untuk selalu berusaha mandiri. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Witherington dan Cronsbach (1982) yang mengemukakan : "... siswa yang sudah mendapat stimuli dari guru tidak akan berhenti belajar, akan tetapi terus menyelidiki dan memperdalam pengetahuan.”

Sehubungan dengan hal tersebut penggunaan metode mengajar yang tepatguna selama proses belajar-mengajar sangat diperlukan. Menurut A. Kosaaih Djahiri (1980), saat ini metode yang dianggap tepat guna dalam pengajaran bahasa Indonesia, ialah "metode yang mampu memfungsionalkan si anak belajar sendiri, serta aneka ragam Jenis media lainnya yang mampu memperlancar dan mengefektifkan proses serta keberhasilan siswa."

Berdasarkan kenyataan bahwa setiap metode dapat digunakan dengan baik oleh guru yang bijaksana. Oleh karena ibu diharapkan pars guru dapat mempertinggi efektifitas metode-metode mengajar dengan berbagai teknik. Salah satu diantaranya, pemakaian asst-alat bantu mengajar, sehingga diperoleh satu sistem mengajar yang

mengajak, merangsang dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut serta mengemukakan pendapat, belajar mengambil keputusan, yang berarti membawa anak pada suasana belajar siswa aktif sesuai dengan tuntutan pendidikan sekarang.

3. Pembahasan

Menurut Winarno Surakhmad (2002), metode yang lazim digunakan dan praktis dilaksanakan cara membina tingkah laku belajar secara edukatif dalam berbagai peristiwa interaksi, ada delapan jenis. Dari kedelapan jenis metode tersebut diantaranya adalah metode ceramah, metode tanya-jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, metode pelaksanaan tugas, metode karya wisata, metode kerja kelompok, dan metode latihan.

a. Dari delapan jenis metode tersebut,sesuai hasil pengolahan data berdasarkan dibtribusi frekuensi, menunjukkan basil secara berurutan sebagai berikut : Metode ceramah, rata-rata 26,12 %.
b. Metode tanya-jawab, rata-rata 20,71%
c. Metode pemberian tugas rata-rata 18,93%.
d. Metode diskusi, rata-rata 15,10%
e. Metode kerja kelompok, rata-rata 11,26%
f. Metode latihan, rata-rata 6,22%
g. Metode demonstrasi, rata-rata 1,62%
h. Metode karya wisata, rata-rata 0,00%.

Hasil rata-rata persentase setiap metode tersebut, untuk ketiga sub bidang studi yang tercakup dalam bidang studi Bahasa Indonesia, dengan perhitungan dart jumlah 98 frekuensi seluruh pemakaian metode mengajar.

Guna meningkatkan mutu mengajar para guru, dirasa perlu pengadaan penataran bags pare guru, termasuk guru bidang studi Bahasa Indonesia. Dari 4 orang guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ulunoyo, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan sudah sudah pernah mengikuti pelatihan, tetapi sebaliknya ada juga yang sama sekali belum pernah mengikuti penataran bidang studi. Para guru yang pernah mengikuti pelatihan bidang studi sebanyak 2 orang (50 %). Para guru yang belum pernah mengikutt pelatihan bidang studi, sebanyak 2 orang (50 %).

Hambatan yang dihadapi dan sangat dirasakan dalam penggunaan metode mengajar bidang studi Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Ulunoyo, secara berurutan disebabkan oleh :

a. Waktu banyak terpakai, rata-rata 49,55%
b. Perlengkapan kurang, rata-rata 29,01%
c. Jumlith siswa banyak, rata-rata 27,67%
d. Pengetahuan siswa kurang, rata-rata 21,42 %
e. Minat siswa kurang, rata-rata 20,98%
f. Biaya kurang, rata-rata 15,62%
g. Guru kurang terampil rata-rata 7,14%

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang hasil penelitian di lapangan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dan mendasari penelitian ini. Setiap penelitian pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab

segala permasalahan yang dihadapi, guna memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Adapun masalah yang dimaksudkan dalam penelitian ini sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu adalah : Masalah tentang penggunaan metode, hambatan, penggunaan metode, pengembangan dan hambatan pengembengan metode, serta penggunaan alat bantu mengajar.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa metode ceramah cukup sering digunakan oleh para guru. Persentase rata-rata menunjukkan 25 % dari jumlah seluruh frekwensi pemakaian jenis metode. Walaupun persentasenya menunjukkan angka yang relatif kecil, tetapi jika dikaitkan dengan jumlah frekwensi pemakaian metode ceramah yang 1 orang, berarti jenis metode tersebut paling sering digunakan dalam proses belajar-mengajar. Kemudian jenis metode lain yang sering digunakan, dan menunjukkan persentase seimbang adalah metode tanya-jawab 25 %, metode pemberian tugas 25 % dan metode diskusi 0 %.

Dengan persentase pemakaian metode ceramah yang tinggi tersebut tidak berarti mendominir seluruh pemakaian metode, sebab ternyata masih dapat diimbangi oleh pemakaian metode lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Kosasih (1980) yang mengatakan bahwa dalam proses belajar-mengajar, perlu penggunaan multi metode. Artinya cara belajar-mengajar tidak monoton dengan satu jenis metode atau teknik belajar-mengajar tok. Guru hendaknya pandai memberikan berbagai jenis teknik yang tentunya harus sesuai dengan keadaan. Memang akan menjemukan kalau terus diisi dengan ceramah saja atau dikte saja atau menyalin saja. Metode variasi lecturing merupakan contoh atau model daripada salah satu metode ini.

Kenyataan di lapangan memang menunjukkan bahwa dalam proses belajar-mengajar, seorang guru tak-kan mungkin hanya menggunakan satu metode saja, melainkan disertai dengan metode lain, apakah metode tanya-jawab, metode pemberian tugas, metode diskusi atau metode lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penggunaan metode ceramah tinggi dimaksudkan adalah metode ceramah bervaruasi. Dengan pengertian metode ceramah digunakan pads awal menjelaskan materi, dengan tidak mengesampingkan penggunaan metode lain.

Metode karya wisata yang sebenarnya sebagai salah satu metode mengacu siswa kepada cara belajar aktif, ternyata pada saat penelitian ini diadakan, tidak seorang gurupun menerapkan metode. Padahal di samping bersifat edukatif, metode ini jugs mempunyai nilai rekratif. Hambatan yang dihadapi para guru dalam menerapkan metode ini adalah masalah biaya yang cukup tinggi, memakan waktu, dan memerlukan perencanaan yang matang, seperti perencanaan menyangkut kegiatan siswa dengan bimbingan terarah serta pengawasan di lapangan.

Persentase hambatan pemakaian metode, secara berurutan disebabkan oleh : waktu banyak terpakai (49,55%), perlengkapan kurang (29,01%) dan karena jumlah siswa banyak (27,67%). Ketiga faktor ini menempati persentase tinggi. Kalau kits analisa ketiga faktor penghambat ini saling berkaitan satu sama lain, di mane keadaan siswa yang cukup banyak dengan sendirinya memerlukan waktu mengajar yang cukup lama, apalagi kalau tidak didukung oleh sarana ataupun perlengkapan yang memadai. Sehingga tidak dapat dipungkiri, bahwa metode ceramah bervariasi banyak digunakan oleh para guru bidang studi Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ulunoyo. Menurut Surakhmad (2002), yang mengatakan : sangat mungkin terjadi bahwa untuk satu tujuan dan situasi tertentu terbuka kemungkinan untuk berbagai cara serta kemungkinan untuk memakai lebih dart sate sekaligus. Setiap metode mempunyai batas-batas kebaikan dan kelemahan, bukan saja terhadap tujuan tertentu, tetapi juga terhadap situasi tertentu. Malahan metode yang satu dapat membuktikan efisienei di tangan guru yang

seorang,tetapi sama sekali gagal di tangan guru yang lain. Karena itu tidak dapat apriori ditetapkan.

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa penggunaan metode ceramah yang disebabkan oleh hambatan-hambatan tersebut di atas bukanlah ceramah yang bersifat monoton. Sedangkan persentase hambatan biaya kurang, perlu ditiadakan sebab dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar tidak harus memerlukan dana yang besar. Untuk persentase pengetahuan siswa kurang, yang menunjukkan 21,24% dan minat siswa kurang 20,98%, dapat teratasi tentang peningkatan alat bantu mengajar. Dengan penggunaan alat bantu mengajar misalnya alat peraga atau buku-buku sebagai literatur yang lebih disempurnakan, tentunya dapat meningkatkan mint siswa untuk belajar, yang pada akhirnya dapat mengatasi pengetahuan yang kurang tersebut.

Hambatan guru kurang terampil (7,14%), sebenarnya hambatan ini tidak perlu terjadi, jika setiap guru sadar akan tanggungjawabnya sebagai pentransfer ilmu atau pengetahuan kepada siswa. Sebagai guru dengan sendirinya akan bertusaha menambah pengetahuan dan ketrampilan melalui berbagai carat diantaranya mempelajari buku-buku, mendengarkan siaran-siaran pendidikan, atau berdiskusi dengan sesama rekan guru.

Persentase hambatan-hambatan pemakaian berbagai pendekatan secara berurutan, yang disebabkan oleh : waktu tidak cukup (61,42%), sarana tidak cukup (47,14%), dorongan lembaga kurang (29,29%), kurang memahami fungsi pendekatan (21,42%), biaya tidak cukup (17,85%).

Faktor hambatan waktu tidak cukup, merupakan hambatan yang tertinggi bobot nersentasenya, yaitu 61,42%. Ada kemungkinan hal ini terjadi disebabkan oleh penyebaran tenaga pengajar bidang studi Bahasa Indonesia, dimana untuk masing-masing sub bidang studi hanya dipegang oleh satu tenaga pengajar untuk setiap sekolah. Sehingga jika ada sekolah yang kelasnya besar atau jumlah kelasnya banyak maka sekolah tersebut memfungsikan guru/tenaga pengajar yang bukan guru bidang studi Bahasa Indonesia.

4.1. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Jenis metode mengajar yang banyak digunakan para guru bidang studi Bahasa Indonesia pada saat penelitian diadakan, adalah metode ceramah bervariasi.
2. Faktor hambatan yang mempengaruhi pemakaian jenis metode mengajar secara berurutan disebabkan oleh : waktu banyak terpakai, perlengkapan kurang, jumlah siswa banyak, minat siswa kurang, pengetahuan siswa kurang, biaya kurang dan karena guru kurang terampil.
3. Hambatan pemakaian pendekatan sebagai pengembangan metode secara berurutan disebab kan oleh: waktu tidak cukup, sarana kurang, dorongan lembaga kurang, kurang memahami fungsi pendekatan, serta biaya tidak ada.
4. Pemakaian alat bantu mengajar oleh Para guru bidang studi bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan secara berurutan adalah : satuan pelajaran, alat peraga, literatur, ilustrasi, dan elektronik.

4.2. Saran

1. Penelitian ini bersifat temporer, maka hasilnya pun mungkin akan berbeda jika diadakan penelitian ulangan pads jangka waktu tertentu.

2. Metode mengajar merupakan salah satu sarana untuk pencapaian tujuan pengajaran selama proses belajar-mengajar berlangsung, untuk itu sebaiknya para guru diberikan penataran tentang metode pengajaran bahasa Indonesia, agar setiap guru memiliki tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam memilih serta menggunakan jenis metode mengajar.
3. Untuk mengatasi sistem pengajaran yang monoton, diharapkan para guru menggunakan metode ceramah bervariasi.

Daftar Pustaka

Clark, Leonard H., 1983. Teaching Social Studies in Secondary School a Hand Book, Mac.Milian Publishing Co. Inc., New York.

Conny Semiawan dkk. 1985. Pendekatan Ketramnilan Proses, Gramedia, Jakarta.

Djahiri, A. Kosasih dan S.A. Somara, 1980. Strategi Belajar Mengajar. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta.

Gafur, Abd. 1982. Disain Instruksional, Tiga Serangkai, Solo.

Moh.Ali, dan Max H.Woney, Inquiry, Discovery, Problem Solving dalam Pengajaran., P3G, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1980.

Mursell, J. 2000. Mengajar Dengan Sukses Jammars, Bandung,

Nasution, S. 2002. Berbaaai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. PT.Bina Aksara, Jakarta.

Surakhmad, Winarno, 2002. Pengantar Interaksi Belajar Dan Teknik Metodologi Pengajaran, Tarsito, Bandung.

Witherington, H.C. dan Lee J. Cronsbach, 1982. Teknik - Teknik Belajar dan Mengajar, Jammers, Bandung.

PENGARUH PENILAIAN PRESTASI KERJA TERHADAP PROMOSI JABATAN GURU DI SMP NEGERI 4 HURUNA, KECAMATAN HURUNA, KABUPATEN NIAS SELATAN

Soda'aro Laia, S.Pd.[1]

ABSTRAK

Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui apakah penilaian prestasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap promosi jabatan guru di SMP Negeri 4 Huruna. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Guru SMP Negeri 4 Huruna yang berjumlah 30 orang. Pengambilan sampel yang digunakan peneliti ini adalah "Sampel Jenuh" dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel peneliti yaitu 30 orang Guru. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu prestasi kerja, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja guru. Analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap promosi jabatan kerja kerja, artinya apabila dilakukan peningkatan prestasi kerja yang semakin baik dapat meningkatkan promosi jabatan guru.

Kata Kunci : *prestasi kerja, promosi jabatan* dan *guru*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan sumber daya manusia (SDM) yang paling penting dalam usaha organisasi/lembaga pendidikan untuk mencapai keberhasilan. Betapapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek sumber daya manusia (guru) sulit untuk mencapai tujuan tertentu. kiranya tujuan-tujuan organisasi/lembaga pendidikan dapat tercapai. Pemerintah dan masyarakat telah menunjukan perhatian yang meningkat terhadap aspek sumber daya manusia tersebut. Nilai-nilai manusia semakin diselaraskan dengan aspek-aspek teknologi maupun ekonomi. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan (*input*) yang bersama unsur lainnya seperti, bahan, modal, mesin dan teknologi diubah menjadi proses manajemen menjadi keluaran (*output*) berupa barang atau jasa dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Prestasi kerja pengajar dari suatu lembaga pendidikan, selalu menekankan pelaksanaan tugas pengajar, sedangkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan adalah bagian dari pekerjaan atau posisi dalam lembaga pendidikan. Para pimpinan lembaga pendidikan secara rutin menilai keefektifan individu melalui proses evaluasi prestasi kerja, evaluasi prestasi kerja ini menjadi dasar untuk kenaikan gaji, promosi, insentif, kompensasi dan jenis imbalan lain yang diberikan lembaga bimbingan belajar itu. Menurut situasi yang lazim setiap individu bekerja dalam kelompok unit kerja, dalam beberapa hal keefektifan kelompok adalah jumlah sumbangan dari seluruh anggotanya, dalam hal lain keefektifan kelompok unit kerja melebihi jumlah sumbangan individual. Karena organisasi terdiri dari individu dan kelompok unit kerja, keefektifan organisasi adalah fungsi dari keefektifan individu dan kelompok unit kerja, walaupun demikian keefektifan organisasi melebihi jumlah keefektifan individu dan kelompok unit kerja. Lembaga pendidikan dapat memperoleh tingkat prestasi kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah prestasi kerja masing-masing bagian individu dan kelompok unit kerja.

Prestasi kerja individu menjadi bagian dari prestasi kerja kelompok unit kerja, yang pada gilirannya menjadi bagian dari prestasi kerja organisasi lembaga pendidikan. Di dalam lembaga pendidikan yang efektif,

[1] *Kepala Sekolah SPMN 4 Huruna, Kabupaten Nias Selatan*

manajemen membantu prestasi kerja secara keseluruhan, yaitu suatu keseluruhan yang lebih besar dari sekedar penjumlahan kelompok-kelompok unit kerja. Tidak ada suatu ukuran atau kriteria yang memadai, yang dapat mencerminkan prestasi kerja lembaga pendidikan. Prestasi kerja lembaga pendidikan harus dilihat dalam hubungan ukuran berganda di dalam suatu kerangka prestasi kerja organisasi lembaga pendidikan mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan. Ukuran prestasi kerja organisasi lembaga pendidikan berhubungan secara langsung dengan keluaran yang diterima oleh organisasi bersangkutan.

Salah satu dorongan seseorang mengejar prestasi kerja pada suatu organisasi lembaga pendidikan adalah adanya kompensasi, sudah menjadi sifat dasar dari manusia pada umumnya untuk menjadi lebih baik, lebih maju dari posisi yang dipunyai pada saat ini. Para pengajar juga mulai memikirkan bahwa kerja bukanlah hanya sekedar untuk memperoleh/ pendapatan, tetapi juga memikirkan untuk menyatakan dirinya *Actualization*, karena itulah mereka menginginkan suatu dorongan dalam hidupnya. Dengan meningkatnya kemajuan teknologi mengakibatkan semakin berkembangnya pemahaman manusia tentang pentingnya aspek sumber daya manusia dalam suatu organisasi lembaga pendidikan.

Bagaimanapun tingginya teknologi tanpa didukung oleh manusia sebagai pelaksana operasionalnya, tidak akan mampu menghasilkan suatu output yang sesuai dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Betapapun modernnya mesin-mesin yang digunakan, unsur manusia masih akan tetap memegang peranan yang sangat menentukan. Oleh karena itu pemahaman dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di dalam suatu organisasi lembaga pendidikan menjadi sangat penting. Dalam kehidupan modern dewasa ini, faktor manusia sangatlah diutamakan dengan menitikberatkan secara mendasar pada pengukuran hasil nyata yang mampu dicapai oleh seorang tenaga kerja yang terlibat dalam proses penentuan sasaran.

Prestasi kerja didalam organisasi lembaga pendidikan diukur dari mampu tidaknya mewujudkan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya dan bila mampu jauh hasil nyatanya dibandingkan dengan sasaran tersebut. Ketidakjelasan dalam menetapkan sasaran, akan mengakibatkan tenagakerja tidak dapat mengevaluasi dan tidak mengetahui sampai sejauh mana prestasi kerja yang telah dicapainya.

Pengembangan karir melalui promosi jabatan, salah satu faktor yang dianggap penting pada perkembangan organisasi/lembaga pendidikan dalam menjawab tantangan di masa mendatang. Setiap organisasi/lembaga pendidikan harus menerima kenyataan, bahwa eksistensinya di masa mendatang tergantung pada SDM. Tanpa memiliki SDM yang kompotitif sebuah organisasi/lembaga pendidikan akan mengalami kemunduran dan akhirnya dapat tersisih karena ketidakmampuan menghadapi pesaing. Kondisi seperti ini mengharuskan organisasi untuk melakukan pembinaan karier SDM yang harus dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan. Dengan kata lain pembinaan karier salah satu kegiatan manajemen SDM, harus dilaksanakan sebagai kegiatan formal yang dilakukan secara integrasi dengan kegiatan manajemen SDM lainnya (Hadari Nawawi, 2005 : 288). Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka penulis mengangkat judul :"**Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Promosi Jabatan Guru di SMP Negeri 4 Huruna, Kabupaten Nias Selatan**"

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui apakah penilaian prestasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap promosi jabatan guru di SMP Negeri 4 Huruna.

1.3. Metode Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010:115). Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Guru SMP Negeri 4 Huruna yang berjumlah 30 orang yaitu guru PNS dan honorer. Pengambilan sampel yang digunakan peneliti ini adalah **"**Sampel Jenuh**"** dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel peneliti yaitu 30 orang Guru.

Variabel dalam penelitian ini adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti/menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel Bebas (X) yaitu variabel yang nilainya tidak tergantung terhadap variabel lain, dalam hal ini adalah variabel penilaian prestasi kerja Variabel terikat (Y) adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja Guru. Analisis data menggunakan analisis regresi sederhana.

2. Uraian Teoritis

2.1. Penilaian Prestasi kerja

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat di pisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan dan penerapan kompetensinya. Dalam hal ini adalah kompetensi yang sangat diperlukan bagi guru seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Penguasaan dan penerapan kompetensi sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran, pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan yang sesuai dengan fungsi sekolah/madrasah. Untuk itu, perlu dikembangkan sistem penilaian kinerja guru.

Menurut Mangkunegara (2002:33) prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. Dan adapun prestasi kerja itu sendiri adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dengan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu.

2.2. Promosi Jabatan Guru

Menurut Siagian (2009:169) promosi jabatan adalah pemindahan guru, dari satu jabatan atau ketempat jabatan atau tempat yang lebih tinggi serta diikuti oleh tugas tanggung jawab, dan wewenang yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Pada umumnya promosi yang di ikuti dengan peningkatan/*income* serta fasilitas yang lain. Penghargaan ataas hasil kinerja biasanya dinyatakan dalam bentuk promosi jabatan. Seorang

guru memandang promosi sebagai sesuatu yang paling menarik dibandingkan dengan yang lain, hal ini disebabkan karena promosi bersifat permanen berlaku untuk jangka waktu yang lama.

Istilah promosi jabatan berarti kemajuan, dimana semua promosi dapat terjadi ketika seorang guru dinaikan jabatan dari posisi rendah ke posisi yang lebih tinggi. Kenaikan gaji dan tanggung jawab biasanya turut menyertai promosi jabatan. Promosi jabatan adalah sebuah pengembangan karier yang dilakukan oleh guru.

Menurut Hasibuan (2013:111) merumuskan indikator-indikator umum yang diperhitungkan dalam proses promosi jabatan sebagai berikut:

a) Kejujuran
b) Disiplin
c) Prestasi kerja
d) Kerja sama
e) Kecakapan
f) Loyalitas
g) Kepemimpinan
h) Komunikatif
i) Pendidikan

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dengan persamaan untuk menganalisis pengaruh prestasi kerja terhadap promosi jabatan. Hasil uji regresi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.053	1.930		1.582	.125
	Prestasi_kerja	.847	.125	.788	6.763	.000

a. Dependent Variable: Promosi_jabatan

Dari hasil uji regresi diperoleh persamaan regeresi :

$$Y = 3{,}053 + 0{,}847\ X$$

Hal ini berarti bahwa dengan penambahan setiap satuan prestasi kerja guru sebesar satu satuan akan menambah promosi jabatan sebesar 0,847 satuan. Misalkan prestasi kerja meningkat sebesar X akan menambah promosi jabatan yang dilakukan sebesar 0,731 X tersebut.

Uji hipotesis pengaruh prestasi kerja guru (X) terhadap promosi jabatan guru (Y). Prosedur dan kriteria penerimaan serta penolakan hipotesis ditetapkan sebagai berikut :

a. Hipotesis

H_0: $b_1 = 0$ artinya, prestasi kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap promosi jabatan guru.

H_1 : $b_1 \neq 0$ artinya, prestasi kerja mempunyai pengaruh terhadap promosi jabatan guru.

b. Uji Hipotesis

Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ (α, N-k-1), maka H_0 ditolak artinya prestasi kerja mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap promosi jabatan guru dan apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya prestasi kerja tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap promosi jabatan guru.

c. Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS diketahui t_{hitung} sebesar 6,763 (Tabel 4.12).

d. Dengan α= 5%, t_{tabel} (5%; 28) diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,701. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa t_{hitung} (6,763) > t_{tabel} (1,701), maka dapat disimpulkan H_1 diterima, artinya prestasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap promosi jabatan guru.

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *R square* sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Koefisisen Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.788[a]	.620	.607	1.85856	1.214

a. Predictors: (Constant), Prestasi_kerja

b. Dependent Variable: Promosi_jabatan

Tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien R Square sebesar 0,620 menunjukkan bahwa promosi jabatan guru dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu prestasi kerja (X) sebesar 62 %, yang artinya prestasi kerja memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mempengaruhi promosi jabatan guru. Sedangkan sisanya yaitu 38 % (100 % - 62 %) dipengaruh oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3.2. Pembahasan

Dari hasil persepsi respoden diketahui bahwa prestasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap promosi jabatan guru. pada SMP Negeri 4 Huruna, Kabupaten Nias Selatan. Semakin baik prestasi kerja seorang guru dalam melaksanakan pekerjaan berakibat pada semakin baik promosi jabatan yang akan didapatkan. Prestasi kerja guru yang menunjukkan peningkatan dapat membantu guru tersebut untuk dipromosikan jabatannya, karena salah satu syarat promosi jabatan adalah prestasi kerja yang dapat dilihat dari catatan-catatan kerja selama ini yang ada (Sukma, 2012).

Hasil penelitian ini didukung oleh pernyataan Wier *et al*. (2002) prestasi kerja berpengaruh secara langsung dan positif terhadap promosi jabatan. Mandiangan (2015) juga mengatakan bahwa prestasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap promosi jabatan. Hasil penelitian Rani (2012) juga mengatakan bahwa prestasi kerja sangat berpengaruh terhadap promosi jabatan itu sendiri sehingga untuk mendapatkan promosi jabatan yang maksimal dalam melaksanakan pekerjaan dibutuhkan prestasi kerja yang baik.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu organisasi dalam menentukan umpan balik (*feedback*) bagi pegawai yang telah memberikan usaha

kerjanya. Seperti adanya pemberian imbalan dari organisasi. Imbalan tersebut dapat berupa uang, barang, pelayanan maupun kesempatan pengembangan karir bagi pegawai.

Menurut Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja, bahwa penilaian prestasi kerja PNS dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pegawai negeri sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan organsiasi. Hasil dari penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karir pegawai negeri sipil, yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, pengangkatan dan penempatan serta bidang pengembangan karir dan kemampuan seorang PNS. Dari penilaian prestasi kerja inilah akan terlihat apakah pegawai sudah bekerja sesuai dengan porsinya atau perlu adanya tindakan yang harus diambil. Seperti adanya pendidikan, pelatihan, rotasi, mutasi maupun promosi jabatan jika diperlukan. Disi lain penilaian prestasi kerja membantu organisasi untuk melakukan analisis jabatan yaitu proses pengumpulan informasi yang menyangkut tentang jabatan untuk menetapkan deskripsi jabatan yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Dengan analisis jabatan inilah akan menghasilkan informasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan. Apakah perlu adanya pengisian jabatan yang kosong melalui pekrekrutan maupun promosi.

Dengan demikian maka penilaian prestasi kerja pegawai merupakan sebuah cara untuk mengetahui apakah pegawai yang bersangkutan layak untuk mendapatkan promosi jabatan. Promosi jabatan dilakukan untuk bisa menjaga kestabilan kinerja perusahaan dari segi sumberdaya manusianya melalui penilaian prestasi kerja sumberdaya manusia yang baik akan menghasilkan produktivitas yang baik pula bagi organisasi.

Menurut Hasibuan (2013) bahwa ada beberapa indikator yang diturunkan dari penilaian prestasi kerja dengan melihat tingkat kemampuan, kedisiplinan, kepribadian, tanggungjawab, pendidikan, pengalaman, serta insiatif dan kreatif. Berdasarkan indikator tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian prestasi kerja guru amat penting dilakukan untuk membantu pihak sekolah dalam mengambil keputusan mengenai pemberian bonus, kenaikan jabatan, kenaikan gaji, pemindahan pada unit yang sama maupun pemutusan hubungan kerja. Untuk itu dibutuhkan informasi yang penting bagi keputusan penempatan tersebut adalah melalui penilaian prestasi kerja. Dari penilaian prestasi ini dapat diketahui apakah penempatannya sudah tepat ataukah perlu dipindahkan ke bagian lain atau mungkin dipromosikan. Apabila ada kemungkinan untuk dipromosikan, maka guru diberi pendidikan lanjutan atau latihan tambahan yang diperlukan untuk menduduki jabatan yang direncanakan akan diduduki. Hal itu juga dibuktikan dengan uji statistik yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara penilaian prestasi kerja guru terhadap promosi jabatan yang disebabkan oleh indikator tersebut.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan jawaban responden maka dapat diketahui tanggapan guru terhadap prestasi kerja guru di SMP Negeri 4 Huruna, Kabuapten Nias Selatan sebesar 3,03 (baik).
2. Berdasarkan jawaban responden maka dapat diketahui tanggapan guru terhadap promosi jabatan di SMP Negeri 4 Huruna, Kabupaten Nias Selatan sebesar 3,18 (baik).

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap promosi jabatan kerja kerja, artinya apabila dilakukan peningkatan prestasi kerja yang semakin baik dapat meningkatkan promosi jabatan guru.

4.2. Saran

Hendaknya sekolah dalam memberikan promosi jabatan bagi guru yang memiliki prestasi yang baik sesuai dengan indikator penilaian prestasi guru.

Daftar Pustaka

Hasibuan Malayu, S. P. 2013. Manajemen Sumberdaya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta.

Mandiangan, E. F., dan Rahyuda, A.G. 2015. Pengaruh Prestasi Kerja, Senioritas dan Loyalitas kerja terhadap Promosi jabatan pada Discovery Kartika Plaza Hotel Bali. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 4(5): h: 1386-1405

Mangkunegara Anwar Prabu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Perka BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2011.

Siagian, S. P. 2009. Manajemen Sumberdaya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta.

Simamora Henry. 2006. Sumber Daya Manusia. STIE, Yogyakarta.

Srimulyo, Koko. 1999. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perpustakaan di Kotamadya Surabaya. Tesis. PPS-Universitas Aerlangga, Surabaya.

Sugiyono. 2010. Statistik untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung.

Sukma Juwati Tajuddin. 2012. Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Terhadap Promosi Jabatan pada PT. Semen Tonasa Kab. Pengkap. Skripsi pada Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makasar. diakses tanggal 8 Agustus 2017 pukul 20:00 http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/ 2253/SKRIPSI%20LENGKAP%20FEB-MANAJEMEN-SUKMA%20JUWATI% 20TAJUDDIN.pdf?sequence=1

Wier, B., Stone, N., and Hunton, J.E. 2002. Promotion and Performance Evaluation of Managerial Accountants. *Journal of Management Accounting Research*, 1(4): h:189

PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI PENANAMAN NILAI-NILAI DALAM PROSES PEMBELAJARAN

Suarti Laia, S.Pd.[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS melalui penanaman nilai-nilai dalam proses pembelajaran. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Huruna, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian sosial yang lazim digunakan menurut adalah angket (questionaire), wawancara (interview), observasi (observation), dokumenter (secondary sources), dan tes (test). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran IPS sebagai pendidikan nilai adalah dengan menjadikan pendidikan nilai sebagai hidden curruculum (kurikulum tersembunyi). Strategi pembelajaran yang dilakukan para guru dalam melaksanakan pendidikan nilai dalam pembelajaran IPS adalah melalui materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran seperti penanaman nilai disiplin, jujur, pantang menyerah dalam materi Sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi melalui pesan pembelajaran.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, selain member keuntungan berlipat, di sisi lain juga membawa pengaruh negatif bagi tatanan kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi yang begitu memudahkan pelayanan kebutuhan manusia pada sisi lain juga mempercepat tersebarnya pengaruh negatif bagi eksistensi nilai-nilai yang telah berkembang di suatu masyarakat. Masyarakat sering dibuat miris melihat berbagai kasus yang dilakukan kalangan pelajar akhir-akhir ini. Berbagai fenomena yang pada masa lalu tabu, kini menjadi biasa bahkan tren. Pernyataan ini dibuktikan dengan banyaknya berita baik melalui media cetak maupun elektronik seperti kekerasan yang dilakukan anak-anak usia sekolah, lunturnya kesopanan anak pada orang tua, *free sex* dan kasus aborsi pada remaja yang kadang terang-terangan diekspose di media tanpa ada perasaan bersalah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk pendidikan dasar dan menengah memuat tentang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SMP/MTs mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.

Mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan.

---

[1] *Pengawas SMPN 1 Huruna, Kecamatan Hunura, Kabupaten Nias Selatan*

Berdasarkan tuntutan permen tersebut sangat jelas bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang berorientasi tidak hanya pengembangan intelektual, tetapi juga sikap dan ketrampilan, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang peningkatan hasil belajar IPS melalui penanaman nilai-nilai dalam proses pembelajaran.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS melalui penanaman nilai-nilai dalam proses pembelajaran.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Huruna, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian sosial yang lazim digunakan menurut adalah angket (*questionaire*), wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dokumenter (*secondary sources*), dan tes (*test*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *triangulasi*, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Lexy M Noloeng, 2000:178).

2. Analisis Teoritis

2.1. Pendidikan Nilai

Nilai menurut Mulyana (2004:11), adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang. Menurut Frankel (Kartawisastra, 1980: 1) nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya untuk dijalankan dan dipertahankan. Ditegaskan oleh Amborise dalam Mulyana (2004:23), bahwa nilai itu sifatnya relatif yang merupakan landasan bagi perubahan dan dapat ditanamkan melalui berbagai sumber seperti keluarga, masyarakat, agama,media massa, tradisi, dan dalam pergaulan.

Rokeach dalam Mulyana (2004:27) membuat klasifikasi nilai menjadi dua yakni nilai instrumental dan nilai terminal. Nilai instrumental sering juga disebut nilai antara, dan nilai terminal adalah sebagai nilai akhir. Sebagai contoh manusia yang memiliki nilai insrumental hidup bersih, dia memiliki nilai akhir secara konsisten yakni nilai keindahan dan kesehatan.

Selain dua klasifikasi nilai seperti yang disebutkan di atas, nilai yang sering dijadikan rujukan manusia dalam kehidupannya dalam enam nilai yang terdapat dalam teori Spranger dalam Mulyana (2004: 32-35) yakni nilai teoritik, nilai ekonomis, nilai estetik, nilai sosial, nilai politik, dan nilai agama. Nilai*teoritik* melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai *ekonomis*, terkait dengan perimbangan nilai yang berkadar untung dan rugi, yang berarti mengutamakan kegunaan sesuatu bagi manusia. Nilai *estetik*, disebut juga sebagai nilai keindahan yang sangat tergantung pada subjektif seseorang. Nilai *sosial*, berakumulasi pada nilai tertinggi yakni kasih sayang antar manusia. Nilai *politik*, kadar nilainya bergerak dari pengaruh yang rendah menuju tinggi, atau sering disebut sebagai nilai kekuasaan. Nilai *agama*, merupakan nilai yang bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan.

Nilai merupakan fondasi penting dalam menentukan karakter suatu masyarakat dan suatu bangsa. Nilai tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi melalui proses penyebaran dan penyadaran, yang salah satunya adalah

pendidikan di sekolah. Pendidikan nilai menurut Mulyana (2004:119) adalah pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Pendidikan nilai dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan. Secara khusus menurut APEID (*Asia and the Pasific Programme of Educational Innovation for Develompement)* pendidikan nilai ditujukan untuk :

1). Menerapkan pembentukan nilai kepada anak,

2). Menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan, 3) Membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut.

2.2. Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran IPS

Pendidikan IPS (Social Studies) menurut Mayhood dkk., (1991: 10), "*The Social Studies are comprissed of those aspests of history, geography, and philosophy which in practice are selected for instructional purposes in schools and collegs"*

National Council for the Social Studies (NCCS) memberikan definisi yang lebih tegas, seperti yang dikutip Catur (2004), bahwa IPS sebagai "*the study of political, economic, culturals, and environment aspects of societies in the past, present and future"* Noman Somantri memberikan penjelasan PIPS adalah suatu *synthetic discipline* yang berusaha untuk mengorganisasikan dan mengembangkan substansi ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Makna *synthetic discipline*, bahwa PIPS bukan sekedar mensistesiskan konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga mengkorelasikan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Secara lebih tegas, bahwa Pendidikan IPS memuat tiga sub tujuan, yaitu; Sebagai pendidikan kewarganegaraan, sebagai ilmu yang konsep dan generalisasinya dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, dan sebagai ilmu yang menyerap bahan pendidikan dari kehidupan nyata dalam masyarakat kemudian dikaji secara reflektif.

Tujuan pendidikan IPS secara umum adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik, dengan berbagai karakter yang berdimensi spiritual, personal, sosial, dan intelektual (Soedarno Wiryohandoyo, 1997). PIPS menurut NCCS mempunyai tujuan informasi dan pengetahuan*(knowledge and information)*, nilai dan tingkah laku *(attitude and values)*, dan tujuan ketrampilan*(skill)*: sosial, bekerja dan belajar, kerja kelompok, dan ketrampilan intelektual (Jarolimelc, 1986:5- 8).

Menurut Awan Mutakin (1998), tujuan dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah untuk mengembangkan siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Dari rumusan tujuan tersebut dapat dirinci bahwa tujuan IPS adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar:

1) Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat.

2) Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial.

3) Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat.
4) Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang tepat.
5) Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar *survive*yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat.

Berdasarkan konsep dan tujuan IPS dapat dirangkum bahwa ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi tema-tema 1) Manusia, Tempat, dan Lingkungan, 2) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan, 3) Sistem Sosial dan Budaya , dan 4)Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan.

2.3. Karakteristik Mata Pelajaran IPS

Menurut materinya, ruang lingkup materi IPS adalah :

1) Merupakan perpaduan atau integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora.
2) Terkait dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan kebangsaan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta tuntutan dunia global.
3) Jenis materi IPS dapat berupa fakta, konsep dan generalisasi, terkait juga dengan aspek kognitif, afektif, psikomotorik dan nilai-nilai spiritual.

2.4. Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran IPS

Berdasarkan penjelasan tentang hakikat pendidikan di atas, maka sesungguhnya pendidikan IPS dengan pendidikan nilai adalah bagai dua sisi mata uang logam. Sangat banyak kesempatan untuk saling memadukan dalam pembelajaran IPS dan nilai.

Untuk memperjelas jawaban di atas, kita dapat melihat berbagai status pendidikan nilai yakni;

1) Pendidikan nilai sebagai konsentrasi kajian
   Pendidikan nilai sebagai kosentrasi kajian terdapat di perguruan tinggi, seperti program pasca sarjana.
2) Sebagai Mata pelajaran Moral dan Agama
   Mata pelajaran agama dan moral merupakan bagian dari pendidikan nilai.
3) Sebagai bidang studi pembulat
   Konsep ini banyak ditemukan di perguruan tinggi dengan istilah-istilah pengelompokan mata kuliah.
4) Pendidikan nilai dalam program integrasi
   Pendidikan nilai dapat terintegrasi atau terpadu dalam mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Artinya dalam pembelajaran bidang studi guru selalu memasukkan pendidikan nilai dalam kegiatan pembelajaran. Istilah pembelajaran imtaq yang tidak asing bagi pelaksana pendidikan di Indonesia merupakan salah satu bentuk integrasi dalam pembelajaran. Pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran dapat diintegrasikan dengan pendidikan nilai di Indonesia.
5) Pendidikan nilai dalam program ekstrakurikuler
   Pendidikan nilai tidak cukup hanya dilaksanakan melalui pembelajaran formal dalam mata pelajaran. Bahkan kadang pembelajaran nilai di dalam kelas kadang kurang menyentuh pendidikan nilai yang sesungguhnya.

Pendidikan nilai dapat dilakukan di mana saja dan dalam situasi apapun. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, dapat dikembangkan program pendidikan nilai yang sangat strategis.

6) Pendidikan nilai dalam pengembangan kurikulum tersembunyi

Hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi merupakan kurikulum yang berkembang secara alamiah atau tidak direncanakan secara khusus. Diantara keenam pendekatan cara pendidikan nilai yang disebutkan di atas, nomor 2, 4, 5, dan 6 yang paling memungkinkan untuk dikembangkan pada pendidikan SMP.

Menurut Krathwohl (1964), proses pembentukan (dan pengembangan) nilai-nilai pada anak didik itu ada lima tahap.

a. *Receiving* (menyimak dan menerima). Dalam hal ini anak menerima secara aktif, artinya anak telah memilih untuk kemudiaj menerima nilai. Jadi pada tahap ini anak baru menerima saja.

b. *Responding* (menanggapi). Pada tahap ini anak sudah mulai bersedia menerima dan menanggapi secara aktif. Dalam hal ini ada tiga tahapan sendiri, yakni *manut* (menurut), bersedia menaggapi, dan puas dalam menaggapi.

c. *Valuing* (memberi nilai), pada tahap ini anak sudah mulai mampu membangun persepsi dan kepercayaan terkait dengan nilai yang diterima. Pada tahap ini ada tiga tingkatan yakni : percaya terhadap nilai yang diterima, merasa terikat dengan nilai dipercayai, dan memiliki keterkaitan batin dengan nilai yang diterima.

d. O*rganization*, dimana anak mulai mengatur sistem nilai yang ia terima untuk ditata dalam dirinya dalam konteks perilaku.

e. *Characterization,* atau karakterisasi nilai yang ditandai dengan ketidakpuasan seseorang untuk mengorganisir sistem nilai yang diyakininya dalam hidupnya yang serba mapan, ajek, dan konsisten.

Dalam pendidikan nilai kita menginginkan munculnya kesadaran pelaksanaan nilai-nilai positif dan menghindarkan nilai-nilai negatif. Nilai-nilai positif tersebut adalah : amal saleh, amanah, antisipatif, baik sangka, kerja keras, beradab, berani berbuat benar, berani memikul resiko, berdisiplin, lapang hati, berlembut hati, beriman dan bertakwa, berinisiatif, berkemauan keras, berkepribadian, berpikiran jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bersifat konstruktif, bersyukur, bertanggungjawab, bertenggangrasa, bijaksana, cerdas, cermat, demokratis, dinamis, efisien, empati, gigih, hemat, ikhlas, jujur, kesatria, komitmen, kooperatif, kospmopolitan (mendunia), kreatif, kukuh hati, lugas, mandiri, manusiawi, mawasdiri, mencintai ilmu, menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai pendapat orang lain, menghargai waktu, patriotik, pemaaf, pemurah, pengabdian, berpengendalian diri, produktif, rajin, ramah, rasa indah, rasa kasih sayang, rasa keterikatan, rasa malu, rasa memiliki, rasa percaya diri, rela berkorban, rendah hati, sabar, semangat kebersamaan, setia, siap mental, sikap adil, hormat, nalar, tertib, sopan santun, sportif, susila, taat asas, takut bersalah, tangguh, tawakal, tegar, tegas, tekun, tepat janji, terbuka, ulet, dan sejenisnya.

Adapun nilai-nilai negatif yang seharusnya dihindari adalah ; anti resiko, boros, bohong, buruk sangka, biadab, curang, ceroboh, cengeng, dengki, egois, fitnah, feodalistik, gila kekuasaan, iri, ingkar janji, jorok, keras kepala, khianat, kedaerahan, kikir, kufur, konsumtif, kasar, kesukuan, licik, lupa diri, lalai, munafik, malas, menggampangkan, materialistik, mudah percaya, mementingkan golongan, mudah terpengaruh, mudah tergoda, rendah diri, meremehkan, melecehkan, menyalahkan, menggunjing, masa bodoh, otoriter, pemarah, pendendam,

pembenci, pesimis, pengecut, pencemooh, perusak, provokatif, putus asa, ria, sombong, serakah, sekuler, takabur, tertutup, tergesa-gesa, tergantung, omong kosong, picik, dan sejenisnya. (Sjarkawi, 2008:35)

3. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 Huruna, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan guru-guru IPS memasukkan secara tegas dalam silabus dan RPP Indikator-indikator yang dikembangkan dalam silabus pembelajaran IPS SMP belum menunjukkan penyebutan secara eksplisit indikator yang menggambarkan penanaman nilai-nilai dalam pembelajaran. Hampir seluruh indikator yang dikembangkan menunjukkan dominasi aspek kognitif dalam pembelajaran IPS.

Dari RPP yang disusun para guru IPS penanaman nilai-nilai dalam pembelajaran belum dimasukkan secara eksplisit dalam indikator pembelajaran. Dalam materi pembelajaran juga belum menunjukkan pengembangan nilai-nilai dalam pembelajaran IPS.

Nilai-nilai pembelajaran muncul secara implisit dalam sekenario pembelajaran dan secara eksplisit dalam penilaian pembelajaran. Dalam sekenario pembelajaran, para guru telah berupaya membuat variasi pembelajaran dengan diskusi, pengamatan, dan bermain peran. Hal ini menunjukkan adanya upaya penanaman nilai dalam pembelajaran IPS. Misalnya untuk mengamati kegiatan masyarakat di sekitar lingkungan, guru IPS menjadikannya sebagai media dan sumber belajar kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini guru dapat menanamkan nilai-nilai seperti semangat bekerja, bekerjasama, tidak mudah putus asa,

Penanaman nilai-nilai dalam pembelajaran IPS SMP Negeri 1 Huruna, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan sudah dilakukan para guru IPS. Penanaman ini lebih merupakan sebagai dampak pembelajaran IPS yang menunjukkan adanya hiden curriculum dalam pembelajaran IPS. Walaupun tidak dicantumkan secara tegas dalam perangkat pembelajaran, namun pengembangan nilai-nilai positif dalam pembelajaran IPS telah dilaksanakan. Dari data yang diperoleh, pada dasarnya para guru IPS telah melaksanakan penanaman nilai-nilai dalam pembelajaran IPS. Nilai-nilai yang dikembangkan disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Hanya saja dalam strategi pembelajaran, penanaman nilai-nilai dalam pembelajaran IPS belum ditegaskan secara eksplisit. Sebagai contoh, dalam penyusunan Silabus, baik materi maupun indicator pembelajaran belum menunjukkan adanya upaya pengembangan nilai-nilai secara eksplisit.

Penyusunan RPP seharusnya para guru dapat mengembangkan lebih dinamis untuk menanamkan pendidikan karakter secara eksplisit. Tetapi cara ini belum dilaksanakan oleh guru. Ada beberapa penyebab, di antaranya adalah masih belum beraninya para guru mengembangkan RPP sesuai dengan kondisi sekolah, perasaan jam pembelajaran IPS yang sangat sedikit, dan beratnya muatan materi yang dikembangkan dalam pembelajaran IPS.

Beberapa hal yang seharusnya dapat dikembangkan dalam pendidikan nilai melalui pembelajaran IPS adalah pengembangan RPP yang menekankan pendidikan nilai dalam perumusan indikator pembelajaran, pengembangan materi pembelajaran, penyusunan sekenario pembelajaran, penggunaan media dan sumber belajar, dan penilaian pembelajaran IPS. Tetapi hal ini belum dioptimalkan oleh para guru IPS. Penanaman nilai-nilai dalam pembelajaran IPS masih bersifat *hidden* (tersembunyi). Hal ini dibuktikan dari sejumlah wawancara dengan para guru IPS yang semua menyatakan selalu menyisipkan pesan-pesan penting dalam pembelajaran sebagai

upaya penanaman nilai-nilai positif bagi peserta didik. Penggunaaan media pembelajaran juga belum optimal sebagai salah satu sarana penanaman nilai. Sebagian penyebabnya adalah belum optimalnya para guru mengembangkan media pembelajaran IPS yang menantang. Penyebab lain adalah belum lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan media pembelajaran IPS. Idealnya penggunaan media pembelajaran IPS kreatif dapat dilakukan dengan membuat variasi media sederhana namun menantang peserta didik untuk menggali nilai-nilai.

Evaluasi pembelajaran yang dilakukan para guru juga telah menunjukkan adalanya upaya menilai nilai-nilai atau afeksi peserta didik. Namun hal ini juga belum optimal. Idealnya para guru dapat mengembangkan penilaian yang lengkap dengan melaksanakan rencana pembelajaran yang lengkap. Tetapi dari pengamatan para guru bahwa penanaman nilai-nilai tersebut dirasakan ada hasilnya. Walaupun tidak menunjukkan ukuran secara pasti, para guru menyebutkan contoh-contoh misalnya dalam bersikap, bergaul, dan kreativitas para siswa menunjukkan pentingnya penanaman nilai dalam pembelajaran IPS.

4. Penutup

Dari deskripsi dan analisis penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang telah dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran IPS sebagai pendidikan nilai adalah dengan menjadikan pendidikan nilai sebagai *hidden curruculum* (kurikulum tersembunyi).
2. Strategi pembelajaran yang dilakukan para guru dalam melaksanakan pendidikan nilai dalam pembelajaran IPS adalah melalui materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran seperti penanaman nilai disiplin, jujur, pantang menyerah dalam materi Sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi melalui pesan pembelajaran.
3. Peserta didik merespon positif pembelajaran yang berbasis pada nilai-nilai, terutama pembelajaran nilai yang sifatnya fasilitasi bukan indoktrinasi.

Daftar Pustaka

Abdul Gafur, 2003. "Penerapan Konsep dan Prinsip Pembelajaran Kontekstual *(Contextual Teaching and Learning)* dan Disain Pesan dalam Pengembangan Pembelajaran dan Bahan Ajar". *Cakrawala Pendidikan*, 0216-1370.

Arnie Fajar. 2004. *Portofolio dalam Pembelajaran IPS.* Remaja Rosda Karya. Bandung.

Barth, James L, *Methods of Instruction in Social Studies Education*. University Press of America, New York.

Darmiyati Zuchdi. 2008. Humanisasi Pendidikan. *Makalah.* Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Jarolimek, John, 1982. *Social Studies in Elementary Education*. Mav Millan, London.

Mawardi Lubis. 2008. *Evaluasi Pendidikan Nilai.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Martorella, Peret H. 1994. *Social Studies for Elementary School Children,* Mac Millan, New York.

M. Numan Somantri, 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Rosda, Bandung.

N. Daljoeni, 1992. *Dasar-dasar IPS,* Alumni, Bandung.

Noeng Muhadjir, 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Rake Sarasin, Yogyakarta.

S. Nasution, 2003. *Asas-Asas Kurikulum,* Bumi Aksara, Jakarta.

Rohmat Mulyana. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai.* Bandung: Alfabeta.

Saidihardjo, "Jatidiri Sumber Daya Manusia dan Tantangan PIPS pada Era Globalisasi" makalah Seminar FORKOM VIII Pimpinan FPIPS/JPIPS se-Indonesia, Jakarta 11-12 November 1997 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

PENGGUNAAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS SISWA SMP NEGERI 1 HILISALAWA'AHE, KECAMATAN HILISALAWA'AHE, KABUPATEN NIAS SELATAN

Yulimurniwati Bu'ulolo, S.Pd.[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan pendekatan kerampilan proses dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa SMP Negeri 1 Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (classroom action research) Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu praktik pembelajaran di kelas secara berulang-ulang sambil melakukan perbaikan dalam rangka untuk mencapai tujuan atau mencapai hasil yang diharapkan. Penelitian tindakan sebagai bentuk investigasi yang bersifat reflektif partisipatif, kolaboratif dan spiral, yang memiliki tujuan untuk memperbaiki sistem, metode kerja, proses, isi, kompetensi dan situasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pendekatan keterampilan proses juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, karena dengan model pendekatan keterampilan proses siswa menjadi lebih kreatif hal tersebut terlihat dari kreativitas siswa dalam proses pembelajaran, siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar misalnya pada saat mengidentifikasi masalah, mencari sumber-sumber informasi, siswa sering mengajukan pertanyaan, memiliki banyak gagasan, menyatakan pendapat pada saat diskusi, memiliki rasa keindahan, senang dengan hal-hal yang baru.

Kata Kunci : *keterampilan proses* dan *hasil belajar siswa*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup dan menginginkan semuanya yang terlibat di dalamnya senantiasa menjadikan dirinya manusia. Karena hakikatnya pendidikan bertujuan memanusiakan manusia, Sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pendidikan Nasional yang termasuk dalam UU No.20 tahun 2003 Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa tehadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran berarti guru memandang siswa adalah subyek belajar yang diharapkan dapat mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Indrawati *dalam* Trianto (2010) sebagai berikut keterampilan proses adalah keterampilan intelektual sosial maupun sosok yang diperlukan untuk dapat mengembangkan lebih lanjut pengetahuan atau konsep yang dimiliki. Dengan dimilikinya keterampilan ini siswa berpeluang untuk dapat memperoleh konsepkonsep baru atau informasi-informasi baru.

SMP Negeri 1 Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara, merupakan lembaga pendidikan yang memiliki tujuan secara umum yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut yang ingin dicapai.

Kreteria Ketuntasan Minimum (KKM) untuk mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Hilisalawa'ahe adalah 70. Bila melihat angka di tersebut rentang nilai Ulangan Harian I (UH I) untuk interval 80-95 dan untuk interval

[1] *Pengawas SMPN 1 Hilisalawa'ahe, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kab. Nias Selatan*

nilai 60-79. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sekitar 42,32% siswa yang mencapai nilai Kreteria Ketuntasan Minimum (KKM) berkategori sangat baik dan baik, sedangkan untuk interval nilai 40-59 dan untuk interval nilai 0-39 yaitu kategori kurang dan sangat kurang sekitar 57,68 % tidak mencapai nilai Ulangan Harian yang tuntas. Hasil belajar IPS tergolong rendah berkategori kurang dan sangat kurang.

Model pembelajaran keterampilan proses harus melibatkan beberapa komponen pokok pembelajaran yang efektif yaitu mengamati, mengklasifikasikan, mengkomunikasikan, mengukur, memprediksi, dan menyimpulkan".

Dengan alasan inilah peneliti ingin menerapkan pendekatan keterampilann proses untuk dapat meningkatkan hasil belajara IPS pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan Tahun Pelajaran 2016/2017.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan pendekatan kerampilan proses dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa SMP Negeri 1 Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (*classroom action research*) Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu praktik pembelajaran di kelas secara berulang-ulang sambil melakukan perbaikan dalam rangka untuk mencapai tujuan atau mencapai hasil yang diharapkan. Penelitian tindakan sebagai bentuk investigasi yang bersifat reflektif partisipatif, kolaboratif dan spiral, yang memiliki tujuan untuk memperbaiki sistem, metode kerja, proses, isi, kompetensi dan situasi. Menurut Arikunto (2010: 9), penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki situasi pembelajaran di kelas. Sekolah tempat ia mengajar dengan penekanan kepada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran. Jadi, PTK adalah upaya perbaikan tindakan pembelajaran tertentu yang di kaji secara inkuiri, reflektif, triangulatif dan berualng-ulang (siklikal) dalam rangka mencapai tujuan pendidikan (Pargito, 2011). Tindakan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses agar menjadi lebih menarik, tidak membosankan, mudah dipahami siswa serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Observasi yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi tertutup. Menurut Kunandar (2008: 146), observasi tertutup adalah apabila sang pengamat atau observer melakukan pengamatannya dengan lembar observasi yang telah dibuat.

2. Uraian Teoritis

2.1. Penerapan

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia kata penerapan berasal dari kata terap dengan mendapatkan konfiks pe-an menjadi penerapan yang "berarti pemasangan", pengenaan, perihal "mempraktekkan (Kamus Umum Bahasa Indonesia", 1984 : 1059). Dari defenisi ini dapat ditarik pengertian bahwa kata penerapan dalam penegasan istilah bermakna menggunakan dan mempraktekkan pendekatan keterampilan proses dalam belajar mengajar IPS.

Dengan demikian kata penerapan menunjukkan pada seorang guru melakukan praktek pembelajaran dengan metode pendekatan keterampilan proses sehingga nantinya mendapatkan suatu perubahan melalui usaha

penerapannya. Perubahan itu dapat berupa hasil belajar dan aktivitas (tingkah laku siswa) dalam hal ini siswa-siswi di kelas VIII SMP Negeri 1 Hilisalawa'ahe.

2.2. Pendekatan Keterampilan Proses

Pendekatan keterampilan proses memiliki karakteristik bahwa proses pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa, sehingga mereka meilki berbagai keterampilan. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan fisik, keterampilan mental, dan keterampilan sosial. Keterampilan proses melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau intelektual, manual, dan sosial. Keterampilan kognitif atau intelektual terlibat karena dengan melakukan keterampilan proses siswa menggunakan pikirannya. Keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan proses karena mungkin mereka melibatkan penggunaan alat dan bahan, pengukuran, penyusunan atau perakitan alat. Keterampilan sosial dimaksudkan bahwa mereka berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan keterampilan proses, misalnya mendiskusikan hasil pengamatan.

Semantara itu Trianto (2010:144) menyatakan bahwa keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan kemampuan mental, fisik, dan sosialyang mendasar sebagai penggerak kemampauan-kemampuan yang lebih tinggi. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses merupakan keterampilan yang melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau intelektual, manual, dan sosial yang digunakan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan.

Pendekatan keterampilan proses adalah pendekatan pembelajaran yang menakankan pada proses belajar mengajar yang menuntut aktivitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari" (Mulyasa, 2005 : 99). Pendekatan keterampilan proses terjadi apabila siswa dapat menerapkan dan mengalami apa yang sedang terjadi atau yang dialaminya atau pengalaman sesungguhnya.

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan pendekatan keterampilan proses dalam penegasan istilah ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang semata-mata menekankan pada siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan yang diterapkan oleh guru dalam proses belajar mengajar IPS agar kreatifitas yang adadalam diri siswa dapat dikembangkan seperti keterampilan mengamati, mengkomunikasikan dan menyimpulkan apa yang dilakukannya serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2.3. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar (Sudjana, 2004 : 22). Hasil belajar pada hakekatnya tersirat dalam tujuan pembelajaran oleh karena itu hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan siswa.

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai dan diperoleh dalam pembelajaran IPS siswa atas dasar usaha yang diterima melalui pendekatan keterampilan proses yang diterapkan oleh guru sehingga nampak pada diri siswa berupa hasil belajar yang dapat diukur oleh guru melalui pemberian tes kepada siswa berupa tes tulis, perubahan tingkah laku secara kuantitatif dan diharapkan dapat menggunakan apa yang telah dipelajari dapat diterapkan berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Siklus I

Rencana pelaksanaan pada penelitian Siklus pertama, proses pembelajaran direncanakan dilakukan sebanyak dua kali pertemuan. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada hari selasa dengan alokasi waktu setiap pertemuan adalah 2 x 40 menit sesuai jadwal mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas VIII A SMP Negeri 1 Hilisalawa'ahe. Penelitian pada siklus pertama ini dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses pada Standar Kompetensi 3. Memahami kegiatan ekonomi masyarakat. Kompetensi Dasar mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Tahap ini dilakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah dan menganalisis akar permasalahan. Proses awal terhadap pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan dalam mengidentifikasi masalah dan akar masalah tersebut diantaranya melalui pengambilan data nilai ulangan harian siswa sebelum dilakukan penelitian tindakan pada standar kompetensi IPS pada kelas VII semester genap.

Pelaksanaan tindakan pada Siklus pertama pertemuan pertama sebagai kegiatan pendahuluan guru mengawali dengan menyampaikan SK, KD, Indikator dan tujuan pembelajaran serta model pembelajaran yang akan digunakan, menjelaskan materi secara garis besar. Kegiatan pendahuluan, guru memberikan motivasi kepada siswa pentingnya materi yang akan dipelajari, menjelaskan tema yang akan dipelajari serta kompetensi yang hendak dicapai, langkah selanjutnya guru memberikan penjelasan dan mengajukan pertanyaan sekitar tema sebagai apersepsi. Pada siklus pertama tema atau materi yang akan dibahas adalah mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, lalu siswa diminta untuk membentuk kelompok kecil terdiri dari 5 siswa yang bertugas mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Setiap kelompok mencari informasi tentang masalah yang akan dibahas yang akan dipresentasikan pada pertemuan kedua.

Tahap kedua guru melakukan *Elaborasi* setelah masing-masing kelompok menemukan satu masalah maka dilakukanlah identifikasi masalah dengan cara setiap kelompok menuliskan setiap masalah yang diperoleh dari diskusi kelompok mereka dalam daftar identifikasi masalah. Tahap ketiga guru melakukan *konfirmasi*, pada tahap ini guru memberikan umpan balik positif dan penguatan terhadap masalah yang akan menjadi kajian kelas. Pada kegiatan penutup guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi dan meminta setiap kelompok untuk bersiap-siap presentasi di pertemuan selanjutnya.

Siklus I pertemuan II diawali dengan apersepsi guru memberikan motivasi kepada siswa pentingnya materi yang akan dipelajari, menjelaskan tema yang akan dipelajari serta kompetensi yang hendak dicapai, langkah selanjutnya guru memberikan penjelasan dan mengajukan pertanyaan sekitar tema, tentang materi minggu yang lalu, menjelaskan SK, KD, Indikator serta tujuan yang hendak dicapai, guru memberikan beberapa pertanyaan sekitar materi sebagai motivasi bagi siswa dalam mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya. Kegiatan Inti dimulai dengan *eksplorasi*, guru meminta siswa untuk bergabung bersama kelompoknya dan mulai mendiskusikan materi yang akan di presentasikan. Guru membimbing siswa untuk mendiskusikan sumber-sumber informasi dan mengumpulkan informasi tersebut untuk dijadikan sumber bahan pemecahan masalah.

Hasil observasi oleh kolaborator kegiatan guru pada siklus I masih dalam katagori kurang baik dengan skor 65 dari total skor 150, atau sebesar 43,33%, hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan guru dalam menggunakan model pembelajaran keterampilan berproses pada siklus I belum mencapai indikator yang telah ditetapkan ≥ 75 %.

Aspek-aspek yang mendapatkan kreteria kurang dalam hal memeriksa kesiapan siswa, belum mengkaitkan antara materi dengan realitas kehidupan, belum tepat mengalokasikan waktu sesuai dengan yang direncanakan, belum melibatkan siswa secara keseluruhan dalam pemanfaatan sumber belajar, belum memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa, belum menumbuhkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa secara maksimal, belum melakukan Refleksi terhadap model pembelajaran keterampilan berproses. Ketujuh aspek yang mendapatkan nilai kurang di atas merupakan suatu kelemahan yang terjadi pada siklus I dan akan dijadikan bahan kajian untuk Refleksi dan revisi yang akan dilakukan pada siklus II.

Siklus II

Aspek-aspek yang diamati oleh kolaborator sebagai observer pada kegiatan dan kemampuan guru dalam proses pembelajaran siklus II yang dilaksanakan oleh guru dengan menerapkan model pembelajaran keterampilan berproses mendapatkan nilai yang baik dari observer, dari seluruh penilaian tidak terdapat lagi nilai kurang, kemampuan guru dalam proses pembelajaran dengan penggunaan model keterampilan berproses menurut penilaian observer sudah masuk katagori baik yaitu sebesar 65%, akan tetapi masih ada beberapa aspek yang mendapatkan nilai cukup, yaitu pada aspek melibatkan siswa dalam pembuatan dan pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran keterampilan berproses, aspek ke dua yang mendapat nilai cukup adalah asfek melakukan refleksi, dalam melakukan refleksi terhadap kegiatan siswa dari model pembelajaran keterampilan berproses guru belum melihatnya secara keseluruhan artinya masih ada kegiatan siswa yang belum ternilai atau belum terlihat segi kekurangannya.

Pada tahap refleksi peneliti dan kolaborator membahas pertumbuhan dan kekurangan atau kendala-kendala yang terjadi pada siklus II. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran keterampilan berproses sudah lebih baik dibandingkan pelaksanaan pembelajaran siklus I. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan persentase siswa yang memiliki hasil belajar dan aktivitas belajar yang lebih tinggi dibandingkan siklus I. Peningkatan hasil belajar berdasarkan indikator mengalami peningkatan dari 53 % pada siklus I menjadi 80% di siklus II untuk hasil belajar dan untuk indikator aktivitas belajar dari 55% di siklus I menjadi 68% di siklus II. Indikator aktivitas belajar siswa dinyatakan berhasil jika telah mencapai ≥75%. Maka berdasarkan ketetapan indikator tersebut guru harus melakukan perbaikan di siklus berikutnya agar aktivitas belajar siswa dapat lebih meningkat sesuai yang diharapkan.

Siklus III

Pelaksanaan siklus III merupakan hasil refleksi dari siklus II. Siklus III dilaksanakan dalam dua kali petemuan, dimana setiap pertemuan terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kompetensi Dasar mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Siklus III dimulai dengan tahap perencanaan, yaitu dengan menyusun skenario pembelajaran yang direncanakan dan merupakan perbaikan

dari siklus I dan siklus II, penyusunan skenario pembelajaran juga disesuaikan dengan indikator yang hendak dicapai, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan, lalu observasi dan refleksi. Sebelum melakukan tindakan pada siklus III, peneliti dan kolaborator sebagai guru mitra merancang dan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selain membuat RPP peneliti dan kolaborator mendiskusikan tidakan-tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan pada siklus III.

Berdasarkan hasil observasi di siklus III ini hampir sebagian besar dari jumlah siswa sudah memiliki pertumbuhan hasil belajar yang baik hal tersebut terlihat dari keadaan siswa yang sudah dapat menerima kekurangan dan kelebihan dirinya, sudah mulai mampu mengendalikan emosi, memahami konsep mengenai kemampuan dan ketidak mampuan dirinya, memiliki perasaan kebermanfaatan, memiliki sikap tentang kondisi saat ini dan prospek di masa yang akan datang, mulai memiliki keyakinan, memiliki nilai-nilai hidup yang positif, memiliki pendirian yang kuat, memiliki cita-cita, memiliki aspirasi, memiliki pandangan hidup, mempunyai perasaan bangga terhadap diri sendiri dan mulai dapat menyesuaikan diri dengan teman maupun kelompoknya.

Aktivitas belajar siswa sudah mulai terbangun hal tersebut terlihat dari siswa telah memiliki rasa ingin tahu yang besar, sering mengajukan pertanyaan, sudah memiliki banyak gagasan, mulai bebas menyatakan pendapat, mempunyai rasa keindahan, sudah memiliki pendapat sendiri, dapat bekerja sendiri sehingga tidak selalu bergantung terhadap temannya atau orang lain, senang dengan hal-hal yang baru dan sudah mulai memiliki kemampuan mengembangkan suatu gagasan.

Proses pembelajaran model pembelajaran keterampilan berproses, siswa tidak lagi terlihat bingung tetapi sudah mulai menikmati dan terlihat senang. Guru juga dalam pelaksanaan model pembelajaran memberikan motivasi dan *reward* terhadap kelompok yang melaksanakan tugasnya dengan baik, memberi hadiah kepada kelompok yang memiliki penampilan terbaik, berdasarkan penilaian dewan juri, dalam memahami materi pembelajaran siswa sudah lebih baik, penjelasan guru sudah dapat dimengerti oleh siswa. Pengamatan terhadap kemampuan guru dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh kolaborator sudah masuk dalam kategori sangat baik dengan jumlah skor 122 dari skor maksimal 150 atau sebesar 81,33 %. Dengan demikian, dalam penelitian ini proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran keterampilan berproses telah mencapai indikator yang diharapkan yaitu $\geq$ 75%.

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan selama proses pembelajaran dengan mengunakan metode pembelajaran pendekatan keterampilan proses dapat membuat siswa lebih senang dan lebih tertarik untuk belajar IPS, siswa memiliki kemampuan untuk mengungkapkan dan mengekspresikan dirinya seabagai individu maupun kelompok, dengan metode pembelajaran pendekatan keterampilan proses siswa dapat belajar aktif, karena aktivitas siswa terlihat hampir diseluruh proses pembelajaran, dari mulai perencanaan di kelas, kegiatan di lapangan, dan saat membuat pelaporan dalam hasil kelompok, siswa belajar *kooperatif*, dalam setiap kegiatan siswa selalu melakukan kerja sama pada saat persiapan pembelajaran, mengidentifikasi masalah, menentukan masalah, mencari informasi, pada saat membuat karya keterampilan berproses, saat presentasi dan saat refleksi siswa selalu bekerjasama baik dengan sesama teman, dengan guru bahkan, siswa belajar partisipatorik yaitu siswa melakoni *(learning by doing)*, siswa belajar demokrasi, dalam setiap langkah metode ini memiliki makna yang

ada hubungannya dengan praktek hidup demokrasi, dari mulai memilih masalah hingga saat refleksi siswa selalu terlibat dengan kebebasan mengeluarkan pendapat, bertanya, menghargai pendapat orang lain, perdebatan, kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam metode ini juga guru selalu berusaha untuk mencari cara untuk membuat siswa tertarik, tidak membosankan dan menyenangkan (*reactive teaching*), guru menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan belajar, selalu membangkitan motivasi belajar, dan selalu mengenali materi dan metode pembelajaran yang membuat siswa tidak bosan guru akan mancari cara untuk menanggulanginya. Pembelajaran dengan metode pendekatan keterampilan berproses menganut prinsip bahwa belajar itu harus menyenangkan, sesulit apapun materi pembelajaran apabila dipelajari dengan suasana yang

menyenangkan *(Joyfull learning)* pelajaran itu akan lebih mudah dipahami, karena siswa diberi kesempatan untuk menemukan sendiri ilmunya. "menurut Conny (1992 : 23) pendekatan *keterampilan proses* adalah pengembangan sistem belajar yang mengefektifkan siswa (CBSA) dengan cara mengembangkan keterampilan memproses perolehan pengetahuan sehingga peserta didik akan menemukan, mengembangkan sendiri fakta dan konsep serta menumbuhkan sikap dan nilai yang dituntut dalam tujuan pembelajaran khusus"

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Penggunaan model pendekatan keterampilan proses juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, karena dengan model pendekatan keterampilan proses siswa menjadi lebih kreatif hal tersebut terlihat dari kreativitas siswa dalam proses pembelajaran, siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar misalnya pada saat mengidentifikasi masalah, mencari sumber-sumber informasi, siswa sering mengajukan pertanyaan, memiliki banyak gagasan, menyatakan pendapat pada saat diskusi, memiliki rasa keindahan, senang dengan hal-hal yang baru.

4.2. Saran

Untuk meningkatkan hasil belajar IPS perlu dilakukan penggunaan pendekatan keterampilan proses di SMP Negeri 1 Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2010..*Prosedur Penelitian, Tindakan* .Jakarta: Rineka Cipta.

Conny, Semiawan. 1992. *Pendekatan Keterampilan Proses.* Jakarta: Gramedia Widiaswara Indonesia.

Depdikbud, 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Kunandar. 2008. *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mulyasa E. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Pargito. 2011. *Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru dan Dosen*. Lampung : Universitas Lampung.

Trianto, 2010. *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudjana, Nana. 2004. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung :Sinar. Baru Algensido Offset